DPMPTSP
KABUPATEN SRAGEN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

MAL PELAYANAN PUBLIK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dpmptspsragen
dpmptsp kabupaten sragen
https://dpmptsp.sragenkab.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagai upaya perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan good and clean government.

Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabiupaten Sragen Tahun 2025 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DPMPTSP Kabupaten Sragen, yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini mengacu pada pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap semoga dokumen ini memberikan manfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan di waktu berikutnya.

Sragen, 25 Pebruari 2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dengan ini Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, target dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi, target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis, penjelasan atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Fokus laporan ini adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : (RPJMD 2021-2025)

1. Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran : (RPJMD 2021-2025)

1. Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu

1. Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)
2. Jumlah PMA/ PMDN (investor)
3. Predikat Kinerja SAKIP perangkat daerah

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator inerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Seluruh tujuan/ sasaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100,72% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator tujuan/ sasaran. Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Tujuan : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Niai realisasi penanaman modal (trilyun)	2,30	2,40	104,35%	Istimewa
1.1	Sasaran. 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/ investor)	10.998	10.139	92,19%	Sangat Tinggi
1.2	Sasaran Penunjang : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP perangkat daerah	76,16	80,45	105,63%	Istimewa
Rata-rata capaian kinerja					100,72%	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 target;
2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan

Tujuan : (RPJMD 2025-2029)

1. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif

Sasaran : (RPJMD 2021-2025)

1. Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan
2. Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal
3. Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan

Untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menggunakan 5 (lima) indikator, yaitu

1. Persentase peningkatan realisasi investasi (%)
2. Predikat IKM bidang perizinan dan nonperizinan
3. Persentase peningkatan kegiatan usaha (%)
4. Nilai AKIP Perangkat Daerah
5. Nilai SKM Perangkat Daerah

Seluruh tujuan/ sasaran yang dituangkan dalam PK Perubahan merupakan kinerja tahun ke-1 pada periode Renstra Tahun 2025-2029. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 102,54% dengan hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	**Tujuan** : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan realisasi investasi (%)	**4,27%**	**4,294%**	**100,56%**	Istimewa
1.1	**Sasaran. 1** : Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Predikat IKM bidang perizinan dan nonperizinan	**89,56**	**90,00**	**100,49%**	Istimewa
1.2	**Sasaran. 2** : Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan kegiatan usaha (%)	**4,27%**	**4,74%**	**110,97%**	Istimewa
1.3	**Sasaran Penunjang** : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai AKIP PD	**80,45**	**80,45**	**100,00%**	Sangat Tinggi
		Nilai SKM OPD	**86,00**	**86,60**	**100,70%**	Istimewa
Rata-rata capaian kinerja					**102.54%**	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 4 target;

2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;

3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 target: dan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. TUGAS DAN FUNGSI 3

1. Tugas Pokok 4

2. Fungsi 4

3. Cascading dan Proses Bisnis 6

C. STRUKTUR ORGANISASI 18

D. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN 19

1. Susunan Kepegawaian 19

2. Sarana dan Prasarana 22

E. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 21

F. SISTEMATIKA PENULISAN 22

G. TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023 24

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 16

A. REVIU RENCANA STRATEGIS 26

1. Visi dan Misi 26

2. Tujuan dan Sasaran 27

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 28

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 31

2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 33

C. PERENCANAAN ANGGARAN 34

D. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA 36

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 38

A. AKUNTABILITAS KINERJA PERJANJIAN KINERJA 2025 38

1. Pengukuran Kinerja 38

2. Analisis Capaian Kinerja 40
a. Indikator realisasi penanaman modal 40
b. Indokator Jumlah PMA/PMDN 43
c. Indikator Kinerja SAKIP 46
B. AKUNTABILITAS KINERJA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2025 48
1. Pengukuran Kinerja 48
2. Analisis Capaian Kinerja 49
a. Indikator Persentase peningkatan realisasi investasi 50
b. Indikator Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperiznan 55
c. Indikator Persentase peningkatan kegiatan usaha 60
d. Indikator meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan 64
C. REALISASI ANGGARAN 67
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 67
E. INOVASI DAN PENGHARGAAN 68
BAB IV. PENUTUP 70
A. KESIMPULAN 70
B. SARAN 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Cascading Kinerja (2025-2029)	9
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Tahun 2025	20
Tabel 1.3	Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	21
Tabel 1.4	Aset Yang Dimiliki	14
Tabel 1.5	Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024	25
Tabel. 2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 (Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026)	29
Tabel. 2.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029)	19
Tabel. 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
Tabel. 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	33
Tabel. 2.5	Alokasi Anggaran perubahan DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2025	34
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	38
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	39
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	49
Tabel. 3.4	Realisasi PMA/PMDN Tahun 2025	50
Tabel. 3.5	Persentase Peningkatan investasi Per sektor tahun 2025	51
Tabel. 3.6	Realisasi sektor investasi tahun 2025	52
Tabel. 3.7	Nilai Per Unsur SKM	56
Tabel. 3.8	Realisasi Anggaran Tahun 2025	67
Tabel. 3.9	Efisiensi Anggaran Tahun 2025	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Kinerja (2025-2029)	7
Gambar 1.2	Peta Bisnis DPMPTSP Kabupaten Sragen	18
Gambar 1.3	Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen	19

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 000.8.6.3/ 461/18/2026

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen; dan
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2025, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sistematika Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut ;

BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 25-02-2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

TUGIYONO, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Investasi memiliki peran strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Dalam dokumen RPJMD 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Sragen menargetkan realisasi investasi 1,5 trilyun rupiah di awal kondisi RPJMD serta 1,7 trilyun rupiah di akhir tahun RPJMD. Target investasi tersebut dilakukan melalui investasi swasta dan pemerintah (PMA/PMDN) baik skala menengah besar, serta usaha mikro kecil. Dalam rangka peningkatan investasi swasta, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan mulai dari penyederhanaan/ kemudahan bidang perizinan serta peningkatan iklim kemudahan berusaha. Pertumbuhan investasi memiliki korelasi positif dengan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur perkembangan ekonomi suatu negara. Investasi menjadi salah satu komponen utama dalam perhitungan PDB dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, peningkatan nilai investasi akan berpengaruh positif terhadap peningkatan PDB dan sebaliknya. Posisi tersebut membuat investasi mempunyai peran strategis dalam perkembangan ekonomi negara. Investasi juga berdampak terhadap pencipataan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan daya beli masyarakat. Dampak tersebut relevan dengan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut semakin memperkuat peran strategis investasi dalam menciptakan kestabilan, perbaikan, serta peningkatan kondisi perekonomian Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sragen dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,87 persen pada tahun 2025. Namun, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 belum mengalami perlambatan yaitu sebesar 5,03 persen dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 5,05 persen.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen memiliki peran cukup penting dalam meningkatkan realisasi investasi serta menjadi focal point penghubung seluruh sektor investasi di Kabupaten Sragen, terutama antara pemerintah dan dunia usaha. Berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sragen target realisasi investasi tahun 2025 sebesar Rp 1,60 triliun rupiah.

Pada tahun 2025, DPMPTSP Kabupaten Sragen meningkatkan realisasi investasi dan melampaui target dengan capaian realisasi sebesar Rp 2,4 triliun atau sebesar 104% dari target

sebesar 2,4 trilyun. Realisasi PMDN sebesar 1.959,784 milyar dan realisasi PMA sebesar Rp. 441,227 Miliar. Sektor PMA dan PMDN tertinggi pada tahun 2025, terdapat lima sektor yaitu; 1). Perdagangan & Reparasi, 2). Jasa Lainnya, 3). Industri kulit, Barang dari Kulit dan Alas Sepatu, 4). Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, dan, 5). Industri Tekstil.

DPMPTSP Kabupaten Sragen telah menyiapkan berbagai kebijakan yang digunakan sebagai pondasi dalam menghadapi berbagai tantangan realisasi penanaman modal ke depan. Kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk merespon risiko yang berpengaruh pada tingkat pencapaian realisasi investasi, dalam rangka pengembangan penanaman modal ke depan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dan terintegrasi dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Sejalan dengan itu DPMPTSP Kabupaten Sragen menjalankan berbagai peran strategis tersebut dengan mengendepankan prinsip-prinsip *good governance* meliputi transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan fairness. Prinsip akuntabilitas menekankan pada komitmen dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara. Penyusunan Laporan kinerja ini disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini sebagai pijakan upaya untuk terus melakukan inovasi dan transformasi kinerja kelembagaan instansi pemerintah yang produktif, efisien, serta efektif kedepannya. Selain itu, laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban serta penyampaian informasi kepada publik terkait realisasi anggaran serta berbagai capaian kinerja sepanjang tahun 2025. DPMPTSP Kabupaten Sragen juga terus berupaya mewujudkan salah satu perangkat daerah yang andal, profesional, inovatif, dan berintregritas dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Berkenaan dengan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam salah satu pasal menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, DPMPTSP Kabupaten Sragen selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi DPMPTSP Kabupaten Sragen sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. DPMPTSP Kabupaten Sragen melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1. Tugas Pokok

a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, DPMPTSP Kabupaten Sragen melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

a. Kepala Dinas;

   Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

b. Sekretariat, membawahi:

   1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

   Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen.

   Sekretariat mempunyai fungsi ;

   1) Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen;
   2) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen;
   3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen;
   4) Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset, dan jasa penunjang di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen;
   5) Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen;
   6) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen;
   7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya;

c. Kelompok Substansi Penanaman Modal, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

   Kelompok Substansi Penanaman Modal mempunyai fungsi;

1) Penyusunan bahan program kerja di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi ;

1) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif

Daerah, Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;

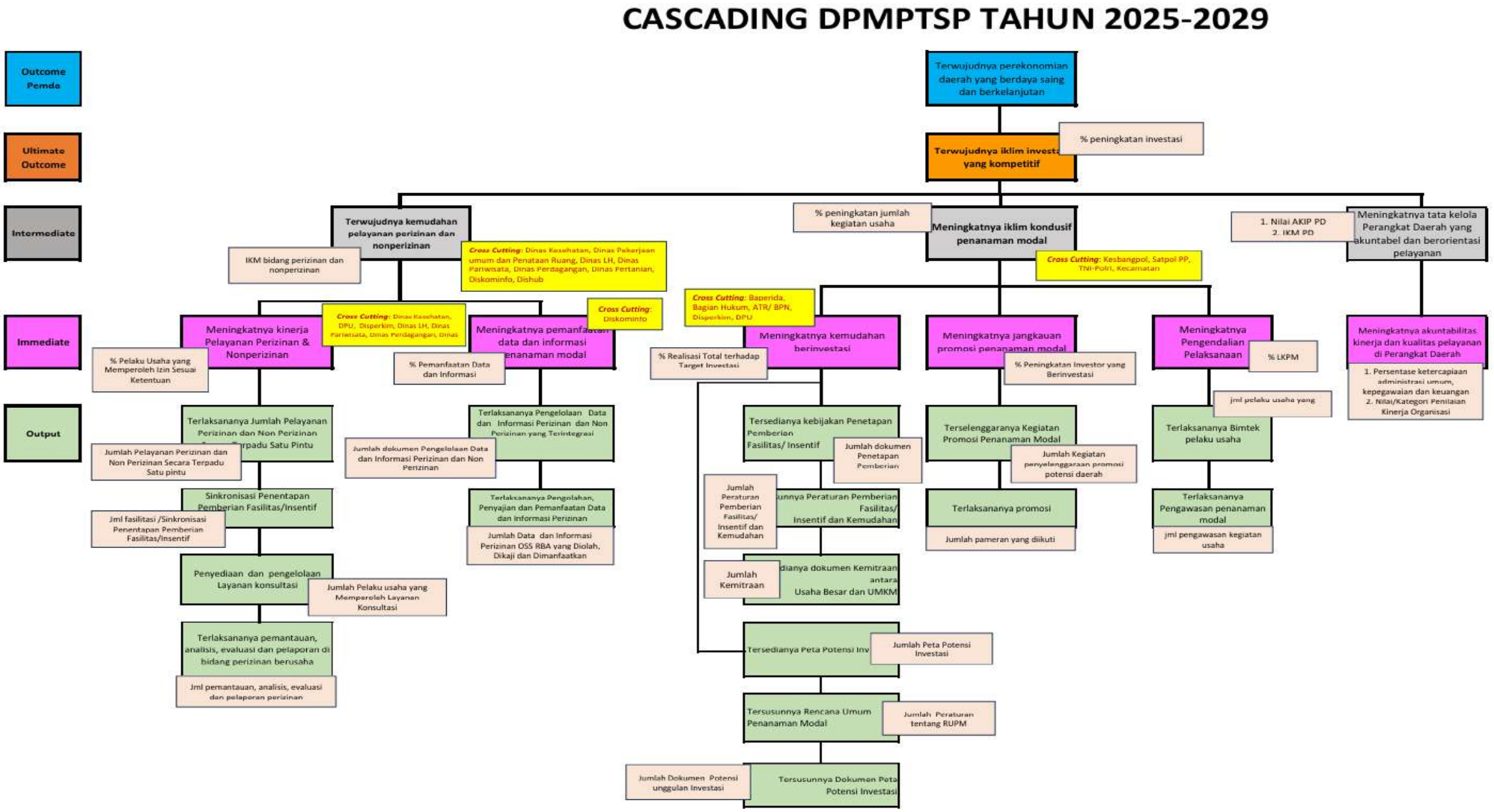
6) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Cascading dan Proses Bisnis

a. Cascading Kinerja

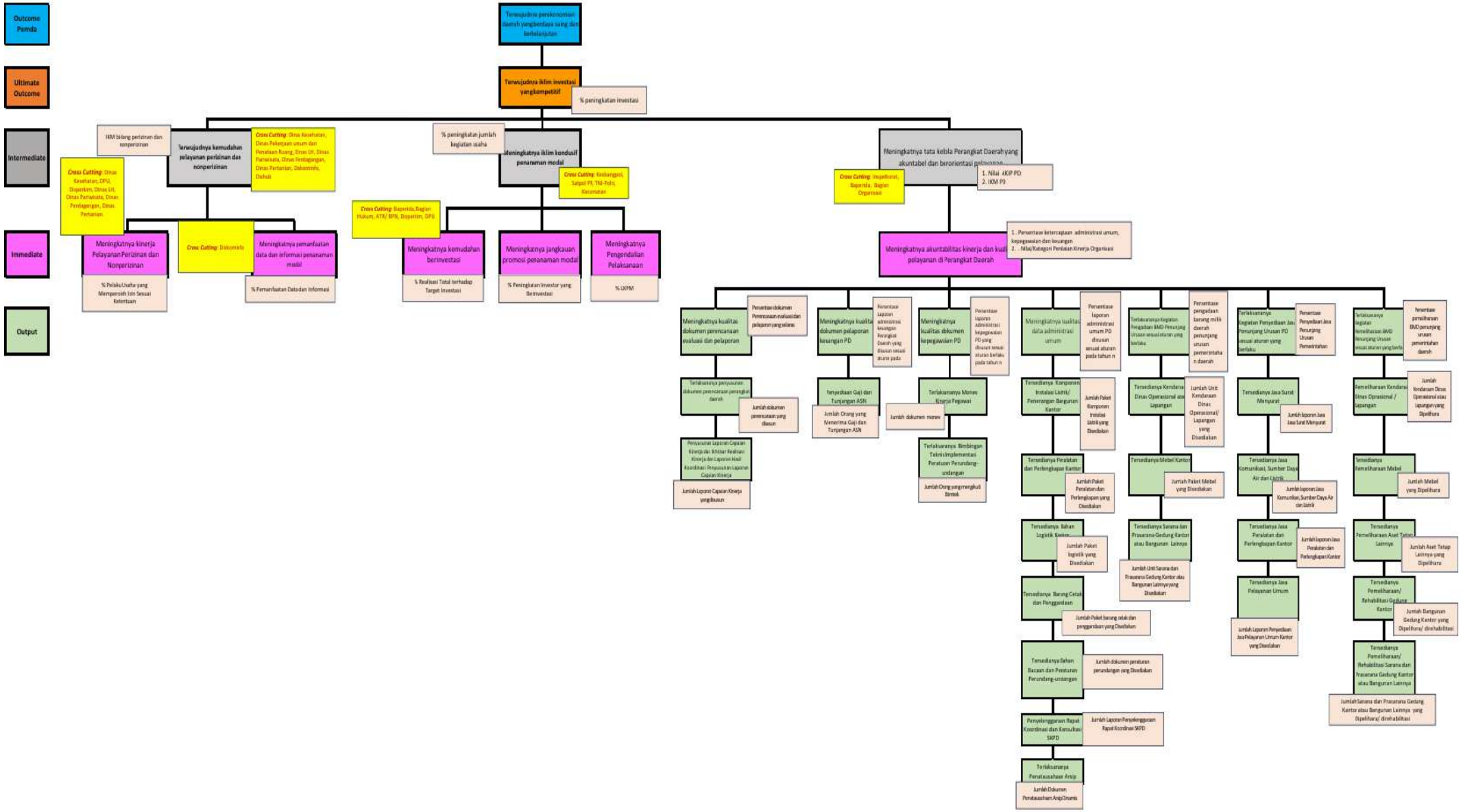
DPMPTSP Kabupaten Sragen dalam melaksanakan mandat kinerja dituangkan dalam Cascading Kinerja sebagai berikut;

Gambar 1.1
Cascading Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen



Bagan.2

CASCADING DPMPTSP TAHUN 2025-2029



Tabel 1.1

Cascading Kinerja (2025-2026)

SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase peningkatan investasi	Meningkatnya realisasi investasi				
		Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperzinaan					
				Meningkatnya kinerja Pelayanan Perizinan & Nonperizinan		**18.4**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)**
					Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	18.4.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (izin terbit)**
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	18.4.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota
					Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha	18.4.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan

					melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
					Terlaksananya Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	18.4.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
					Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	18.4.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
				Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal		**18.6**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
					Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.6.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)**
					Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	18.6.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

					Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
		Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	Meningkatnya jumlah kegiatan usaha				
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi		**18.2**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	% Realisasi Total terhadap Target Investasi
					Tersedianya dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**18.2.01**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)**
					Tersusunnya Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	18.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
					Tersedianya dokumen Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	18.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
					Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	18.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota**	**Jumlah dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (dokumen)**
					Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman	18.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota

					Modal Daerah Kabupaten/ Kota			
					Tersusunnya Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	18.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
				Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		**18.3**	**Program Promosi Penanaman Modal**	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi skala menengah/ besar
					Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	**18.3.01**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)**
					Tersusunnya dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota	18.3.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan		**18.5**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Persentase realisasi LKPM
					Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	18.5.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah LKPM hasil Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (laporan)**
					Terlaksananya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	18.5.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

					Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal	18.5.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
		Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya predikat SAKIP				
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Meningkatnya nilai IKM				
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah		**18.1**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**1. Persentase tingkat pelayanan keuangan, umum dan kepegawaian perangkat daerah** **2. Nilai/Kategori Penilaian Kinerja Organisasi**
					Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	**18.1.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan evaluasi dan pelaporan yang selaras**
					Terlasananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

								Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Terlasananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan keuangan PD	**18.1.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan pada tahun n**
					Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Meningkatnya kualitas dokumen kepegawaian PD	**18.1.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan berlaku pada tahun n**
					Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					Meningkatnya kualitas data administrasi umum	**18.1.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase laporan administrasi umum PD disusun sesuai aturan pada tahun n**
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	18.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	18.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	18.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah DokumenBahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
					Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Terlaksnanya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai aturan yang berlaku	**18.1.07.**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**
					Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
					Terlaksananya Pengadaan Mebel	18.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
					Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
					Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai aturan yang berlaku	**18.1.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

					Tersedianya Jasa Surat Menyurat	18.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
					Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai atuaran yang berlaku Pemerintahan Daerah	**18.1.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
					Terlaksananya pemeliharaan mebel	18.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
					Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
					Terlaksananya pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara

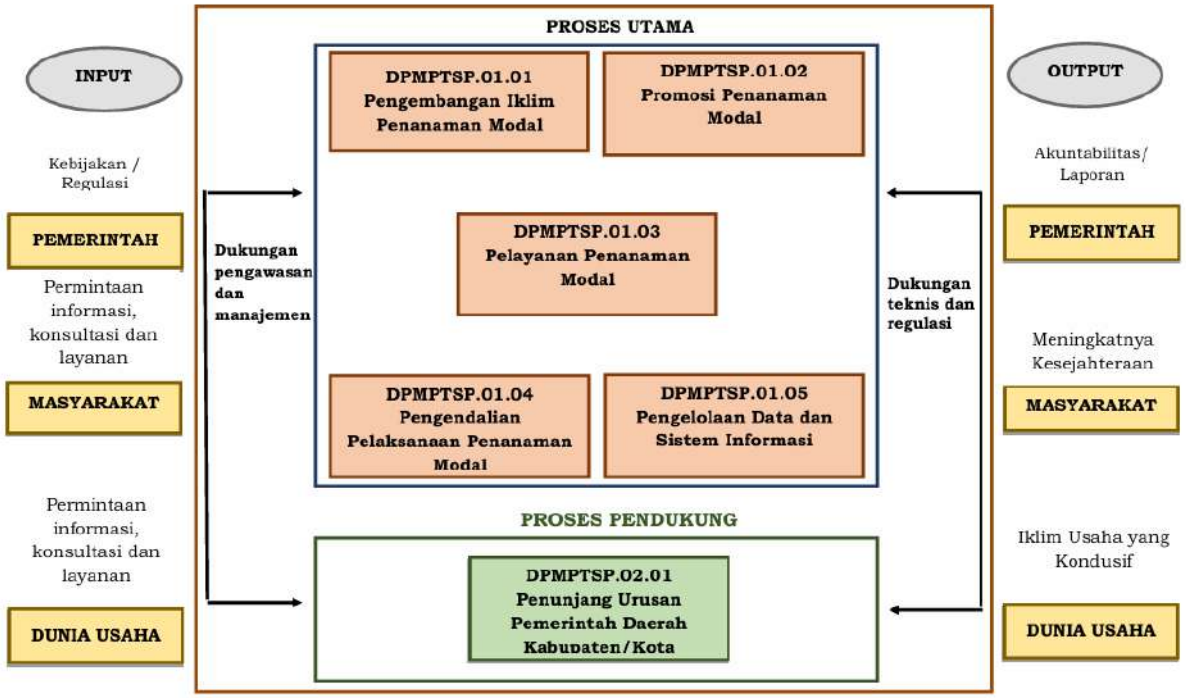
					Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
					Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

b. Proses Bisnis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman kepada Proses Bisnis. Tujuannya untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar instansi dan / atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan visi dan misi dalam menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan sebagai berikut :

Gambar 1.2

Peta Bisnis DPMPTSP Kabupaten Sragen

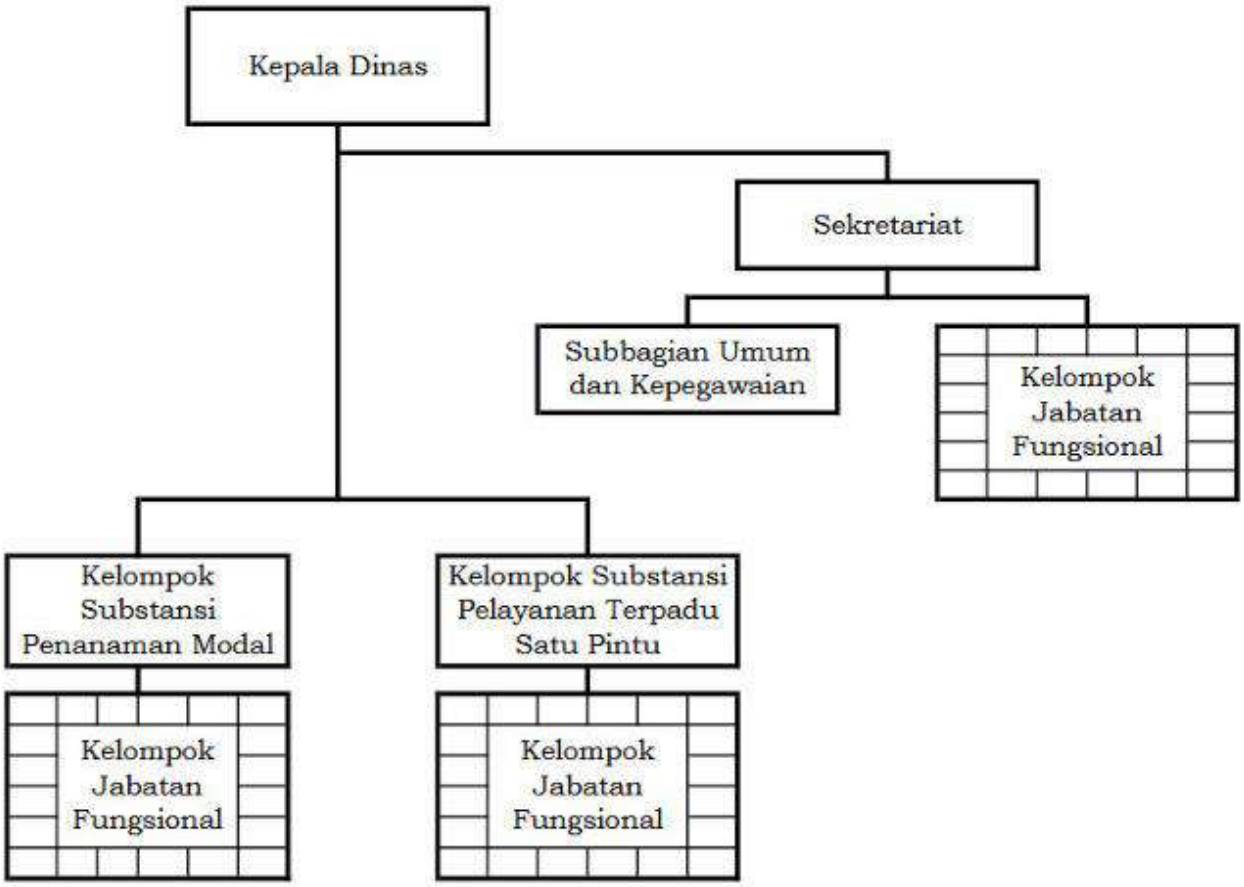


C. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sesuai dengan bagan dibawah ini:

Gambar 1.3

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen



Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (human resources) DMPTSP Kabupaten Sragen merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

D. DUKUNGAN SUMBERDAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

1. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai/ personil Dinas DMPTSP Kabupaten Sragen sebanyak 51 orang terdiri dari :

a Pegawai ASN (PNS) : 24 orang

b. Pegawai ASN (PPPK) : 23 orang

c. Pegawai Non ASN : 4 orang

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Tahun 2025

Golongan / Ruang	Esselon			JF	Staf	Jumlah
	II	III	IV			
Golongan IV/c						
Golongan IV/b	1	1				
Golongan IV/a				1		
Jumlah Golongan IV	1	1	0	1	0	3
Golongan III/d			1	12	0	
Golongan III/c				0	1	
Golongan III/b				2	1	
Golongan III/a				3		
Jumlah Golongan III	0	0	1	17	2	20
Golongan II/d						
Golongan II/c				1		
Golongan II/b						
Golongan II/a						
Jumlah Golongan II	0	0	0	1		1
Golongan I/d						
Golongan I/c						
Golongan I/b						
Golongan I/a						
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0
PPPK	0	0	0	0	23	23
Jumlah PPPK	0	0	0	0	23	23
Jumlah Non ASN	0	0	0	0	4	4
Total	1	1	1	19	29	51

Sumber data : DPMPTSP Tahun 2025

Tabel 1.3

Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah
1	DOKTOR (S3)	-
2	PASCASARJANA (S2)	5
3	SARJANA (S1)	17
4	SARJANA MUDA (D3)	3
5	SLTA / SMEA / MA	25
6	SLTP	1
7	SD	0
JUMLAH		50

Sumber data : DPMPTSP Tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana

Aset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut;

Tabel 1.4

Aset Yang Dimiliki

	ASET	**25.758.739.829,53**
1	**Tanah**	0
2	**Peralatan Dan Mesin**	7.757.507.055,53
2	Alat-alat Angkutan	1.327.449.896
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.261.061
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.910.000
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	9.825.000
7	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	28.414.473
8	Alat Laboratorium	1.015.229.000
10	Komputer	1.356.562.493
15	Alat Keselamatan Kerja	12.427.000
3	**Gedung dan Bangunan**	
1	Bangunan dan Gedung	17.808.057.774
4	**Jalan Jaringan dan Irigasi**	
	Bangunan Air	193.175.000
5	**Aset Tidak Berwujud**	
1	Aset Tidak Berwujud	366.315.500
6	**Aset Lain-lain**	
4	Aset Lain-lain	0

E. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Permasalahan yang dihadapi antara lain;

1. Perencanaan Penanaman Modal belum optimal;
2. Belum optimalnya kualitas promosi penanaman modal;

3. Terdapat potensi investasi yang belum teridentifikasi;
4. Belum optimalnya penyusunan kajian investasi;
5. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (One Single Submission) belum optimal; dan
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi system;
7. Pelayanan belum menjangkau seluruh jenis layanan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Perlunya koordinasi dan integrasi perencanaan kebijakan penanaman modal;
2. Penyusunan kajian investasi dan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal;
3. Optimalisasi kerjasama penanaman modal dengan stake holder;
4. Optimalisasi kegiatan pengawasan penanaman modal, termasuk pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha;
5. Belum optimalnya dukungan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronika;
6. Optimalisasi pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi (mal pelayanan publik);
7. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat dan;
8. Peningkatan inovasi layanan investasi serta perizinan dan nonperizinan;

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Sragen ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun sistematika penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

   Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sering dihadapi organisasi. Di dalam bab I terdapat pula tindak lanjut LHE AKIP 2024.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

   Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan, dengan sistematika sebagai berikut:

   a. Reviu Rencana Strategis

b. Indikator Kinerja Utama

c. Perjanjian Kinerja Tahun bersangkutan

d. Perencanaan Anggaran Tahun bersangkutan

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan meningkatkan kinerjanya.

G. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 Nomor 700.1.2.1/198/1-03/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sragen, yang mengacu kepada rekomendasi Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten Sragen. Tindak lanjut tersebut sesuai tabel berikut.

Tabel 1.5

Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Data Dukung
1.	memerintahkan kepada tim penyusun laporan kinerja agar di masa yang akan datang: a. Menyampaikan laporan kinerja tepat waktu. b. Menghitung tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya agar dikaitkan dengan kinerja.	Surat Perintah kepada tim penyusun laporan kinerja agar: a. laporan kinerja disampaikan tepat waktu. b. Menghitung tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan kinerja.	https://drive.google.com/drive/folders/15Sh8jQIJ7xaFm5dJB6wfRRkI26d3wQoZ?usp=sharing
2.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja triwulan dengan melengkapi realisasi penggunaan anggaran atas program dan kegiatan yang secara langsung mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU).	Meningkatkan kualitas laporan kinerja triwulan dengan melengkapi realisasi penggunaan anggaran atas program dan kegiatan yang secara langsung mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU).	https://drive.google.com/drive/folders/1Fxoebz4TsylgPU0HFMN2aM2cySvklpcm?usp=drive_link
3.	Membangun dialog kinerja melalui rapat internal yang dihadiri pimpinan dan seluruh pegawai.	Membangun dialog kinerja melalui rapat internal yang dihadiri pimpinan dan seluruh pegawai.	https://drive.google.com/drive/folders/1geH4wCL94o3uLxRKQcPhfGIGk3K3rBzk?usp=drive_link
4.	Mendorong pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal	a. Menyusun Rencana Aksi tindak lanjut hasil evaluasi APIP b. Melakukan pemantauan progres tindak lanjut c. Menindaklanjuti hasil evaluasi internal d. Melakukan rapat pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi	https://drive.google.com/drive/folders/1FTvuMYwpO1uL6i9ucRnv_9qk2E2SYwuw?usp=drive_link

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. REVIU RENCANA STRATEGIS

Reviu Rencana Strategis 2021–2026 dijadikan acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan guna menentukan rencana, program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran agar dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sragen, selain itu diharapkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam urusan penanaman modal.

Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman dan penganggaran berbasis kinerja untuk menyusun dokumen Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang sangat menentukan agar mampu menjawab tantangan kinerja serta tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, terukur dan terpadu, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dankendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada serta harus mendukung tercapainya target kinerja yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten SragenTahun 2021–2026. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 tahun.

1. Visi dan Misi (RPJMD 2021-2026)

- Visi

  Visi Bupati Sragen “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”

- Misi

  Dalam mencapai Visi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menerapkan Misi Kepala Daerah dan Pembangunan Daerah agar Visi yang diharapkan dapat tercapai yaitu: “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan”

Visi dan Misi (RPJMD 2025-2029)

- Visi

  Visi Bupati Sragen “Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata”

- Misi

  Dalam mencapai Visi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menerapkan Misi Kepala Daerah dan Pembangunan Daerah agar Visi yang diharapkan dapat tercapai yaitu: “Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi yang Terintegrasi dengan Pembangunan Kewilayahan dan Pasar Global”

2. Tujuan dan Sasaran (RPJMD 2021-2026)

- Tujuan

  Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan misi tersebut diatas, maka tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut “Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah” Dengan indikator tujuan sebagai berikut “Nilai realisasi penanaman modal”

- Sasaran

  Adapun sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut “Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah” dengan indikator kinerja “Jumlah PMA/PMDN (investor)”.

Tujuan dan Sasaran (RPJMD 2025-2029)

- Tujuan

  Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut “ : **“ Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif ”**

- Sasaran

  Adapun sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

  1. Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan
  2. Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah untuk ke depannya, sehingga bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai komitmen dalam peningkatan hasil kinerja instansi, Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 telah dilakukan revisi pada target pencapaian setiap tahunnya.

Tabel. 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
(Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026)

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)	TARGET					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5					6
1.	TUJUAN : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)	• **Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah . • **Formulasi Pengukuran:** Nilai investasi dalam tahun berjalan. • **Tipe Perhitungan:** Kumulatif • **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	8,00
1.1	SASARAN : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/investor)	• **Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan iklim usaha yang berdaya saing dan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha, yang mendukung peningkatan jumlah PMA/ PMDN (investor). • **Formulasi Pengukuran:** Jumlah PMA/ PMDN berdasarkan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam tahun berjalan. • **Tipe Perhitungan:** Komulatif • **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1.250	1.313	3.000	3.250	3.500	12.313

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029
(Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029)

PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
TUGAS	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	
FUNGSI	:	1)	Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
		2)	Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
		3)	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
		4)	Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
		5)	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4	5
1.	TUJUAN STRATEGIS: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	Persen	• **Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan realisasi investasi. • **Formulasi Pengukuran:** Menghitung kenaikan realisasi investasi tahun n terhadap realisasi investasi tahun n-1 dengan rumus: ((n-(n-1)/(n-1))x100% • **Tipe Penghitungan:** Non Kumulatif • **Penanggungjawab** Kepala DPMPTSP • **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal
1.1	SASARAN STRATEGIS.1 : Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang perizinan dan nonperizinan	Predikat	• **Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen.

1	2	3	4	5
				• **Formulasi Pengukuran:** Survei berdasarkan PermenPAN&RB Nomor 14 Tahun 2017, guna menentukan Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan. Kategori predikat IKM sebagai berikut; 1. 25,00-64,99 : D (Tidak Baik) 2. 65,00-76,60 : C (Kurang Baik) 3. 76,61-88,30 : B (Baik) 4. 88,31-100,00 : A (Sangat Baik) • **Tipe Perhitungan:** Non Kumulatif • **Penanggungjawab** Kepala DPMPTSP • **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan nonperizinan
1.2	SASARAN STRATEGIS.2 : Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	Persen	• **Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan kegiatan usaha yang mendukung iklim usaha kondusif kegiatan penanaman modal. • **Formulasi Pengukuran:** Membandingkan jumlah kegiatan usaha tahun n dibanding kegiatan usaha tahun n-1, dengan rumus : ((n-(n-1)/(n-1))x100% • **Tipe Penghitungan:** Non Komulatif • **Penanggungjawab** Kepala DPMPTSP • **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan nonperizinan

1. Perjanjian Kinerja

Melalui perjanjian kinerja ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan pimpinan perangkat daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Selain itu juga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Tabel. 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	**Tujuan Strategis** : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	1,65	trilyun rupiah
2	**Sasaran Strategis**: Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	10.995	investor
3	**Sasaran Penunjang**: Meningkatnya akuntabilitaskinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (76,16)	predikat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	5.949.254.177	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.000.000	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	137.534.000	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	482.359.500	DAU
5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	32.000.000	DAU
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	55.000.000	DAU
	Jumlah	6.756.147.677	

2. Perubahan Perjanjian Kinerja

Tabel. 2.4

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Tujuan Strategis : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	4,27	Persen
2	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperzinaan	A (Sangat Baik/89,56)	Predikat
	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	4,27	Persen
3	Sasaran Penunjang: Meningkatnya tata kelola dan perangkat daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daeah	80,45	Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,00	Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	5.410.108.936	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.000.000	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	113.919.000	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	346.347.000	DAU
5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	23.853.000	DAU
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	105.000.000	DAU
	Jumlah	6.099.227.936	

C. PERENCANAAN PENGANGGARAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dalam melaksanakan kegiatan di bidang penanaman modal dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran perubahan DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Belanja Operasi	Belanja Modal	Sumber Dana
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**6.099.227.936**	**5.753.872.193**	**345.355.743**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.410.108.936**	**5.114.753.193**	**295.355.743**	DAU
2.18.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.943.000**	**3.943.000**	**0**	**DAU**
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.263.000	2.263.000	0	DAU
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.680.000	1.680.000	0	DAU
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.740.425.434**	**3.740.425.434**	**0**	**DAU**
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.740.425.434	3.740.425.434	0	DAU
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**16.580.000**	**16.580.000**	**0**	**DAU**
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0	DAU
2.18.01.2.05.00011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.580.000	16.580.000	0	DAU
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**367.538.200**	**263.121.000**	**104.417.200**	**DAU**
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.326.000	32.326.000	0	DAU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.018.200	56.601.000	104.417.200	DAU
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.204.000	48.204.000	0	DAU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.540.000	45.540.000	0	DAU
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	7.000.000	0	DAU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.450.000	63.450.000	0	DAU
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	10.000.000	0	DAU
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**154.249.000**	**-**	**154.249.000**	**DAU**
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	35.000.000	-	35.000.000	DAU
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.945.000	-	74.945.000	DAU

2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	44.304.000	-	44.304.000	**DAU**
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**839.795.302**	**839.795.302**	**0**	DAU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.400.000	2.400.000	0	DAU
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	443.662.922	443.662.922	0	DAU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.854.000	50.854.000		DAU
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	342.878.380	342.878.380	0	**DAU**
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**287.578.000**	**250.888.457**	**36.689.543**	DAU
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.130.000	169.130.000	0	DAU
2.18.01.2.09.0003	Pemeliharaan Mebel	11.552.000	11.552.000	0	DAU
2.18.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.282.000	9.282.000	0	DAU
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.289.543	34.600.000	36.689.543	DAU
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.324.457	26.324.457	0	DAU
2.18.02.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	**DAU**
2.18.02.2.02	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	**DAU**
2.18.02.2.02.0004	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	100.000.000	100.000.000	0	DAU
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**113.919.000**	**113.919.000**	**0**	**DAU**
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**113.919.000**	**113.919.000**	**0**	**DAU**
2.18.01.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	113.919.000	113.919.000	0	DAU
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**346.347.000**	**346.347.000**	**0**	**DAU**
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**346.347.000**	**346.347.000**	**0**	**DAU**
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	54.951.000	54.951.000		DAU

2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	100.863.500	100.863.500	0	DAU
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis risiko	36.290.000	36.290.000	0	DAU
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	154.242.500	154.242.500	0	DAU
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**23.853.000**	**23.853.000**	**0**	**DAU**
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**23.853.000**	**23.853.000**	**0**	**DAU**
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	23.853.000	23.853.000	0	DAU
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**105.000.000**	**55.000.000**	**50.000.000**	**DAU+ DIF**
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**105.000.000**	**55.000.000**	**50.000.000**	**DAU+ DIF**
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	105.000.000	55.000.000	50.000.000	**DAU+ DIF**

D. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

1. Aplikasi GRMS/SSO

   Untuk mendukung tercapainya kinerja yang optimal dan penerapan SAKIP yang baik sebagai perwujudan good governance, maka DPMPTSP Kabupaten Sragen menggunakan instrument pendukung dari Sistem GRMS/SSO yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, seperti sirenja, SIPD, e-kinerja, e-monevrkpd serta e-sakip yang berfungsi untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja SKPD.

2. Aplikasi Pendukung Lainnya

   Selain menggunakan aplikasi tersebut di atas, DPMPTSP Kabupaten Sragen juga memanfaatkan aplikasi dalam meningkatkan kinerja dan untuk memudahkan dalam pelayanan sesuai tugas pokok urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Aplikasi tersebut antara lain ;

   a. OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Aproach) aplikasi yang telah disediakan oleh BKPM RI dalam mendukung layanan perizinan dan non perizinan berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja.

b. SIPIONER adalah Sistem Perizinan Online Sragen, aplikasi layanan perizinan dan nonperizinan yang tidak termasuk dalam OSS RBA.
c. Layanan Bergerak adalah Layanan Pendampingan dan Jemput Bola, yaitu layanan mobile dan pendampingan bagi pelaku usaha terutama di wilayah dengan jangkauan yang jauh dari pusat kota.
d. SiPelangi adalah Sistem Informasi Peluang Investasi, yaitu palikasi yang memudahkan bagi calon investor untuk mendapatkan informasi tentang tata ruang wilayah Kabupaten Sragen.
e. PASTI-OL adalah Peta Pesebaran Investasi, yaitu aplikasi yang menyediakan informasi pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Sragen.
f. SIAP adalah Sistem Informasi Aduan Perizinan, yaitu aplikasi layanan pengaduan masyarakat guna mendukung tindak lanjut penyelesaian aduan masyarakat terkait perizinan dan layanan DPMPTSP.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran Kinerja di Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 pada Lembar Kriteria Evaluasi. Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut:

a. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{rencana} x100\%$$

b. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{rencana - (realisasi - rencana)}{rencana} x\ 100\%$$

c. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{rencana} x100\%$$

Dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024, dengan skala yang digunakan 6 (enam) kriteria sebagai berikut :

Tabel. 3.1

Skala Peringkat Nilai

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria
1	Lebih dari 100 %	Istimewa
2	91% - ≤ 100 %	Sangat Tinggi
3	76 % - ≤ 90 %	Tinggi
4	66 % - ≤ 75 %	Sedang
5	51 % - ≤ 65 %	Rendah
6	≤ 50 %	Sangat Rendah

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator inerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Seluruh tujuan/ sasaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100,72% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator tujuan/ sasaran. Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Tujuan : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Niai realisasi penanaman modal (trilyun)	2,30	2,40	104,35%	Istimewa
1.1	Sasaran. 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/ investor)	10.998	10.139	92,19%	Istimewa
1.2	Sasaran Penunjang : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP perangkat daerah	76,16	80,45	105,63%	Istimewa
Rata-rata capaian kinerja					100,72%	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

a. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 target;

b. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0target;

c. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan

2. Analisis Capaian Kinerja

Tujuan :
Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Capaian indikator tujuan OPD di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Niai realisasi penanaman modal (trilyun)	2,30	2,40	104,35%	Istimewa

Keterangan:
Sumber data dari pengolahan data DPMPTSP

a. Indikator Nilai realisasi penanaman modal

Nilai Realisasi penanaman modal tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 2,4 trilyun rupiah atau peningkatan sebesar 4,27%. Terjadi peningkatan sebesar 4,29% dari nilai realisasi sebelumnya yaitu 2,30 trilyun pada tahun 2024. Realisasi tersebut mencapai 104,35% dari yang ditargetkan di tahun 2025 yaitu 2,30 trilyun. Capaian ini masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi yang sama dari target investasi nasional sebesar 101,3% di tahun 2025.

Adapun Perbandingan realisasi peningkatan realisasi 2023 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Niai realisasi penanaman modal (trilyun)	2,20	2,30	2,40

Keterangan:
Sumber data dari pengolahan data DPMPTSP

Peningkatan realisasi investasi pada tahun 2025 jika dibandingkan realisasi tahun 2024 pada indikator ini, salah satunya karena adanya peningkatan realisasi investasi PMA di Kabupaten Sragen. Tercatat realisasi investasi PMA tahun 2024 sebesar Rp. 320 milyar, sedangkan tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 441 milyar. Selain itu peningkatan ini juga kontribusi dari sektor UMK dan Menengah, sedangkan pada sektor usaha besar sedikit turun dari 1,27 trilyun pada tahun 2024 menjadi 1,19 trilyun pada tahun 2025.

Perbandingan peningkatan realisasi investasi tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

Indikator Tujuan	Tahun 2025			
	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
Niai realisasi penanaman modal (trilyun)	1,7	2,40	141,17%	Melebihi Target

Keterangan:
Sumber data dari pengolahan data DPMPTSP

Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) dari periode Renstra 2021-2026 dimana indikator nilai realisasi penanaman modal dan jumlah PMA/PMDN telah melebihi target di akhir periode Renstra. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi investasi sektor usaha mikro, kecil mikro dan menengah.

Adapun perbandingan antara realisasi indikator niai realisasi penanaman modal tahun 2025 dengan realisasi indikator yang sama di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta realisasi investasi di Jawa Tengah sebagai berikut:

Indikator Tujuan	Kabupaten Sragen	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Boyolali	Realisasi Prov. Jawa Tengah	Nasional
Niai realisasi penanaman modal (trilyun)	2,40	5,21	3,29	88,50	1.905,6

Keterangan:
Dari berbagai sumber

Dari tabel diatas diketahui bahwa indikator niai realisasi penanaman modal lebih kecil dari realisasi kabupaten lainnya termasuk apabila dibandingkan dengan realisasi nasional sebesar (1,26%). Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain;

1). Secara geografis posisi Kabupaten Sragen dibanding dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, yang lebih dekat dengan Kota Surakarta, dimana akses menuju sarana transportasi nasional maupun internasional lebih dekat dan mudah. Selain itu sarana transportasi dan akomodasi juga cukup berpengaruh pada mobilitas antar wilayah.
2). Kebijakan Penanaman modal yang ada di Kabupaten Sragen dalam hal ini Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal perlu segera untuk diimplementasikan pada sektor-sektor strategis investasi, misalnya sektor industri.
3). Kawasan peruntukan industri yang kurang menarik bagi calon investor, karena

kurangnya infrastruktur pendukung investasi.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian realisasi investasi yang optimal, pada Tahun 2025 adalah:

1) Melakukan sosialisasi kebijakan penanaman modal yang lebih menitikbertkan pada pemberian kemudahan/ insentif penanaman modal
2) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan perizinan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten; dan
3) Melakukan pengembangan inovasi layanan investasi dalam rangka memberikan kemudahan bagi calon investor.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja pencapaian realisasi penanaman modal pada tahun 2026, diantaranya:

1) Menyusun kebijakan teknis penanaman modal dalam pemberian kemudahan/ insentif penanaman modal sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
2) Meningkatkan pendampingan pelaporan LKPM melalui klinik LKPM mapun bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan ;
3) Meningkatkan pendampingan/ layanan perbantuan perizinan dan nonperizinan serta fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha di wilayah rentan kemiskinan.

Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian indikator nilai realisasi penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Penanaman Modal
   1.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan
2. Program Promosi Penanaman Modal
   2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
   3.1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

4.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

5.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.1 :
Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Capaian Indikator Sasaran.1 ini di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/ investor)	10.998	10.139	92,19%	Sangat Tinggi

Keterangan:
Sumber data dari pengolahan data DPMPTSP

b. Indikator Jumlah PMA/ PMDN

Jumlah PMA/ PMDN tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 10.139 investor dari capaian tahun 2024 sebesar 10.995 investor, dengan capaian kinerja sebesar 92,19% masih tergolong kategori Sangat Tinggi.

Adapun Perbandingan realisasi peningkatan realisasi 2023 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Sasaran.1 : Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/ investor)	14.936	10.995	10.139

Keterangan:
Sumber data dari pengolahan data DPMPTSP

Jumlah PMA/PMDN pada tahun 2025 jika dibandingkan realisasi tahun 2024 pada indikator ini mengalami penurunan.

Perbandingan peningkatan Jumlah PMA/ PMDN tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Tahun 2025			
	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kamajuan
Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/ investor)	6.907	10.139	147%	Melebihi Target

Keterangan:
Sumber data dari pengolahan data DPMPTSP

Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) dari periode Renstra Tahun 2021-2026 dimana indikator jumlah PMA/PMDN telah melebihi target di akhir periode Renstra. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi investasi sektor usaha mikro, kecil mikro dan menengah.

Adapun perbandingan antara realisasi indikator jumlah PMA/PMDN tahun 2025 dengan realisasi indikator yang sama di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta realisasi investasi di Jawa Tengah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Kabupaten Sragen	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Boyolali	Realisasi Provinsi Jawa Tengah
Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/ investor)	10.109	NA	NA	105.078

Keterangan:
Sumber data dari berbagai sumber

Dari tabel diatas diketahui bahwa indikator jumlah PMA/PMDN lebih rendah dari realisasi kabupaten lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain;

1). Di Kabupaten Sragen penanam modal lebih didominasi oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah yang memerlukan pendampingan maupun fasilitasi dari pemerintah baik dalam bentuk pengembangan usaha maupun fasilitas kemudahan lainnya.

2). Kebijakan Penanaman modal yang ada di Kabupaten Sragen perlu segera untuk diimplementasikan pada semua sektor strategis investasi, misalnya sektor industri, termasuk sektor mikro kecil dan menengah.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian realisasi investasi yang optimal, pada Tahun 2025 adalah:

1) Melakukan sosialisasi kebijakan penanaman modal yang lebih menitikbertkan pada pemberian kemudahan/ insentif penanaman modal

2) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan perizinan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten; dan
3) Melakukan pengembangan inovasi layanan investasi dalam rangka memberikan kemudahan bagi calon investor.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja pencapaian realisasi penanaman modal pada tahun 2026, diantaranya:

1) Menyusun kebijakan teknis penanaman modal dalam pemberian kemudahan/ insentif penanaman modal sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
2) Meningkatkan pendampingan pelaporan LKPM melalui klinik LKPM mapun bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan ;
3) Meningkatkan pendampingan/ layanan perbantuan perizinan dan nonperizinan serta fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta pelaku usaha di wilayah rentan miskin.

Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian indikator jumlah PMA/PMDN adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Penanaman Modal
   1.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan .
2. Program Promosi Penanaman Modal
   2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
   3.1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
   4.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   5.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Penunjang : ”Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah”

Capaian indikator sasaran “**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah”** tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Predikat Kinerja SAKIP perangkat daerah	76.16	80.45	105.63%	Istimewa

c. Indikator Kinerja SAKIP perangkat daerah

Hasil pengukuran atas Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan dari target tahun sebelumnya belum tersedia sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja hasil pengukuran tahun 2024.

Nilai Realisasi Kinerja SAKIP perangkat daerah tahun 2025 sebesar 80,45. Realisasi tersebut sudah mencapai 105,63% dari yang ditargetkan di tahun 2025 yaitu 76,16.

Perbandingan realisasi Kinerja SAKIP perangkat daerah tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
70,90	76,15	80,45

Perbandingan realisasi Kinerja SAKIP perangkat daerah tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Tahun 2025			
	Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan
Kinerja SAKIP perangkat daerah	70,60	80,45	113,95%	Melebihi Target

Keterangan:
Sumber data dari DPMPTSP

Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) dari periode Renstra 2021-2026 dimana indikator Kinerja SAKIP perangkat daerah telah ***melebihi target*** dari target akhir Renstra. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) Implementasi SAKIP telah mengalami perbaikan dari waktu ke waktu yang didukung oleh peran serta pimpinan dan seluruh pegawai;
2) Implementasi SAKIP bukan hanya pada tataran teori namun juga menjadi tuntutan bagi unit kerja dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.
3) Pimpinan telah menetapkan mekanisme kerja dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas capaian kinerja setiap tri wulan.
4) Perbaikan komponen pada perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Adapun perbandingan antara realisasi indikator Kinerja SAKIP perangkat daerah tahun 2025 dengan realisasi indikator yang sama adalah sebagai berikut:

Realisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen	Realisasi Kabupaten Sragen	Realisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
80,45	67,53	NA

Keterangan:
Dari berbagai sumber

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi indikator Kinerja SAKIP perangkat daerah tidak tertinggal dari realisasi Pemerintah Kabupaten Sragen, disebabkan antara lain;

1) DPMPTSP telah berupaya melakukan perbaikan atas implementasi SAKIP dari tahun ke tahun
2) DPMPTSP telah berupaya melakukan perbaikan pada komponen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Kinerja SAKIP perangkat daerah pada Tahun 2025 adalah:

1) Melakukan sosialisasi implementasi SAKIP di lIngkungan internal DPMPTSP.
2) Melaksanakan koordinasi dalam implementasi SAKIP
3) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin setiap tri wulan, dalam rangka mengetahui sejauh mana pencapaian target, dan perbaikan apa yang dapat dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target-target yang diharapkan.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian Kinerja SAKIP perangkat daerah pada tahun 2026, diantaranya:

1) Melakukan peningkatan implementasi SAKIP dalam rangka peningkatan penerapan dan perbaikan kinerja SAKIP sesuai arah dan tujuan penerapan SAKIP;
2) Meminta seluruh sub unit kerja agar melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik serta menyampaikan hasilnya kepada pimpinan unit kerja;
3) Melakukan perbaikan-perbaikan hasil rekomendasi APIP atas evaluasi implementasi SAKIP

Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian Kinerja SAKIP perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    e. Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    g. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. AKUNTABILITAS KINERJA BERDASARKAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja di sub bab ini adalah pengukuran kinerja terhadap Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPPTSP) Kabupaten Sragen Tahun 2025 yaitu diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025. Seluruh tujuan/ sasaran yang dituangkan dalam PK Perubahan merupakan kinerja tahun ke-1 pada periode Renstra Tahun 2025-2029. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 102,54% dengan hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	**Tujuan** : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan realisasi investasi (%)	**4,27%**	**4,294%**	**100,56%**	Istimewa
1.1	**Sasaran. 1** : Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Predikat IKM bidang perizinan dan nonperizinan	**4,27%**	**4,74%**	**110,97%**	Istimewa
1.2	**Sasaran. 2** : Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan kegiatan usaha (%)	**89,56**	**90,00**	**100,49%**	Istimewa
1.3	**Sasaran Penunjang** : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai AKIP PD	**80,45**	**80,45**	**100,00%**	Sangat Tinggi
		Nilai SKM OPD	**86,00**	**86,60**	**100,70%**	Istimewa
Rata-rata capaian kinerja					**102.54**	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

a. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 4 target;
b. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
c. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 target: dan
d. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

2. Analisis Capaian Kinerja

Tujuan : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif

Capaian indikator tujuan " **Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif**" di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase peningkatan realisasi investasi (%)	4,27	4,294	100,56%	Istimewa

Keterangan:
Sumber data dari DPMPTSP

a. Indikator Persentase peningkatan realisasi investasi

Nilai Realisasi penanaman modal tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.401.012.195.554 rupiah. Terjadi peningkatan sebesar 4,294% dari nilai realisasi sebelumnya sebesar Rp. 2.302.254.216.825 pada tahun 2024. Realisasi tersebut mencapai 104,35% dari capaian tahun 2025 yaitu 2,40 trilyun.

Adapun Perbandingan persentase realisasi peningkatan realisasi investasi tahun 2023 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
4,26	4,27	4,294

Keterangan:
Sumber data dari DPMPTSP

Peningkatan realisasi investasi pada tahun 2025 jika dibandingkan realisasi tahun 2024 pada indikator ini, salah satunya karena adanya peningkatan realisasi investasi PMA di Kabupaten Sragen. Tercatat realisasi investasi PMA tahun 2024 sebesar Rp. 320 milyar, sedangkan tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 441 milyar. Selain itu peningkatan ini juga kontribusi dari sektor UMK dan Menengah, sedangkan pada sektor usaha besar sedikit turun dari 1,27 trilyun pada tahun 2024 menjadi 1,19 trilyun pada tahun 2025. Persentase PMA tahun 2025 meningkat sebesar 37,8 % dari realisasi PMA tahun 2024. Sedangkan persentase PMA terhadap realisasi investasi sebesar 18,36 %, sedangkan PMDN sebesar 81,64 %.

Tabel . 3.4
Realisasi PMA/PMDN Tahun 2025

NO	BULAN	PMA				PMDN			
		JML PROYEK	JUMLAH INVESTOR (NIB)	INVESTASI	TENAGA KERJA	JML PROYEK	JUMLAH INVESTOR (NIB)	INVESTASI	TENAGA KERJA
1	JANUARI	1	1	33.598.500.000	205	667	512	81.790.813.098	1.891
2	FEBRUARI	7	2	175.380.000.000	5.141	1.369	1.086	116.842.889.022	2.600
3	MARET	1	1	70.000.000.000	200	700	596	226.272.133.699	1.860
	REALISASI TW I	9	4	278.978.500.000	5.546	2.736	2.194	424.905.835.819	6.351
4	APRIL	1	1	3.545.000.000	27	506	410	93.868.750.009	1.584
5	MEI	3	3	27.100.000.000	142	855	691	152.979.361.074	2.102
6	JUNI	4	1	59.720.000.000	217	765	559	132.025.100.005	2.449
	REALISASI TW II	8	5	90.365.000.000	386	2.126	1.660	378.873.211.088	6.135
7	JULI	2	2	11.879.425.427	27	1.165	925	644.058.301.695	3.094

8	AGUSTUS	-	-	-	-	1.024	882	110.359.225.570	2.739
9	SEPTEMBER	2	1	44.905.000.000	330	1.599	1.370	94.605.690.160	3.299
	REALISASI TW III	4	3	56.784.425.427	357	3.788	3.177	849.023.217.425	9.132
10	OKTOBER	-	-	-	-	1.283	1.164	115.856.414.341	3.268
11	NOVEMBER	1	1	15.100.000.000	4	356	769	22.646.007.230	760
12	DESEMBER	-	-	-	-	1.205	1.162	168.479.584.224	2.521
	REALISASI TW IV	1	1	15.100.000.000	4	2.844	3.095	306.982.005.795	6.549
	REALISASI TW I - IV	22	13	441.227.925.427	6.293	11.494	10.126	1.959.784.270.127	28.167
	TOTAL PMA & PMDN					11.516	10.139	2.401.012.195.554	34.460

Tabel. 3.5
Persentase Peningkatan investasi Per sektor
Tahun 2025

No	Sektor	Realisasi Investasi 2024	Realisasi Investasi 2025	%
1	2	3	4	5
1	Industri kulit, Barang dari Kulit dan Alas Sepatu	20.655.005.000	255.495.000.000	1136,96%
2	Industri Mesin, Elektronik, Peralatan Listrik, Instrumen Kedokteran dan Optik	3.458.300.000	36.807.510.000	964,32%
3	Industri Kayu	1.568.000.000	5.753.119.047	266,91%
4	Perdagangan & Reparasi	359.728.873.788	852.457.870.521	136,97%
5	Peternakan	14.434.000.000	30.148.704.555	108,87%
6	Jasa Lainnya	247.944.067.239	489.010.801.128	97,23%
7	Hotel dan Restoran	63.124.050.011	105.007.956.427	66,35%
8	Tanaman Pangan, Perkebunan	36.468.020.000	50.329.705.999	38,01%
9	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	1.150.000.000	1.385.000.000	20,43%
10	Industri Lainya	41.490.500.000	43.372.933.333	4,54%
11	Kehutanan	411.000.000	421.000.000	2,43%
12	Konstruksi	65.696.265.572	64.918.934.009	-1,18%
13	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	3.836.000.000	3.522.000.000	-8,19%
14	Industri Tekstil	135.116.949.900	112.241.633.333	-16,93%
15	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	205.128.550.001	123.669.500.000	-39,71%
16	Pertambangan	13.737.100.000	7.953.988.476	-42,10%
17	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	116.154.443.155	59.980.868.129	-48,36%
18	Industri Makanan	164.447.455.003	69.001.250.010	-58,04%
19	Industri Mineral Non Logam	33.713.100.000	12.849.611.111	-61,89%
20	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	91.951.000.000	28.959.100.000	-68,51%
21	Perikanan	13.810.500.000	4.320.544.505	-68,72%
22	Industri Dasar Logam, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatanya	6.643.000.000	2.001.500.000	-69,87%
23	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	9.241.000.000	947.200.000	-89,75%
24	Listrik, Gas dan Air	652.347.037.156	40.456.464.971	-93,80%
	JUMLAH TOTAL	2.302.254.216.825	2.401.012.195.554	4,294%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa peningkatan sektor investasi di Kabupaten Sragen, tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2024 dengan urutan lima besar yaitu 1). Perdagangan&reparasi, 2). Jasa Lainnya , 3). Industri kulit, Barang dari Kulit dan Alas Sepatu, 4). Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, 5). Industri Tekstil. Dengan komposisi tersebut diartikan bahwa peningkatan sektor investasi sektor tertier lebih mendominasi selain juga terdapat peningkatan pada sektor sekunder. Hal ini dapat diartikan bahwa sektor tertier pada tahun 2025 lebih menarik bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Disisi lain pada sektor primer relatif juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan walapun pada sektor lain mengalami penurunan (perikanan). Hal ini kiranya diperlukan sebuah kebijakan penanaman modal pada sektor primer, agar lebih menarik bagi pelaku usaha.

Realisasi investasi tahun 2025 tersebar pada banyak sektor, dengan sektor perdagangan/ jasa lebih mendominasi disusul sektor industri, perumahan, hotel/ restoran. Adapun persebaran sektor investasi sebagai berikut;

Tabel. 3.6
Realisasi sektor investasi tahun 2025

No	Sektor	Realisasi Investasi 2025
1	Perdagangan & Reparasi	852.457.870.521
2	Jasa Lainnya	489.010.801.128
3	Industri kulit, Barang dari Kulit dan Alas Sepatu	255.495.000.000
4	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	123.669.500.000
5	Industri Tekstil	112.241.633.333
6	Hotel dan Restoran	105.007.956.427
7	Industri Makanan	69.001.250.010
8	Konstruksi	64.918.934.009
9	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	59.980.868.129
10	Tanaman Pangan, Perkebunan	50.329.705.999
11	Industri Lainya	43.372.933.333
12	Listrik, Gas dan Air	40.456.464.971
13	Industri Mesin, Elektronik, Peralatan Listrik, Instrumen Kedokteran dan Optik	36.807.510.000
14	Peternakan	30.148.704.555
15	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	28.959.100.000
16	Industri Mineral Non Logam	12.849.611.111
17	Pertambangan	7.953.988.476
18	Industri Kayu	5.753.119.047
19	Perikanan	4.320.544.505
20	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	3.522.000.000
21	Industri Dasar Logam, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatanya	2.001.500.000

22	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	1.385.000.000
23	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	947.200.000
24	Kehutanan	421.000.000
	JUMLAH TOTAL	2.401.012.195.554

Perbandingan persentase peningkatan realisasi investasi tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

Indikator Tujuan/ Sasaran	Tahun 2025			
	Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan
persentase peningkatan realisasi investasi	4,31	4,294	99,54 %	Akan Tercapai

Keterangan:
Sumber DPMPTSP Kabupaten Sragen

Tahun 2025 merupakan tahun ke-1 (satu) dari periode Renstra 2025-2029 dimana indikator persentase peningkatan realisasi investasi akan tercapai pada target akhir Renstra.

Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) kondisi perekonominan dan iklim investasi yang positif di wilayah Kabupaten Sragen diyakini investasi tetap meningkat dimasa yang akan datang.
2) penyelenggaraan penanaman modal yang didorong guna mendukung peningkatan realisasi investasi terutama dalam pemberian kemudahan dan failitas/insentif penanaman modal.
3) DPMPTSP memiliki komitmen dalam memberikan layanan publik baik pada layanan perizinan dan nonperizinan maupun layanan investasi bagi calon investor.

Adapun perbandingan antara realisasi indikator persentase peningkatan realisasi investasi tahun 2025 dengan realisasi indikator yang sama di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta realisasi investasi di Jawa Tengah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Sragen	Karanganyar	Boyolali	Jawa Tengah	Nasional
persentase peningkatan realisasi investasi	4,29	NA	3,13	28,50	12,7

Keterangan:
Sumber dari berbagai sumber

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi indikator persentase peningkatan realisasi investasi tidak tertinggal, walaupun realisasi investasi masih lebih rendah dari Kabupaten

lain. Apabila dibandingkan dengan persentase peningkatan realisasi investasi provinsi Jawa Tengah, masih berada jauh di bawah dan juga masih dibawah realisasi nasional. Beberapa hal yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain;

1) Secara geografis posisi Kabupaten Sragen dibanding dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, yang lebih dekat dengan Kota Surakarta, dimana akses menuju sarana transportasi nasional maupun internasional lebih dekat dan mudah. Selain itu sarana transportasi dan akomodasi juga cukup berpengaruh pada mobilitas antar wilayah.
2) Kebijakan Penanaman modal yang ada di Kabupaten Sragen dalam hal ini Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal perlu segera untuk diimplementasikan pada sektor-sektor strategis investasi, misalnya sektor industri
3) Tidak sedikit calon investor terkendala dalam melakukan pembebasan lahan walaupun secara tata ruang telah memenuhi ketentuan.
4) Lokasi yang diinginkan oleh calon investor terkendala oleh ketentuan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) sehingga harus mengalihkan ke lokasi lain yang belum tentu diinginkan oleh calon investor.
5) Adanya *resistensi* dari sebagian warga atas rencana pendirian kegiatan usaha, sehingga perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat.
6) Potensi investasi yang kurang menarik bagi calon investor.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian persentase peningkatan realisasi investasi, pada Tahun 2025 adalah:

1) Melakukan sosialisasi perda penyelenggaraan penanaman modal yang lebih fokus dan memprioritaskan penyebarluasan informasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat umum, termasuk sosialisasi ketentuan di bidang perizinan investasi.
2) Mengembangkan inovasi layanan investasi SiPelangi (Sistem Informasi Peluang Investasi)
3) Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan melalui pendampingan dan/atau fasilitasi perizinan
4) Peningkatan kualitas penyebaran informasi perizinan dan layanan investasi.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja persentase peningkatan realisasi investasi pada tahun 2026, antara lain:

1) Penyusunan kebijakan teknis penyelanggaraan penanaman modal yang memprioritaskan pada kemudahan dan fasilitas/insentif penanaman modal;
2) Penyusunan kajian potensi investasi yang diharapkan dapat dipergunakan pedoman bagi calon investor;
3) Meningkatkan kualitas promosi dengan melakukan penyebaran informasi yang lebih *massif* agar dapat menarik calon investor untuk menanamkan modal.
4) Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan salah satunya dengan menciptakan Sragen yang ramah investasi.
5) Meningkatkan capaian realisasi investasi melalui LKPM bagi semua pelaku usaha baik UMKM maupun non UMKM.

Sasaran.1 " **Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan**"

Capaian indikator-indikator sasaran "**Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan**" tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Predikat IKM bidang Perizinan dan Nonperizinan	Sangat Baik (89,56)	Sangat Baik (90,00)	100,49%	Sangat Tinggi

b. Indikator Predikat IKM bidang Perizinan dan Nonperizinan

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan. Dalam penyelenggaraan layanan perizinan/ nonperizinan, maka DPMPTSP melaksanakan Suvei Kepuasan Masyarakat guna menentukan Predikat IKM. Kategori predikat IKM menurut PermenPAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut;

1) 25,00-64,99 : D (Tidak Baik)
2) 65,00-76,60 : C (Kurang Baik)
3) 76,61-88,30 : B (Baik)
4) 88,31-100,00 : A (Sangat Baik)

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan kepada penerima pelayanan perizinan dan nonperizinan, baik yang dilayani dengan aplikasi perizinan Online Single Submission (OSS), Sistem Informasi Perizinan Online Sragen (SI-PIONER), Sistem Informasi

Manajemen Bangunan Gedung (SIM-BG), MPP Digital dan aplikasi lain.

Urutan nilai per unsur, dari penilaian tertinggi dengan penilaian terendah sebagai berikut;

Tabel. 3.7
Nilai Per Unsur SKM

Rangking	Kategori	Nilai per unsur	Jumlah Nilai Per unsur : Jml kuesioner yang terisi	NRR Per unsur x 0,11
1 (Satu)	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	953	3,94	0,43
2 (Dua)	Biaya / Tarif	947	3,91	0,43
3 (Tiga)	Perilaku Pelaksana (Kemudahan Fitur/ Fungsi Aplikasi)	873	3,61	0,40
4 (Empat)	Kompetensi Pelaksana (Kecepatan Respon Aplikasi)	869	3,59	0,39
5 (Lima)	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	865	3,57	0,39
6 (Enam)	Sarana dan Prasarana (Kualitas Isi/Konten Aplikasi)	862	3,56	0,39
7 (Tujuh)	Waktu Penyelesaian	859	3,55	0,39
8 (Delapan)	Persyaratan	856	3,54	0,39
9 (Sembilan)	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	854	3,53	0,39

Realisasi Predikat IKM bidang Perizinan dan Nonperizinan tahun 2025 diperoleh angka 90,00 dengan predikat SANGAT BAIK. Terjadi peningkatan sebesar 0,44 poin dari nilai realisasi sebelumnya sebesar 89,56 pada tahun 2024. Realisasi tersebut mencapai 100,49% dari capaian tahun 2024.

Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Sangat Baik (89,19)	Sangat Baik (89,56)	Sangat Baik (90,00)

Keterangan:
Sumber DPMPTSP

Perbandingan realisasi Predikat IKM bidang Perizinan dan Nonperizinan tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Tahun 2025			
	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan
Predikat IKM bidang Perizinan dan Nonperizinan	Sangat Baik	Sangat Baik (90,00)	-	Tercapai

Keterangan:
Sumber DPMPTSP

Tahun 2025 merupakan tahun ke-1 (satu) dari periode Renstra 2025-2029 dimana indikator **Predikat IKM bidang Perizinan dan Nonperizinan** belum dapat dilakukan pengukuran, karena predikat IKM tidak menyebutkan angka satuan yang digunakan dalam melakukan pengukuran kinerja yang akan datang.

Adapun perbandingan antara realisasi indikator **Predikat IKM bidang Perizinan dan Nonperizinan** tahun 2025 dengan realisasi indikator yang sama di wilayah lain sebagai berikut:

Realisasi di Kabupaten Sragen	Realisasi di Kota Surakarta	Realisasi di DPMPTSP Prov Jawa Tengah
Sangat Baik (90,00)	Sangat Baik (98,32)	**Sangat Baik (98,56)**

Keterangan:
Dari berbagai sumber

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi indikator **Predikat IKM bidang Perizinan dan Nonperizinan** tidak tertinggal dari realisasi kabupaten lainnya, namun tertinggal dari realisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dipengaruhi oleh beberap hal antara lain;

1). Bahwa terdapat unsur penilaian yang memiliki nilai terendah pertama yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk Pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Beberapa hal yang menyebabkan unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan mendapat nilai rendah di survei kepuasan masyarakat antara kain dikarenakan adanya perubahan atau penyesuaian dalam sistem seperti OSS RBA yang sempat terjadi sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2). Unsur penilaian lainnya yang memilik nilai terendah adalah Persyaratan. Yang dimaksud dengan persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Jenis Pelayanan di DPMPTSP sebagian besar adalah perizinan berusaha yang terbagi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dan terbagi dalam 4 (empat) risiko usaha, yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi melalui Sistem OSS RBA. Namun, banyak masyarakat yang kurang memahami syarat apa saja yang perlu mereka lengkapi, karena setiap KBLI memiliki risiko yang berbeda dan persyaratan yang berbeda.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Predikat IKM bidang Perizinan dan Nonperizinan pada Tahun 2025 adalah:

1) melakukan perbaikan Unsur penilaian yang memiliki nilai terendah tahun sebelumnya antara lain unsur Kompetensi Pelaksana, unsur perilaku petugas dan Persyaratan.
2) peningkatan kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia melalui berbagai bimbingan teknis dan pelatihan.
3) melaksanakan evaluasi untuk pegawai dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai harapan masyarakat.
4). sosialisasi kepada masyarakat/ pengguna layanan terkait persyaratan untuk berbagai pelayanan.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian Predikat IKM bidang Perizinan dan Nonperizinan pada tahun 2026, diantaranya:

1) melakukan perbaikan Unsur penilaian yang memiliki nilai terendah tahun 2025 antara lain unsur Produk dan Spesifikasi Jenis Pelayanan, unsur Persyaratan dan Waktu Penyelesaian.
2) Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait produk dan spesifikasi jenis pelayanan sekaligus peraturan perundangan yang mengaturnya (bisa melalui website dan berbagai media sosial, bisa dilakukan saat Pelayanan Bergerak Di Desa/ Kelurahan, Pelayanan Berbantuan di DPMPTSP serta bimbingan teknis;
3) Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait persyaratan untuk berbagai pelayanan (bisa dilakukan saat Pelayanan Bergerak di Desa/Kelurahan, Pelayanan Berbantuan di DPMPTSP, dan melalui website dan media sosial DPMPTSP)

4) Memaksimalkan Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi untuk efektivitas waktu pelayanan.

Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian indikator jumlah PMA/PMDN adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

   1.1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

   Program/ Kegiatan ini sangat berperan dalam peningkatan persepsi layanan perizinan dan nonperizinan. Pelayanan yang baik serta kemudahan dalam perizinan berusaha, maka diharapkan muncul persepsi positif dalam pemberian layanan perizinan dan nonperizinan. Pada program ini menitik beratkan pada pelayanan pelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha. Kegiatan pada program ini dilakukan melalui pelayanan perizinan secara elektronik terintegrasi melalui OSS RBA. Selain itu adanya kegiatan pelatihan dan fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha utamanya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pelatihan dan fasilitasi perizinan ini diharapkan mampu menumbuhkan sektor kegiatan usaha mikro dan kecil yang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan. Pelayanan yang baik serta kemudahan dalam perizinan berusaha, maka berbanding lurus dengan peningkatan realisasi investasi.

2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

   2.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Program/Kegiatan ini menjadi instrumen pendukung lainnya dalam pengelolaan dan penyediaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal. Hal ini guna mendukung penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah maupun sebagai bahan pertimbangan bagi calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sragen

Sasaran.2 : **Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal**

Capaian indikator sasaran ini di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase peningkatan kegiatan usaha	4.27	4.74	111.01%	Istimewa

Keterangan:
Sumber data dari pengolahan data DPMPTSP

c. Indikator Persentase peningkatan kegiatan usaha

Nilai Realisasi penanaman modal tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 11.516 kegiatan usaha atau peningkatan sebesar 4,74% apabila dibandingkan jumlah kegiatan usaha sebesar 10.995 pada tahun 2024. Realisasi kegiatan usaha meliputi 11.150 usaha mikro, 207 usaha kecil , 28 usaha menengah dan 31 usaha besar.

Adapun Perbandingan realisasi peningkatan realisasi 2023 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Persentase peningkatan kegiatan usaha	NA	NA	4,74

Keterangan:
Sumber data dari pengolahan data DPMPTSP

Realisasi persentase peningkatan kegiatan usaha pada tahun 2025 meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2024 pada indikator ini, salah satunya karena adanya peningkatan kegiatan usaha pada sektor UMKM dalam negeri (PMDN) selain meningkatnya kegiatan usaha PMA di Kabupaten Sragen. Tercatat 11 kegiatan usaha PMA tahun 2024 dengan nilai investasi sebesar Rp. 320 milyar, sedangkan tahun 2025 tercatat 22 kegiatan usaha dengan nilai sebesar Rp. 441 milyar. Sedangkan PMDN tercatat sebesar 11.494 mulai dari sektor UMKM dan besar.

Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Tahun 2025			
	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
persentase peningkatan kegiatan usaha	4,31	4,74	109,97%	Tercapai

Keterangan:
Sumber data dari pengolahan data DPMPTSP

Tahun 2025 merupakan tahun ke-1 (satu) dari periode Renstra 2025-2029 dimana indikator nilai realisasi persentase peningkatan kegiatan usaha telah melebihi target di akhir periode Renstra. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain;

1. Tumbuhnya kegiatan usaha dari sektor usaha mikro, kecil mikro dan menengah.
2. Meningkatnya bimbingan teknis pelaku usaha dan pendampingan pelaku usaha.

Adapun perbandingan antara realisasi indikator niai realisasi penanaman modal tahun 2025 dengan realisasi indikator yang sama di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta realisasi investasi di Jawa Tengah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Kabupaten Sragen	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Boyolali	Realisasi Provinsi Jawa Tengah
persentase peningkatan kegiatan usaha	4,74	NA	NA	33,52

Keterangan:
Dari berbagai sumber

Dari tabel diatas diketahui bahwa indikator persentase peningkatan kegiatan usaha lebih kecil dari realisasi Provinsi Jawa Tengah. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain;

1. Kegiatan usaha di Kabupaten Sragen lebih didominasi oleh usaha mikro kecil dan menengah.
2. Kebijakan Penanaman modal yang ada di Kabupaten Sragen dalam hal ini Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal perlu segera untuk diimplementasikan pada sektor-sektor strategis investasi, sehingga mampu menumbuhkan kegiatan usaha dari berbagai sektor.
3. Perlunya peningkatan bimbingan dan pendampingan pelaku usaha.
4. Perlunya kerjasama lintas sektor dalam upaya menumbuhkan usaha baik usaha mikro, kecil dan menengah.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian realisasi peningkatan kegiatan usaah, pada Tahun 2025 adalah:

1) Melakukan sosialisasi kebijakan penanaman modal yang lebih menitikbertkan pada pemberian kemudahan/ insentif penanaman modal
2) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan

perizinan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten; dan

3) Melakukan pengembangan inovasi layanan investasi dalam rangka memberikan kemudahan bagi calon investor.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan kegiatan usaha pada tahun 2026, diantaranya:

1) Menyusun kebijakan teknis penanaman modal dalam pemberian kemudahan/ insentif penanaman modal sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
2) Meningkatkan pendampingan pelaporan LKPM melalui klinik LKPM mapun bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan ;
3) Sosialisasi kemudahan layanan investasi dan kemudahan perizinan dan nonperizinan.
4) Penyebaran informasi potensi investasi yang ada di Kabupaten Sragen baik melalui aplikasi maupun penyebaran melalui media lain, baik media elektronik maupun media cetak.
5) Penyusunan kajian optensi investasi strategis yang diharapkan mampu menarik calon investor untuk menanamkaan modal.

Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian indikator persentase peningkatan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Penanaman Modal

   1.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan

   Pelaksanaan Program / Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, nyaman untuk berinvestasi dan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Peningkatan realisasi investasi didukung oleh iklim yang kondusif bagi penanaman modal. Iklim yang kondusif dapat terjaga dengan adanya perangkat regulasi bidang penanaman modal antara lain, Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan memberikan kemudahan dalam sistem pelayanan perizinan berusaha, serta mampu meningkatnya realisasi investasi dan jumlah PMA/PMDN.

2. Program Promosi Penanaman Modal

2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah

Pelaksanaan Program/Kegiatan ini yang memuat salah satu program dalam upaya peningkatan UMKM dalam memasarkan produknya. Selain itu promosi juga memacu peningkatan jumlah PMDN terutama pada sektor UMKM, selain tentunya juga mampu menarik calon investor skala besar baik PMND mauapun PMA. Dengan demikian hal ini mampu diharapkan memacu pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Sragen.

Salah satu kegiatan promosi penanaman yang dilakukan melalui CJIBF telah memacu peningkatan jumlah kepeminatan realisasi investasi pada skala menengah besar. Hal ini diharapkan realisasi kepeminatan penanaman modal mampu lebih meningkat

3. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

3.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah

Program/ Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan investasi yang ada di Kabupaten Sragen tetap berjalan, serta memastikan kegiatan investasi tetap mematuhi atas ketentuan terhadap aturan bidang investasi. Kegiatan ini meliputi Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, pendampingan penyusunan LKPM, penyelesaian masalah atas hambatan yang terjadi pada pelaku usaha, serta pelaksanaan pengawasan penanaman modal. Hal ini sangat berpengaruh dan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pencatatan realisasi investasi, baik dari sisi potensi investasi dan investasi riil

Sasaran Penunjang : **Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan**

Capaian indikator sasaran "**Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan"** tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Nilai AKIP PD	**80,45**	**80,45**	**100,00%**	Sangat Tinggi
2.	Nilai SKM OPD	**86,00**	**86,60**	**100,70%**	Istimewa

d. **Indikator Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan.**

Hasil pengukuran indikator **Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan** tahun 2025 pada Nilai AKIP dengan capaian 100% sebagaimana target yang ditetapkan, sedangkan Nilai SKM OPD diperoleh nilai sebesar 86,60 dari target yang ditetapkan sebesar 86,00. Jadi capaian kinerja pada indikator Nilai SKM OPD sebesar 100,70%.

Nilai Realisasi Kinerja SAKIP perangkat daerah tahun 2025 sebesar 80,45. Realisasi tersebut sudah mencapai 100,00% dari yang ditargetkan di tahun 2025 yaitu 80,45 sebagaimana tercantum dalam Renstra tahun 2025-2029.

Perbandingan realisasi **Indikator Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan** perangkat daerah tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Nilai AKIP PD	70,90	76,15	80,45
Nilai SKM OPD	N/A	N/A	86,60

Perbandingan realisasi **Indikator Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan** perangkat daerah tahun 2025 dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Tahun 2025			
	Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan
Nilai AKIP PD	80,49	80,45	99,95%	Akan Tercapai
Nilai SKM OPD	88,50	86,60	97,85	Akan Tercapai

Keterangan:

Sumber data dari DPMPTSP

Tahun 2025 merupakan tahun ke-1 (empat) dari periode Renstra Tahun 2025-2029 dimana indikator kinerja ini akan tercapai sampai dengan target akhir Renstra. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) Implementasi SAKIP telah mengalami perbaikan dari waktu ke waktu yang didukung oleh peran serta pimpinan dan seluruh pegawai;
2) Implementasi SAKIP bukan hanya pada tataran teori namun juga menjadi tuntutan bagi unit kerja dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.
3) Pimpinan telah menetapkan mekanisme kerja dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas capaian kinerja setiap tri wulan.
4) Perbaikan komponen pada perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
5) Peningkatan kualitas layanan publik yang meliputi peningkatan kapasitas aparatur, integritas serta perbaikan sarana/fasilitas layanan publik.

Adapun perbandingan antara realisasi **tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan** tahun 2025 dengan realisasi indikator yang sama adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Realisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen	Realisasi Kabupaten Sragen	Realisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
Nilai AKIP PD	80,45	68,03	NA
Nilai SKM OPD	86,60	87,00	98,56

Keterangan:
Dari berbagai sumber

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi indikator kinerja tata kelola perangkat daerah tidak tertinggal dari realisasi Pemerintah Kabupaten Sragen, disebabkan antara lain;

1) DPMPTSP telah berupaya melakukan perbaikan atas implementasi SAKIP dari tahun ke tahun
2) DPMPTSP telah berupaya melakukan perbaikan pada komponen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
3) DPMPTSP telah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas pegawai dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tata kelola perangkat daerah pada Tahun 2025 adalah:

1) Melakukan sosialisasi implementasi SAKIP di lingkungan internal DPMPTSP.
2) Melaksanakan koordinasi dalam implementasi SAKIP
3) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin setiap tri wulan, dalam rangka mengetahui sejauh mana pencapaian target, dan perbaikan apa yang dapat dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target-target yang diharapkan.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian Kinerja indikator kinerja tata kelola perangkat daerah pada tahun 2026, diantaranya:

1) Melakukan peningkatan implementasi SAKIP dalam rangka peningkatan penerapan dan perbaikan kinerja SAKIP sesuai arah dan tujuan penerapan SAKIP;
2) Meminta seluruh sub unit kerja agar melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik serta menyampaikan hasilnya kepada pimpinan unit kerja;
3) Melakukan perbaikan-perbaikan hasil rekomendasi/ saran APIP atas evaluasi implementasi SAKIP
4) Melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas aparatur serta perbaikan sarana dan prasarana layanan publik.

Adapun program kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja tata kelola perangkat daerah yang akuntabel adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    e. Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    g. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.099.227.936,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 5.528.177.237 atau sebesar 90,64%. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pengembangan	100.000.000	94.792.400	94,79
Program Promosi Penanaman Modal	113.919.000	112.783.951	99,00
Program Pelayanan Penanaman Modal	346.347.000	335.865.855	96,97
Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	23.853.000	23.446.750	98,30
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	105.000.000	95.861.000	91,30
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.410.108.936	4.865.427.281	89,93
Rata-rata Capaian Anggaran			90,64

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang realisasi kinerjanya sebesar **90,64%** masuk kriteria **Tinggi**.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/ sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dengan dampak adanya sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang berbeda pada PK Penetapan dan PK Perubahan maka dalam pengukuran atas efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan rumus rata-rata capaian kinerja tahun 2025 yaitu penjumlahan kinerja lama (PK Penetapan Tahun 2025) dan kinerja yang baru (PK Perubahan Tahun 2025) yang bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 3.9
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Rata-rata capaian kinerja Tahun 2025 ((Rata2 Capaian Kinerja PK Penetapan + PK Perubahan): 2)	Rata-rata Capaian Anggaran Tahun 2025	Tingkat Efisiensi (Kolom (1) dibagi kolom (2))
(1)	(2)	(3)
100,71	90,64	1,11 % (Efisien)

Berdasarkan perhitungan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk EFISIEN.

E. INOVASI DAN PENGHARGAAN

Selama tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Sragen telah melakukan inovasi guna peningkatan kinerja organisasi sebagai berikut:

1. SIPELANGI

   SIPELANGI (Sistem Informasi Peluang Investasi) Kabupaten Sragen sebagai wujud kemudahan pelayanan di bidang investasi bagi calon investor baik PMA maupun PMDN dalam bentuk aplikasi berbasis website dan Android. SIPELANGI sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya calon investor untuk memperoleh data dan informasi awal tentang Kabupaten Sragen, peluang usaha yang ada, lokasi peruntukan wilayah sesuai Perda Tata Ruang, lokasi wilayah peruntukan industri, bangunan/lahan yang sedang di tawarkan, sarana prasarana pendukung, dan sebagainya. Bagi Kabupaten Sragen, keberadaan SIPELANGI mempermudah tugas pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat akan informasi peluang dan potensi usaha yang ada di Kabupaten Sragen serta data pendukung yang dibutuhkan.

Dengan meningkatnya kinerja organisasi dalam menjawab harapan masyarakat sesuai tugas fungsinya maka di tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen meraih penghargaan sebagai berikut:

1. Juara 1 Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Sragen Tahun 2025 Kategori OPD/RSUD/BUMD/Bagian Setda.

   Judul Inovasi : SIPELANGI Versi Pengembangan

   SIPELANGI adalah kemudahan pelayanan di bidang investasi bagi calon investor baik

PMA maupun PMDN dalam bentuk aplikasi berbasis website dan Android. Penghargaan diberikan oleh Bupati Sragen pada even Sragen Award yang digelar secara rutin setiap tahun.

2. Terbaik I Tahun 2025 Pelaporan Kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Tahun 2025

   Penghargaan diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Penghargaan diberikan kepada Pemrintah daerah dalam penyediaan data terkait perizinan dan layanan publik DPMPTSP, dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

3. Terbaik II SAKIP Tingkat Kabupaten Sragen Tahun 2025 dari Inspektorat Kabupaten Sragen.

   Penghargaan diberikan pada kegiatan LARWASDA (Gelar Pengawasan Daerah) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

   SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan serangkaian prosedur pengelolaan anggaran hingga realisasinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas/ pertanggungjawaban atas dana yang telah dianggarkan pada perangkat daerah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Hal tersebut adalah merupakan data yang diolah untuk dijadikan suatu informasi guna pengambilan keputusan dan juga sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan juga sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tahun berikutnya.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen yang telah diraih selama tahun 2025 serta permasalahan yang sudah dihadapi, diharapkan dapat menjadi suatu acuan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk tahun yang akan datang.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada Bab III, dapat disampaikan bahwa DPMPTSP Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang ditetapkan dicapai dengan kategori Sangat Baik/ Istimewa.

1. Capaian Kinerja berdasarkan Renstra 2021-2026
    a. Capaian kinerja Tujuan 1: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tercapai 104,35% atau dengan kategori Istimewa;
    b. Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tercapai sebesar 92,19% atau dengan kategori Sangat Baik;
    c. Capaian kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, tercapai sebesar 105,63 % atau dengan kategori Istimewa
2. Capaian Kinerja berdasarkan Renstra 2025-2029
    a. Capaian kinerja Tujuan 1: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif, tercapai 100,56% atau dengan kategori Istimewa;

b. Capaian kinerja Sasaran 1 : Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan tercapai sebesar 100,49% atau dengan kategori Istimewa;
c. Capaian kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal tercapai sebesar 110,97% atau dengan kategori Istimewa;
d. Capaian kinerja Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, tercapai sebesar 100,35 % atau dengan kategori Istimewa

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen pada tahun 2025 optimal, yang disebabkan target indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis telah melebihi target.

Sedangkan dari sisi belanja, dengan anggaran belanja sebesar sebesar Rp. 6.099.227.936 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 5.528.177.237 (90,64%) atau terdapat Sisa Lebih Pagu Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 571.050.699 (9,36%), dimana sebagian besar dari Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 414.642.931. Adapun SiLPA dari belanja gaji dan tunjangan ASN, karena adanya mutasi PNS dan pensiun. Selain itu adanya peningkatan pengendalian dalam proses pengadaan barang/ jasa serta upaya untuk melakukan efisiensi sumber daya berupa;

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan layananperizinan dan investasi.
2. Pelibatan asosiasi profesi, dunia usaha, dalam proses konsultasi publik , sehingga memastikan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah sebagai upaya pemberian fasilitas dan kemudahan.
4. Klinik penyusunan LKPM secara berkala guna memastikan pelaku usaha dapat mengimplementasikan periode berikutnya.
5. Pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya air, listrik, telepon maupun internet dalam proses aktivitas kerja untuk memastikan tidak ada sumber daya yang terbuang.
6. Pemeliharaan sarana prasarana secara berkala untuk memperpanjang usia pakai peralatan.
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka koordinasi dengan pihak terkait alat tulis kantor serta menuju konsep *paperless*.

Sementara permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ kegiatan antara lain :

1. Perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
2. Perlunya peningkatan kajian potensi investasi strategis yang dapat ditawarkan kepada calon

investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri.

3. Perlunya peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan bidang penanaman modal, termasuk dalam penyusunan LKPM.

B. SARAN

Berdasarkan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2025, terdapat beberapa rencana strategis yang dirancang untuk mencapai target kinerja pada tahun 2026 sebagai berikut;

1. Penguatan iklim investasi yang kondusif dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman, melalui penyusunan kebijakan teknis yang mendukung implementasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta menciptakan Sragen yang ramah investasi.
2. Peningkatan daya tarik investasi merata di berbagai sektor ekonomi melalui penyusunan kajian investasi.
3. Peningkatan kualitas promosi melalui forum investasi dan penyebarluasan informasi peluang potensi sektor investasi yang layak ditawarkan kepada calon investor.
4. Peningkatan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan dengan yang mendukung peningkatan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum.
5. Peningkatan pendampingan penyusunan LKPM agar lebih optimal dalam pencapaian realisasi investasi.
6. Peningkatan pengelolaan data dan informasi dalam mewujudkan data dan informasi yang berkualitas.
7. Mendorong implementasi *reward and punishment* dalam proses pembinaan pegawai, pegawai didorong untuk mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Sragen, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan



TUGIYONO, SH
NIP. 19670708 199303 1 010

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA
2. RENCANA AKSI
3. PENGUKURAN KINERJA TRI WULAN
4. SK TIM SAKIP
5. MEKANISME PENGUMPULAN DATA
6. PENGHARGAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Laman : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Pos-el : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUGIYONO, S.H.

Jabatan : PLT.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : SIGIT PAMUNGKAS, S.IP, M.A

Jabatan : BUPATI SRAGEN

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 05 Januari 2026

PIHAK II	PIHAK I
SIGIT PAMUNGKAS, S.IP, M.A	**TUGIYONO, S.H.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	4,28 persen
	[-] Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperzinaan	A (Sangat Baik/90,00) Predikat
	[-] Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	4,28 Persen
	[-] Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,45 Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,50 Nilai

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.157.721.598	DAU
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	56.610.500	DAU
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	66.254.000	DAU
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	176.142.000	DAU
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	52.363.000	DAU
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	12.873.000	DAU

Sragen, 05 Januari 2026

PIHAK II	PIHAK I
SIGIT PAMUNGKAS, S.IP, M.A	**TUGIYONO, S.H.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Laman : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Pos-el : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama	:	TUGIYONO, S.H.
Jabatan	:	PLT.Kepala DInas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 05 Januari 2026

PIHAK II	PIHAK I
TUGIYONO, S.H.	**ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelayanan keuangan, umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 persen
		Nilai/Kategori Penilaian Kinerja Organisasi	98,51 nilai

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.806.000	DAU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.941.152.518	DAU
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.560.000	DAU
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.414.189	DAU
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.788.891	DAU

Sragen, 05 Januari 2026

PIHAK II

TUGIYONO, S.H.

PIHAK I

ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Laman : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Pos-el : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRAMUDANI GALUR OKTA, S.H.,M.M.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 05 Januari 2026

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**PRAMUDANI GALUR OKTA, S.H.,M.M.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	Persentase dokumen Perencanaan evaluasi dan pelaporan yang selaras (%)	100 %
2	Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan keuangan PD	Persentase Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan pada tahun n (%)	100 %
3	Meningkatnya kualitas data administrasi umum	Persentase laporan administrasi umum PD disusun sesuai aturan pada tahun n (%)	100 %
4	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai aturan yang berlaku	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 %
5	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai atuaran yang berlaku Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 %

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.414.000	DAU
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.392.000	DAU
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.941.152.518	DAU
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.107.000	DAU
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.958.000	DAU
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.675.000	DAU
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.720.000	DAU
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	DAU

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.500.000	DAU
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000	DAU
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	458.675.589	DAU
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.479.600	DAU
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.259.000	DAU
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.844.891	DAU
15	Pemeliharaan Mebel	1.966.000	DAU
16	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.608.000	DAU
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.870.000	DAU
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.500.000	DAU

Sragen, 05 Januari 2026

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**PRAMUDANI GALUR OKTA, S.H.,M.M.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Laman : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Pos-el : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : dr.KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Jabatan : BUPATI SRAGEN

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 06 Januari 2025

PIHAK II	PIHAK I
dr.KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	**DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	2,3 trilyun
	[-] Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	jumlah PMA/ PMDN	10998 Investor
	[-] Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	76,16(BB) predikat

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.000.000	DAU
2	Program Promosi Penanaman Modal	137.534.000	DAU
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	482.359.500	DAU
4	Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	32.000.000	DAU
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	55.000.000	DAU
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.949.254.177	DAU

Sragen, 06 Januari 2025

PIHAK II

PIHAK I

dr.KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Laman : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Pos-el : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 02 Januari 2025

PIHAK II	PIHAK I
DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.	**ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.763.000	DAU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.895.270.179	DAU
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.528.000	DAU
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	520.899.600	DAU
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.947.000	DAU
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.008.121.398	DAU
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.725.000	DAU

Sragen, 02 Januari 2025

PIHAK II	PIHAK I
DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.	**ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Laman : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Pos-el : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 02 Januari 2025

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya administrasi kepegawaian yang akuntabel	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 laporan
2	Terpenuhinya Kebutuhan Adminstrasi umum Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan
3	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai kebutuhan	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah (laporan)	3 laporan
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk kelancaran operasional kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan
5	Terlaksananya pemeliharaan BMD agar tetap berfungsi baik	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	4 laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.528.000	DAU
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	DAU
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	39.936.000	DAU
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.608.600	DAU
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.415.000	DAU
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	89.290.000	DAU
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	DAU
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	DAU
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.650.000	DAU
10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	DAU
11	Pengadaan Mebel	26.742.000	DAU

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.205.000	DAU
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	DAU
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	507.925.022	DAU
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.161.000	DAU
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417.035.376	DAU
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.520.000	DAU
18	Pemeliharaan Mebel	13.582.000	DAU
19	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.260.000	DAU
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.765.000	DAU
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.598.000	DAU

Sragen, 02 Januari 2025

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Laman : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Pos-el : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 02 Januari 2025

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya administrasi kepegawaian yang akuntabel	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 laporan
2	Terpenuhinya Kebutuhan Adminstrasi umum Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan
3	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai kebutuhan	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah (laporan)	3 laporan
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk kelancaran operasional kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan
5	Terlaksananya pemeliharaan BMD agar tetap berfungsi baik	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	4 laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.528.000	DAU
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	DAU
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	39.936.000	DAU
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.608.600	DAU
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.415.000	DAU
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	89.290.000	DAU
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	DAU
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	DAU
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.650.000	DAU
10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	DAU
11	Pengadaan Mebel	26.742.000	DAU

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.205.000	DAU
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	DAU
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	507.925.022	DAU
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.161.000	DAU
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417.035.376	DAU
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.520.000	DAU
18	Pemeliharaan Mebel	13.582.000	DAU
19	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.260.000	DAU
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.765.000	DAU
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.598.000	DAU

Sragen, 02 Januari 2025

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Laman : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Pos-el : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : SIGIT PAMUNGKAS, S.IP., M.A

Jabatan : Bupati Sragen

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 18 September 2025

PIHAK II	PIHAK I
SIGIT PAMUNGKAS, S.IP., M.A	**DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	4,27 Persen
	[-] Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang perizinan dan nonperizinan	A (Sangat Baik) Predikat
	[-] Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	4,27 Persen
	[-] Meningkatnya Tata Kelola Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,45 Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,00 Nilai

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.410.108.936	DAU
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100.000.000	DAU
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	113.919.000	DAU
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	346.347.000	DAU
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	23.853.000	DAU
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	105.000.000	DAU

Sragen, 18 September 2025

PIHAK II

PIHAK I

SIGIT PAMUNGKAS, S.IP., M.A

DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Laman : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Pos-el : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 18 September 2025

PIHAK II	PIHAK I
DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.	**ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	tercapainya tingkat pelayanan keuangan, umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan keuangan, umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.943.000	DAU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.740.425.434	DAU
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.580.000	DAU
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.538.200	DAU
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.249.000	DAU
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	839.795.302	DAU
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.578.000	DAU

Sragen, 18 September 2025

PIHAK II

PIHAK I

DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Laman : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Pos-el : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRAMUDANI GALUR OKTA, S.H.,M.M.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 04 Nopember 2025

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**PRAMUDANI GALUR OKTA, S.H.,M.M.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Administrasi Kepegawaian yang akuntabel	Persentase laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
2	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 persen
4	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen Persentase
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.580.000	DAU
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.326.000	DAU
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.018.200	DAU
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.204.000	DAU
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.540.000	DAU
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	DAU
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.450.000	DAU
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	DAU
9	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	DAU
10	Pengadaan Mebel	74.945.000	DAU
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.304.000	DAU
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	DAU
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	443.662.922	DAU
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.854.000	DAU

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	342.878.380	DAU
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.130.000	DAU
17	Pemeliharaan Mebel	11.552.000	DAU
18	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.282.000	DAU
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.289.543	DAU
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.324.457	DAU

Sragen, 04 Nopember 2025

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**PRAMUDANI GALUR OKTA, S.H.,M.M.**

RENCANA AKSI
TAHUN 2026

DINAS DPMPTSP
KABUPATEN SRAGEN

DAFTAR ISI

			Hal
DAFTAR ISI			2
BAB I.	PENDAHULUAN		3
	1	Latar Belakang	3
	2	Maksud dan Tujuan	3
	3	Landasan Hukum	4
BAB II.	RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA		5
	1	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	5
	2	Rencana Aksi Tahun 2026	11
BAB III.	PENUTUP		19

BAB I PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Rencana Aksi adalah dokumen yang menyajikan keselarasan Perjanjian Kinerja dari Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah sampai Perjanjian Kinerja Struktural terendah yang memuat indikator, target serta waktu pelaksanaan kinerja.

Manfaat rencana aksi adalah:

a. Menyelaraskan antara tujuan (*goal*) dan cara (*means*);
b. Memvalidasi data capaian;
c. Sebagai dasar monitoring evaluasi berkala;
d. Mitigasi progress capaian kinerja;
e. Bahan evaluasi pimpinan;
f. Sebagai dasar perencanaan berikutnya

Penetapan rencana aksi dilakukan secara berjenjang berdasarkan penetapan kinerja (Perjanjian Kinerja). Rencana Aksi menjabarkan target-target kinerja berkala (minimal Triwulanan) atas indikator dalam Perjanjian Kinerja yang ditetapkan secara terukur. Target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Aksi (TW 4) harus sama dengan target akhir tahun dari indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga selaras.

2) MAKSUD DAN TUJUAN

a) Maksud dari Rencana Aksi Tahun 2025 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen.

b) Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana aksi ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen.

3) LANDASAN HUKUM

a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja.

BAB II
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

1) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja terhadap target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen berdasarkan tujuan/sasaran strategis jangka menengah yang telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029. Maka Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

a. TUJUAN STRATEGIS: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif
b. SASARAN STRATEGIS.1 : Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan
c. SASARAN STRATEGIS.2 : Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja lain sebagai perwujudan mandat dari Bupati Sragen kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen Tahun 2026 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	persen	4,28

	Sasaran 1 : Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperzinaan	Predikat	A (Sangat Baik)
	Sasaran 2: Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	Persen	4,28
	Sasaran Penunjang : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,45
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Nilai	86,50

Untuk dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada rencana kinerja tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen, maka terdapat 5 (Lima) Program yang mendukung sasaran strategis dan 1 (satu) Program yang mendukung sasaran penunjang yaitu :

Program yang mendukung sasaran strategis:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain :

1. **Kegiatan :** Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota indikator. Jumlah dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal (dokumen) target 1 Dokumen

   Sub Kegiatan :Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal indikator Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen) target 1 Dokumen
2. **Kegiatan:** Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota indikator Jumlah dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (dokumen) target 1 Dokumen

   Sub Kegiatan: Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

indikator Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (dokumen target 1 Dokumen

b. Program Promosi Penanaman Modal

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain:

1. **Kegiatan :** Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan DaerahKabupaten/Kota indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyelanggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (dokumen) target 2 Dokumen

   Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota indikator Jumlah dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota (dokumen) target 2 Dokumen

c. .Program Pelayanan Penanaman Modal

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain:

1. **Kegiatan :** Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota indikator Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (izin terbit) target 3150 Izin terbit

   Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah indikator Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota (dokumen) target 5 Dokumen

   Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha) target 1250 pelaku usaha

   Sub Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko indikator Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem

Perizinaan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha) target 92 pelaku usaha

Sub Kegiatan : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko indikator Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) target 500 Kegiatan Usaha

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain:

1. **Kegiatan :** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota indikator Jumlah realisasi LKPM hasil Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (laporan) target 772 Laporan

   Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku usaha) target 60 Pelaku Usaha

   Sub Kegiatan : Pengawasan Penanaman Modal Indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) target 50 kegiatan Usaha

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain:

1. **Kegiatan** : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Jumlah dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dokumen) target 3 Dokumen

Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik indikator Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen) target 3 dokumen

Program yang mendukung sasaran penunjang:

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

1. **Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikator Persentase dokumen Perencanaan evaluasi dan pelaporan yang selaras (%) target 100%

   Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen) target 3 dokumen

   Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen) target 1 Dokumentasi

2. **Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator Persentase Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan pada tahun n (%) target 100 %

   Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan) target 28 orang/bulan

3. **Kegiatan :** Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator Persentase laporan administrasi umum PD disusun sesuai aturan pada tahun n (%) target 100 persen

   Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket) target 4 paket

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) target 4 paket

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket) target 4 paket

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket) target 4 paket

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (dokumen) target 1 dokumen

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan) target 25 laporan

Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen) target 1 dokumen

4. **Kegiatan :** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) target 100 persen

   Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan) target 4 Laporan

   Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan) target 12 laporan

   Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan) target 12 laporan

   Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan) target 12 laporan

5. **Kegiatan :** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%) target 100 persen

   Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) target 15 Unit

   Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel indikator Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit) target 24 unit

   Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya indikator indikator Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit) target 2 unit

   Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit) target 1 unit

   Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit) target 31 unit

2) RENCANA AKSI TAHUN 2026

Secara rinci Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Kabupaten Sragen dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

RENCANA AKSI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2026

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Srategis	Satuan	target				Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	target				Sasaran Kegiatan	Indikator kegiatan	Satuan	target			
					I	II	III	IV				I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase peningkatan investasi	persen	4,28	4,28	4,28	4,28														
		Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperzinaan	Predikat	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)														
		Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	persen	4,28	4,28	4,28	4,28														
									Meningkatnya kemudahan berinvestasi	% Realisasi Total terhadap Target Investasi	persen	25	50	75	100							

																Tersedianya dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen	dokumen	0	0	1	1
																Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (dokumen)	dokumen	0	0	1	1
									Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi skala menengah/ besar	persen	3	8	15	21							

																Terlaksanany a Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penyelenggar aan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)	dok ume n	0	1	1	2
									Meningk atnya kinerja Pelayana n Perizina n & Nonperi zinan	Persenta se Pelaku Usaha yang Memper oleh Izin Sesuai Ketentu an (%)	perse n	20	40	55	96							
																Terlaksanany a Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (izin terbit	dok ume n	**0**	**0**	**2**	**2**
									Meningk atnya Pengend alian Pelaksan aan	Persenta se realisasi LKPM	perse n	1	3	5	8, 5							

																Terlaksanany a Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKPM hasil Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (laporan)	lapo ran	1 5 0	3 0 0	5 0 0	7 7 2
									Meningk atnya pemanfa atan data dan informas i penana man modal	Persenta se Pemanfa atan Data dan Informa si Penana man Modal	perse n	25	50	75	10 0							
																Terlaksanany a Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/K ota (dokumen)	dok ume n	0	1	2	3
		Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80, 45	80, 45	80, 45	80, 45	Meningk atnya akuntabi litas kinerja dan kualitas pelayana n di Perangk at													

									Daerah													
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Nilai	86,5	86,5	86,5	86,5														
										Persentase tingkat pelayanan keuangan, umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	25	50	75	100							
										Nilai/Kategori Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	25	50	75	98,51							
																Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	Persentase dokumen Perencanaan evaluasi dan pelaporan yang selaras	persen	25	50	75	100

																Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan keuangan PD	Persentase Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan pada tahun n	persen	25	50	75	100
																Meningkatnya kualitas dokumen kepegawaian PD	Persentase laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan berlaku pada tahun n	persen	25	50	75	100
																Meningkatnya kualitas data administrasi umum	Persentase laporan administrasi umum PD disusun sesuai aturan pada tahun n	persen	25	50	75	100
																Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai aturan yang berlaku	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	25	50	75	100

																Terlaksanany a Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah sesuai aturan yang berlaku	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	pers en	2 5	5 0	7 5	1 0 0
																Terlaksanany a Kegiatan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai atuaran yang berlaku Pemerintaha n Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah	pers en	2 5	5 0	7 5	1 0 0

BAB III
PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2026 ini berfungsi sebagai dasar pengukuran kinerja pada tahun 2026 sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Aksi ini secara umum menguraikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub-kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen serta indikator dan target kinerja, maka diharapkan tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja PD untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati Sragen. Yang terpenting bahwa Rencana Aksi ini akan dapat tercapai dengan komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan staf yang disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Demikianlah dokumen Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Kabupaten Sragen untuk periode tahun 2026 ini yang disusun sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen.

Sragen, 5 Januari 2026
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Sragen

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
Nip.19670708 199303 1010

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025 Triwulan I

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Faktor	Tindak Lanjut
1	Nilai realisasi penanaman modal	trilyun rupiah	2,2	0,7	[Pendorong] Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA) yang dibuktikan adanya peningkatan IKM bidang perizinan. Selain peningkatan layanan bidang investasi antara lain Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, serta pendampingan penyusunan laporan kegioatan penanaman modal. Upaya lain yang dilakukan antara lain penyusunan dokumen kebijakan bidang penanaman modal, peningkatan promosi serta penyediaan data perizinan dan nonperizinan	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.
2	Jumlah PMA PMDN	investor	10995	2198	[Pendorong] Meningkatnya realisasi investasi dipengaruhui oleh jumlah PMA/PMDN yang ada di Kabuipaten Sragen. Dengan capaian realisasi investasi yang optimal, diharapkan meningkat pula jumlah PMA/PMDN. Peningkatan PMA/PMDN dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, serta kemudahan layanan antara layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA), SIPIONER (Sistem Informasi Perizinan	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)						**167,81**	**16,00**				
Rata-rata capaian						**100,00**					
Rata-rata capaian						**72,41**					
Dinas Penanaman											
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG**			**6.586.299.719**		**1.047.362.210**		**15,90**		
2.18		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**6.586.299.719**		**1.047.362.210**		**15,90**		
2.18.01	**Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**100,00**	**5.629.406.219**	**25,00**	**985.024.710**	**25,00**	**17,50**	**[TW1 - Pendorong] sesuai anggaran kas**	**[TW2] kegiatan akan dilanjutkan di TW 2**

						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)						**167,81**	**16,00**				
2.18.01.2,01	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]	3,00	5.763.000	2,00	0	66,67	0,00	**[TW1 - Pendorong]** Kegiatan fisik (Penyusunan dokumen) telah dilaksanakan	**[TW2]** Realisasi keuangan
2.18.01.2,01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [Dokumen]	3,00	2.917.000	1,00	0	33,33	0,00	**[TW1 - Pendorong]** kegiatan baru tahap penyususun laporan	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]	1,00	2.846.000	1,00	0	100,00	0,00	**[TW1 - Pendorong]** penyususun laporan telah selesai	**[TW2]** pengajuan realisasi keuangan
2.18.01.2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	12,00	3.575.422.221	3,00	797.524.979	25,00	22,31	**[TW1 - Pendorong]** sesuai anggaran kas	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	25,00	3.575.422.221	22,00	797.524.979	88,00	22,31	**[TW1 - Pendorong]** sesuai anggaran kas	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]	2,00	64.528.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** kegiatan belum dilaksanakan	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan [Orang]	4,00	19.528.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** kegiatan belum terlaksana	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	30,00	45.000.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** kegiatan belum terlaksana	**[TW2]** kegiatan akan dilaksanakan mulai TW 2
2.18.01.2,06	Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	12,00	520.899.600	3,00	22.904.500	25,00	4,40	**[TW1 - Pendorong]** sesuai anggaran kas	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	4,00	39.936.000	1,00	8.565.000	25,00	21,45	**[TW1 - Pendorong]** sesuai anggaran kas	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	8,00	194.608.600	2,00	7.459.000	25,00	3,83	**[TW1 - Pendorong]** sesuai anggaran kas	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	4,00	70.415.000	1,00	5.680.500	25,00	8,07	**[TW1 - Pendorong]** sesuai anggaran kas	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	4,00	89.290.000	1,00	0	25,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** sesuai anggaran kas	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1,00	7.000.000	1,00	1.200.000	100,00	17,14	**[TW1 - Pendorong]** sesuai anggaran kas	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	25,00	100.000.000	1,00	0	4,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** kegiatan sudah terlasana	**[TW2]** kegiatan yang terlaksana akan di bayarkan di TW 2
2.18.01.2,06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	1,00	19.650.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** kegiatan belum dilaksanakan	**[TW2]** kegiatan akan di lanjutkan di TW 2
2.18.01.2,07	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	2,00	96.947.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** anggaran kas ada di TW 2-4	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	1,00	35.000.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** kegiatan belum terlaksana	**[TW2]** begiatan akan di lanjutkan TW 2 dan
2.18.01.2,07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [Unit]	4,00	26.742.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** kegiatan belum dilaksanakan	**[TW2]** kegiatan akan dilaksanakan di TW 2 dan seterusnya
2.18.01.2,07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	28,00	35.205.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** kegiatan belum dilaksanakan	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2

						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)						**167,81**	**16,00**				
2.18.01.2,08	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12,00	1.008.121.398	3,00	149.141.180	25,00	14,79	**[TW1 - Pendorong]** sesuai anggaran kas	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	4,00	6.000.000	1,00	0	25,00	0,00	**[TW1 - Pendorong]** kegiatan sudah dilaksanakan	**[TW2]** kegiatana akan dibayarkan di TW 2
2.18.01.2,08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,00	507.925.022	1,00	91.732.180	25,00	18,06	**[TW1 - Pendorong]** sesuai anggaran kas	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	4,00	77.161.000	1,00	0	25,00	0,00	**[TW1 - Pendorong]** kegiatan sudah dilaksanakan	**[TW2]** kegiatan akan di bayarkan dan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	417.035.376	3,00	57.409.000	25,00	13,77	**[TW1 - Pendorong]** sesuai anggaran kas	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,09	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	2,00	357.725.000	1,00	15.454.051	50,00	4,32	**[TW1 - Pendorong]** sesuai anggaran kas	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	15,00	230.520.000	8,00	15.454.051	53,33	6,70	**[TW1 - Pendorong]** sesuai anggaran kas	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	96,00	13.582.000	5,00	0	5,21	0,00	**[TW1 - Penghambat]** kegiatan belum terlaksana	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	1,00	18.260.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** Aset masih cukup baik berfungsi	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	1,00	49.765.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** sarna dan prasarana masih cukup	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
2.18.01.2,09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	28,00	45.598.000	14,00	0	50,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** gedung masih berfungsi cukup baik	**[TW2]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 2
Rata-rata capaian kinerja (%)						**100,00**	**17,50**	**25,00**	**17,50**		
Predikat kinerja						**ST**	**SR**	**SR**	**SR**		
2.18.02	**Meningkatnya dokumen kebijakan**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim**	**50,00**	**100.000.000**	**10,00**	**11.432.000**	**20,00**	**11,43**	**[TW1 - Pendorong]**	**[TW2]**
2.18.02.2,01	Tersusunnya dokumen kebijakan penanaman modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kebijakan penanaman modal [dokumen]	1,00	100.000.000	1,00	11.432.000	100,00	11,43	**[TW1 - Pendorong]** Percepatan penyelesaian kegiatan	**[TW2]** Percepatan penyelesaian kegiatan TW2
2.18.02.2,01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal [Dokumen]	1,00	100.000.000	1,00	11.432.000	100,00	11,43	**[TW1 - Pendorong]** Peningkatan kegiatan	**[TW2]** penyelesaian TW2 dan TW3
Rata-rata capaian kinerja (%)						**100,00**	**11,43**	**20,00**	**11,43**		
Predikat kinerja						**ST**	**SR**	**SR**	**SR**		
2.18.03	**Meningkatnya realisasi minat penanaman**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman**	**25,00**	**137.534.000**	**10,00**	**0**	**40,00**	**0,00**	**[TW1 - Pendorong]**	**[TW2]**
2.18.03.2,01	Terlaksananya even promosi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	2,00	137.534.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** target pelaksanaan keikutsertaan even promosi pad aTW2 dan	**[TW2]** pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3
2.18.03.2,01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	2,00	137.534.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** target pelaksanaan keikutsertaan even promosi pad aTW2 dan	**[TW2]** pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3
Rata-rata capaian kinerja (%)						**200,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**		
Predikat kinerja						**STS**	**SR**	**SR**	**SR**		
2.18.04	**Meningkatnya Indeks Kepuasan**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang**	**84,00**	**482.359.500**	**89,75**	**39.086.000**	**106,85**	**8,10**	**[TW1 - Pendorong]**	**[TW2]**

						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)						**167,81**	**16,00**				
2.18.04.2,01	Tersedianya standar pelayanan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100,00	482.359.500	100,00	39.086.000	100,00	8,10	**[TW1 - Pendorong]** SP telah disusun	**[TW2]** peninjauan SP
2.18.04.2,01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota [Dokumen]	150,00	90.000.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW1 - Penghambat]** Target pelaksanaan pad TW2 dan TW3	**[TW2]** Pelaksanaan pad aTW2 dan TW3

						I					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)						**167,81**	**16,00**				
2.18.04.2,01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik [Pelaku Usaha]	3.200,00	119.992.000	402,00	16.551.000	12,56	13,79	**[TW1 - Pendorong]** kemudahan layanan OSS dan layanan perizinan online lainnya	**[TW2]** peningkatan kualitas layanan OSS dan layanan perizinan online lainnya
2.18.04.2,01.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik [Pelaku Usaha]	80,00	45.000.000	22,00	3.347.000	27,50	7,44	**[TW1 - Pendorong]** kemudahan layanan konsultasi dan pengaduan	**[TW2]** peningkatan kualitas layanan
2.18.04.2,01.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari	500,00	227.367.500	120,00	19.188.000	24,00	8,44	**[TW1 - Pendorong]** kegiatan sesuai dengan rencana	**[TW2]** peningkatan kegiatan sesuai rencana
Rata-rata capaian kinerja (%)						**106,85**	**8,10**	**106,85**	**8,10**		
Predikat kinerja						**STS**	**SR**	**STS**	**SR**		
2.18.05	**Meningkatnya realisasi pelaku usaha yang**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang**	**10,00**	**182.000.000**	**8,00**	**10.915.500**	**80,00**	**6,00**	**[TW1 - Pendorong]**	**[TW2]**
2.18.05.2,01	Tercapainya cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100,00	182.000.000	100,00	10.915.500	100,00	6,00	**[TW1 - Pendorong]** pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	**[TW2]** ditingkatkan pada TW2
2.18.05.2,01.0006		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha [Kegiatan Usaha]	150,00	182.000.000	15,00	10.915.500	10,00	6,00	**[TW1 - Pendorong]** pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	**[TW2]** peningkatan kegiatan pada TW2
Rata-rata capaian kinerja (%)						**400,00**	**6,00**	**80,00**	**6,00**		
Predikat kinerja						**STS**	**SR**	**T**	**SR**		
2.18.06	**Meningkatnya laporan pelayanan perijinan**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN**	**Persentase laporan pelayanan perijinan**	**50,00**	**55.000.000**	**10,00**	**904.000**	**20,00**	**1,64**	**[TW1 - Pendorong]**	**[TW2]**
2.18.06.2,01	Penyusunan dokumen data informasi perizinan/nonperizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	50,00	55.000.000	10,00	904.000	20,00	1,64	**[TW1 - Pendorong]** Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	**[TW2]** pelaksanaan agar menyesuaikan rencana
2.18.06.2,01.0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	1,00	55.000.000	1,00	904.000	100,00	1,64	**[TW1 - Pendorong]** Penyusunan sesuai rencana	**[TW2]** pelaksanaan agar menyesuaikan rencana
Rata-rata capaian kinerja (%)						**100,00**	**1,64**				
Predikat kinerja						**ST**	**SR**				
					Predikat kinerja	**ST**	**SR**				

Sragen, 07 April 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sragen

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
NIP. 19791225 199810 1 001

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025 Triwulan I

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Faktor	Tindak Lanjut
1	Nilai realisasi penanaman modal	trilyun rupiah	2,2	1,1	[Pendorong] Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA) yang dibuktikan adanya peningkatan IKM bidang perizinan. Selain peningkatan layanan bidang investasi antara lain Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, serta pendampingan penyusunan laporan kegioatan penanaman modal. Upaya lain yang dilakukan antara lain penyusunan dokumen kebijakan bidang penanaman modal, peningkatan promosi serta penyediaan data perizinan dan nonperizinan	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.
2	Jumlah PMA PMDN	investor	10995	3863	[Pendorong] Meningkatnya realisasi investasi dipengaruhui oleh jumlah PMA/PMDN yang ada di Kabuipaten Sragen. Dengan capaian realisasi investasi yang optimal, diharapkan meningkat pula jumlah PMA/PMDN. Peningkatan PMA/PMDN dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, serta kemudahan layanan antara layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA), SIPIONER (Sistem Informasi Perizinan Online Sragen) dan Si-Pelangi (Sistem Informasi Peluang Investasi) pendampingan penyusunan LKPM.	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)			132,63	38,50				
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)			88,89					
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)			89,20					
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG**			**6.204.072.681**		**2.388.496.566**		**38,50**		
2.18		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**6.204.072.681**		**2.388.496.566**		**38,50**		
2.18.01	**Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**100,00**	**5.587.585.681**	**50,00**	**2.187.718.476**	**50,00**	**39,15**		
2.18.01.2,01	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]	3,00	3.280.000	2,00	0	66,67	0,00	**[TW2 - Pendorong]** Kegiatan fisik telah sebagian dilaksanakan	**[TW3]** Penyusunan akan dilaksanakan sesuai jadwal rencana
2.18.01.2,01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [Dokumen]	3,00	1.600.000	2,00	0	66,67	0,00	**[TW2 - Pendorong]** Laporan Awal telah disusun	**[TW3]** Penyelesaian dokumen disesuaikan rencana
2.18.01.2,01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]	1,00	1.680.000	1,00	0	100,00	0,00	**[TW2 - Pendorong]** kegiatan monitoring dilaksanakan pada TW berikutnya	**[TW3]** Penyelesaian dilaksnakan seuai rencana
2.18.01.2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	12,00	3.895.270.179	8,00	1.740.462.420	66,67	44,68	**[TW2 - Pendorong]** pelaksanaan sesuai anggaran kas	**[TW3]** pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana
2.18.01.2,02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	25,00	3.895.270.179	28,00	1.740.462.420	112,00	44,68	**[TW2 - Pendorong]** pencairan sesuai anggaran kas	**[TW3]** pelaksanaan kegiatan disesuikan dengan rencana
2.18.01.2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]	2,00	26.183.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW2 - Penghambat]** adanya pergeseran anggaran	**[TW3]** rencana kegiatan pada TW3
2.18.01.2,05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan [Orang]	4,00	8.438.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW2 - Penghambat]** kegiatan dilakukan pergeseran	**[TW3]** pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas
2.18.01.2,05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	30,00	17.745.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW2 - Penghambat]** rencana pelaksanaan kegiatan pada TW3	**[TW3]** kegiatan disesuaikan dengan rencana
2.18.01.2,06	Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	12,00	348.826.600	6,00	45.082.000	50,00	12,92	**[TW2 - Pendorong]** Sebagian kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana	**[TW3]** peningkatan realisasi keuangan pada TW3
2.18.01.2,06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	4,00	27.826.000	2,00	8.565.000	50,00	30,78	**[TW2 - Pendorong]** Kegiatan fisik telah dilaksanakan	**[TW3]** peningkatan pencairan keuangan pada TW3
2.18.01.2,06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	8,00	155.256.600	4,00	17.639.000	50,00	11,36	**[TW2 - Penghambat]** Kegiatan fisik sebagian telah dilaksanakan	**[TW3]** Peningkatan realisasi keuangan
2.18.01.2,06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	4,00	48.204.000	2,00	15.278.000	50,00	31,69	**[TW2 - Pendorong]** kegiatan sesuai rencana	**[TW3]** peningkatan kegiatan pada TW3
2.18.01.2,06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	4,00	45.540.000	2,00	0	50,00	0,00	**[TW2 - Pendorong]** realisasi kegiatan fisik telah	**[TW3]** peningkatan kegiatan dan realisasi
2.18.01.2,06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1,00	7.000.000	1,00	3.600.000	100,00	51,43	**[TW2 - Pendorong]** kegiatan dilaksanakan seusai	**[TW3]** peningkatan kegiatan dan realisasi
2.18.01.2,06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	25,00	55.000.000	10,00	0	40,00	0,00	**[TW2 - Penghambat]** Sebagian kegiatan telah dilaksanakan	**[TW3]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3
2.18.01.2,06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	1,00	10.000.000	1,00	0	100,00	0,00	**[TW2 - Pendorong]** Kegiatan fisik telah dilaksanakan	**[TW3]** pengajuan pencairan anggaran

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025		II		Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)	**132,63**	**38,50**						
2.18.01.2,07	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	2,00	96.947.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW2 - Pendorong]** Pelaksanaan pengadaan	**[TW3]** pelaksanaan kegiatan pada TW3
2.18.01.2,07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	1,00	35.000.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW2 - Penghambat]** Pelaksanaan kegiatan menunggu	**[TW3]** Kegiatan dilanjutkan pada TW3
2.18.01.2,07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [Unit]	4,00	26.742.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW2 - Penghambat]** Menunggu ketersediaan barang di E-Catalog	**[TW3]** Dilaksanakan pada TW3
2.18.01.2,07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	28,00	35.205.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW2 - Penghambat]** rencana kegiatan dilakukan pergeseran	**[TW3]** kegiatan dilanjutnya pada TW3
2.18.01.2,08	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12,00	942.117.912	6,00	332.207.314	50,00	35,26	**[TW2 - Pendorong]** Sebagian kegiatan secara fisik telah dilaksanakan sesuai jadwal	**[TW3]** peningkatan realisasi kegiatan dan keuangan pada TW3
2.18.01.2,08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	4,00	2.400.000	2,00	0	50,00	0,00	**[TW2 - Penghambat]** Kegiatan fisik telah dilaksanakan	**[TW3]** peningkatan realisasi keuangan pada TW3
2.18.01.2,08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,00	505.328.532	2,00	181.178.814	50,00	35,85	**[TW2 - Pendorong]** Kegiatan sesuai rencana	**[TW3]** peningkatan pelaksanaan kegiatan
2.18.01.2,08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	4,00	49.539.000	2,00	0	50,00	0,00	**[TW2 - Penghambat]** kegiatan fisik telah dilaksanakan	**[TW3]** peningkatan realisasi keuangan pada TW3
2.18.01.2,08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	384.850.380	6,00	151.028.500	50,00	39,24	**[TW2 - Pendorong]** Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	**[TW3]** peningkatan realisasi kegiatan dan keuangan sesuai rencana
2.18.01.2,09	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	2,00	274.960.990	2,00	69.966.742	100,00	25,45	**[TW2 - Pendorong]** Sebagian besar kegiatan fisik telah dilaksanakan	**[TW3]** peningkatan realisasi kegiatan dan keuangan pada TW3
2.18.01.2,09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	15,00	170.035.990	16,00	60.016.742	106,67	35,30	**[TW2 - Pendorong]** Pelaksanaan pemeliharaan sesuai rencana	**[TW3]** peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan berdasarkan prioritas
2.18.01.2,09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	96,00	11.552.000	20,00	0	20,83	0,00	**[TW2 - Penghambat]** mebel masih cukup baik	**[TW3]** pemeliharaan sesuai prioritas
2.18.01.2,09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	1,00	15.760.000	1,00	0	100,00	0,00	**[TW2 - Pendorong]** aset masih cukup layak fungsi	**[TW3]** pemeliharaan sesuai prioritas
2.18.01.2,09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	1,00	49.765.000	1,00	9.950.000	100,00	19,99	**[TW2 - Pendorong]** pelaksanaan kegiatan sesuai	**[TW3]** peningkatan kegiatan sesuai jadwal
2.18.01.2,09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	28,00	27.848.000	14,00	0	50,00	0,00	**[TW2 - Pendorong]** kondisi gedung masih cukup baik	**[TW3]** perbaikan sesuai prioritas
			Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**39,15**	**50,00**	**39,15**				
			Predikat kinerja	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**				
2.18.02	**Meningkatnya dokumen kebijakan**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim**	**50,00**	**77.368.000**	**30,00**	**52.119.000**	**60,00**	**67,37**	**[TW2 - Pendorong]**	**[TW3]**
2.18.02.2,01	Tersusunnya dokumen kebijakan penanaman modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kebijakan penanaman modal [dokumen]	1,00	77.368.000	1,00	52.119.000	100,00	67,37	**[TW2 - Pendorong]** Peningkatan penyelesaian kegiatan pada TW3	**[TW3]** Peningkatan penyelesaian kegiatan dan realisasi keuangan
2.18.02.2,01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal [Dokumen]	1,00	77.368.000	1,00	52.119.000	100,00	67,37	**[TW2 - Penghambat]** Dokumen Raperda di DPRD	**[TW3]** Pengesahan dan kesepakatan dengan DPRD
			Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**67,37**	**60,00**	**67,37**				
			Predikat kinerja	**ST**	**S**	**R**	**S**				
2.18.03	**Meningkatnya realisasi minat penanaman**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman**	**25,00**	**113.919.000**	**14,80**	**7.342.750**	**59,20**	**6,45**	**[TW2 - Pendorong]**	**[TW3]**
2.18.03.2,01	Terlaksananya even promosi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	2,00	113.919.000	1,00	7.342.750	50,00	6,45	**[TW2 - Pendorong]** Rencana kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan	**[TW3]** Kegiatan dilanjutkan pada TW3
2.18.03.2,01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	2,00	113.919.000	1,00	7.342.750	50,00	6,45	**[TW2 - Penghambat]** Rencana Kegiatan sesuai jaadwal dan ditetapkan	**[TW3]** Kegiatan dilaksnakan pada TW3
			Rata-rata capaian kinerja (%)	**98,67**	**6,45**	**59,20**	**6,45**				
			Predikat kinerja	**ST**	**SR**	**R**	**SR**				

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025		II		Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)			**132,63**	**38,50**				
2.18.04	**Meningkatnya Indeks Kepuasan**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang**	**84,00**	**346.347.000**	**87,75**	**102.143.340**	**104,46**	**29,49**	**[TW2 - Penghambat]**	**[TW3]**
2.18.04.2,01	Tersedianya standar pelayanan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100,00	346.347.000	100,00	102.143.340	100,00	29,49	**[TW2 - Pendorong]** Peninjauan SP menjadi salah prioritas	**[TW3]** pelaksanaan FKP
2.18.04.2,01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota [Dokumen]	150,00	54.951.000	67,00	10.772.840	44,67	19,60	**[TW2 - Pendorong]** Minat pelaku usaha sangat tinggi untuk mengikuti pelatihan	**[TW3]** meningkatkan kualitas pelatihan bagi umkm
2.18.04.2,01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik [Pelaku Usaha]	3.200,00	100.863.500	968,00	36.633.000	30,25	36,32	**[TW2 - Pendorong]** Peningkatan Layanan Mobile (layanan bergerak)	**[TW3]** Peningkatan layanan
2.18.04.2,01.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik [Pelaku Usaha]	80,00	36.290.000	0,00	11.417.500	0,00	31,46	**[TW2 - Penghambat]** konsultasi yang tidak tercatat	**[TW3]** peningkatan dokumentasi dalam kegiatan
2.18.04.2,01.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari	500,00	154.242.500	170,00	43.320.000	34,00	28,09	**[TW2 - Penghambat]** obyek pemantauan bidang perizinan berusaha yang kurang memadai	**[TW3]** Peningkatan sosisalisasi bidang perizinan berusaha
			Rata-rata capaian kinerja (%)			**104,46**	**29,49**	**104,46**	**29,49**		
			Predikat kinerja			**STS**	**SR**	**STS**	**SR**		
2.18.05	**Meningkatnya realisasi pelaku usaha yang**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang**	**10,00**	**23.853.000**	**26,00**	**13.553.000**	**260,00**	**56,82**	**[TW2 - Pendorong]**	**[TW3]**
2.18.05.2,01	Tercapainya cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100,00	23.853.000	100,00	13.553.000	100,00	56,82	**[TW2 - Pendorong]** terlaksananya pengendalian pelaksanaan yang tepat sasaran	**[TW3]** peningkatan pengendalian pelaksanaan
2.18.05.2,01.0006		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha [Kegiatan Usaha]	150,00	23.853.000	74,00	13.553.000	49,33	56,82	**[TW2 - Pendorong]** Peningkatan pengawasan melalui daring	**[TW3]** Peningkatan capaian kinerja
			Rata-rata capaian kinerja (%)			**260,00**	**56,82**	**260,00**	**56,82**		
			Predikat kinerja			**STS**	**R**	**STS**	**R**		
2.18.06	**Meningkatnya laporan pelayanan perijinan**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN**	**Persentase laporan pelayanan perijinan**	**50,00**	**55.000.000**	**50,00**	**25.620.000**	**100,00**	**46,58**	**[TW2 - Pendorong]**	**[TW3]**
2.18.06.2,01	Penyusunan dokumen data informasi perizinan/nonperizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	50,00	55.000.000	50,00	25.620.000	100,00	46,58	**[TW2 - Pendorong]** pelaksanaan sesuai rencana	**[TW3]** peningkatan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan
2.18.06.2,01.0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	1,00	55.000.000	1,00	25.620.000	100,00	46,58	**[TW2 - Pendorong]** pelaksanaan kegaiatan sesuai rencana	**[TW3]** peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan
			Rata-rata capaian kinerja (%)			**100,00**	**46,58**				
			Predikat kinerja			**ST**	**SR**				

Sragen, 17 Juli 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sragen

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
NIP. 19791225 199810 1 001

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025 Triwulan III

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Faktor	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Nilai realisasi penanaman modal	trilyun rupiah	2,2	2,07	[Pendorong] Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan Online Single Submission Risk Based	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.	
2	Jumlah PMA PMDN	investor	10995	7043	[Pendorong] Meningkatnya realisasi investasi dipengaruhui oleh jumlah PMA/PMDN yang ada di Kabuipaten Sragen. Dengan capaian realisasi investasi yang optimal,	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.	
3	Persentase peningkatan Investasi	Persen	4,27				
4	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Predikat	A (Sangat Baik)				
5	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	Persen	4,27				
6	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	4,27				
7	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	100				

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada III		Tingkat Capaian Kinerja dan		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)			**156,89**	**61,15**				
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)			**100,00**					
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)			**89,32**					
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.099.227.936**		**3.729.464.421**		**61,15**		
2.18		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**6.099.227.936**		**3.729.464.421**		**61,15**		
2.18.01	**Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**100,00**	**5.410.108.936**	**100,00**	**3.304.313.600**	**100,00**	**61,08**	**[TW3 - Pendorong] kegiatan sesuai anggaran kas**	**[TW4] kegiatan akan dilanjutkan TW 4**
2.18.01.2,01	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]	3,00	3.943.000	4,00	2.157.500	133,33	54,72	**[TW3 - Pendorong]** Kegiatan fisik telah dilaksanakan	**[TW4]** realisasi keuangan akan terserap di TW 4
2.18.01.2,01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [Dokumen]	3,00	2.263.000	3,00	1.242.500	100,00	54,90	**[TW3 - Pendorong]** dokumen telah selesai di susun	**[TW4]** realisasi anggaran akan dilanjutkan di TW 4
2.18.01.2,01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]	1,00	1.680.000	1,00	915.000	100,00	54,46	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan monitoring dilaksanakan di TW berikutnya	**[TW4]** penyelesaian dilaksanakan sesuai rencana

2.18.01.2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	12,00	3.740.425.434	9,00	2.486.520.082	75,00	66,48	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 4
2.18.01.2,02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	25,00	3.740.425.434	27,00	2.486.520.082	108,00	66,48	**[TW3 - Pendorong]** persiapan kegiatan	**[TW4]** kegiatan akan dilaksanakan di TW 4
2.18.01.2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]	2,00	16.580.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW3 - Pendorong]** taha[p persiapan pelaksanaan	**[TW4]** kegiatan dilaksanakan TW 4
2.18.01.2,05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan [Orang]	4,00	0	0,00	0	0,00	0,00	**[TW3 - Penghambat]** kegiatan tidak dilaksanakan	**[TW4]** kegiatan di refucusing
2.18.01.2,05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	30,00	16.580.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW3 - Penghambat]** kegiatan tahapan persiapan	**[TW4]** kegiatan di laksanakan di TW 4
2.18.01.2,06	Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	12,00	367.538.200	9,00	140.698.121	75,00	38,28	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 4
2.18.01.2,06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	4,00	32.326.000	3,00	18.552.000	75,00	57,39	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4
2.18.01.2,06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	8,00	161.018.200	6,00	38.498.000	75,00	23,91	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4
2.18.01.2,06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	4,00	48.204.000	3,00	27.725.500	75,00	57,52	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4
2.18.01.2,06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	4,00	45.540.000	3,00	24.124.000	75,00	52,97	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4
2.18.01.2,06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	1,00	7.000.000	1,00	3.600.000	100,00	51,43	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4
2.18.01.2,06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	25,00	63.450.000	15,00	22.048.621	60,00	34,75	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4
2.18.01.2,06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	1,00	10.000.000	1,00	6.150.000	100,00	61,50	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4
2.18.01.2,07	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	2,00	154.249.000	1,00	13.625.000	50,00	8,83	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4
2.18.01.2,07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	1,00	35.000.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW3 - Pendorong]** pengadaan baru proses pengadaan	**[TW4]** realisasi fisik dan keuangan di TW 4
2.18.01.2,07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [Unit]	4,00	74.945.000	0,00	0	0,00	0,00	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan proses pengadaan	**[TW4]** realisasi fisik dan keuangan di TW 4
2.18.01.2,07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	14,00	44.304.000	10,00	13.625.000	71,43	30,75	**[TW3 - Pendorong]** pengadaan sebagian sudah dilaksanakan	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4
2.18.01.2,08	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12,00	839.795.302	9,00	531.077.502	75,00	63,24	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4
2.18.01.2,08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	4,00	2.400.000	3,00	1.200.000	75,00	50,00	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4
2.18.01.2,08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	4,00	443.662.922	3,00	279.820.002	75,00	63,07	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4
2.18.01.2,08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	4,00	50.854.000	3,00	11.235.000	75,00	22,09	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4
2.18.01.2,08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	342.878.380	9,00	238.822.500	75,00	69,65	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4
2.18.01.2,09	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	2,00	287.578.000	1,00	130.235.395	50,00	45,29	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4

2.18.01.2,09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	15,00	169.130.000	15,00	88.079.695	100,00	52,08	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 4
2.18.01.2,09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	43,00	11.552.000	20,00	1.520.000	46,51	13,16	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 4
2.18.01.2,09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	1,00	9.282.000	1,00	0	100,00	0,00	**[TW3 - Pendorong]** pemeliharaan sudah dilaksanakan	**[TW4]** peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan TW 4
2.18.01.2,09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	1,00	71.289.543	1,00	29.835.700	100,00	41,85	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan di laksanakan sesuai anggaran kas	**[TW4]** kegiatan akan dilanjutkan di TW 4
2.18.01.2,09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	43,00	26.324.457	20,00	10.800.000	46,51	41,03	**[TW3 - Pendorong]** ada beberapa sapras yang harus di perbaiki	**[TW4]** perbaikan sesuai prioritas
					Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**61,08**	**100,00**	**61,08**		
					Predikat kinerja	**ST**	**R**	**ST**	**R**		
2.18.02	**Meningkatnya dokumen kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**50,00**	**100.000.000**	**40,00**	**67.182.000**	**80,00**	**67,18**	**[TW3 - Pendorong] Penyelesaian dokumen kebijakan**	**[TW4] Sosialisasi produk kebijakan penamanan modal**
2.18.02.2,01	Tersusunnya dokumen kebijakan penanaman modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kebijakan penanaman modal [dokumen]	1,00	100.000.000	1,00	67.182.000	100,00	67,18	**[TW3 - Pendorong]** Penyelesaian dokumen	**[TW4]** sosialisasi produk kebijakan
2.18.02.2,01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal [Dokumen]	1,00	100.000.000	1,00	67.182.000	100,00	67,18	**[TW3 - Pendorong]** Raperda telah disahkan	**[TW4]** Sosialisasi Perda
					Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**67,18**	**80,00**	**67,18**		
					Predikat kinerja	**ST**	**S**	**T**	**S**		
2.18.03	**Meningkatnya realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**25,00**	**113.919.000**	**25,00**	**112.783.951**	**100,00**	**99,00**	**[TW3 - Pendorong] Meningkatnya Penyebaran informasi**	**[TW4] Peningkatan intensitas informasi**
2.18.03.2,01	Terlaksananya even promosi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	2,00	113.919.000	2,00	112.783.951	100,00	99,00	**[TW3 - Pendorong]** Keikutsertaan even promosi	**[TW4]** Evaluasi penyelenggaraan promosi
2.18.03.2,01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	2,00	113.919.000	2,00	112.783.951	100,00	99,00	**[TW3 - Pendorong]** kegiatan pameran lokasi dan regional telah dilaksanakan	**[TW4]** evaluasi kegiatan
					Rata-rata capaian kinerja (%)	**104,17**	**99,00**	**100,00**	**99,00**		
					Predikat kinerja	**STS**	**ST**	**ST**	**ST**		
2.18.04	**Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [Poin]**	**84,00**	**346.347.000**	**87,75**	**184.048.620**	**104,46**	**53,14**	**[TW3 - Pendorong] Kemudahan layanan perizinan online**	**[TW4] Peningkatan IKM**
2.18.04.2,01	Tersedianya standar pelayanan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100,00	346.347.000	75,00	184.048.620	75,00	53,14	**[TW3 - Pendorong]** Reviu SOP dan SP	**[TW4]** Perbaikan SOP dan SP

2.18.04.2,01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota [Dokumen]	5,00	54.951.000	5,00	34.239.020	100,00	62,31	**[TW3 - Pendorong]** meningkatkan kualitas pelatihan bagi umkm dengan mengundang narasumber yang kompeten	**[TW4]** Evaluasi kegiatan
2.18.04.2,01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik [Pelaku Usaha]	1.350,00	100.863.500	2.321,00	56.644.500	171,93	56,16	**[TW3 - Pendorong]** peningkatan layanan	**[TW4]** Evaluasi layanan perizinan/ nonperizinan
2.18.04.2,01.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik [Pelaku Usaha]	80,00	36.290.000	47,00	21.520.250	58,75	59,30	**[TW3 - Pendorong]** peningkatan kegiatan konsultasi dan pelayanan aduan	**[TW4]** Monev pelaksanaan tindak lanjut pengaduan
2.18.04.2,01.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha [Kegiatan Usaha]	500,00	154.242.500	385,00	71.644.850	77,00	46,45	**[TW3 - Pendorong]** Peningkatan sosialisasi bidang perzinan berusaha	**[TW4]** Evaluasi bidang perizinan berusaha
					Rata-rata capaian kinerja (%)	**104,46**	**53,14**	**104,46**	**53,14**		
					Predikat kinerja	**STS**	**R**	**STS**	**R**		
2.18.05	**Meningkatnya realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**10,00**	**23.853.000**	**43,27**	**18.549.250**	**432,70**	**77,76**	**[TW3 - Pendorong] Peningkatan sosialisasi dan pengawasan penanaman modal**	**[TW4] Evaluasi capaian LKPM**
2.18.05.2,01	Tercapainya cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100,00	23.853.000	100,00	18.549.250	100,00	77,76	**[TW3 - Pendorong]** Peningkatan pengendalian pelaksanaan	**[TW4]** Evaluasi pengendalian pelaksanaan
2.18.05.2,01.0006		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha [Kegiatan Usaha]	60,00	23.853.000	48,00	18.549.250	80,00	77,76	**[TW3 - Pendorong]** Peningkatan inspeksi lapangan	**[TW4]** Evaluasi pelaksanaan inspeksi lapangan
					Rata-rata capaian kinerja (%)	**432,70**	**77,76**	**432,70**	**77,76**		
					Predikat kinerja	**STS**	**T**	**STS**	**T**		
2.18.06	**Meningkatnya laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**50,00**	**105.000.000**	**50,00**	**42.587.000**	**100,00**	**40,56**	**[TW3 - Pendorong] Pelaksanaan sesuai rencana**	**[TW4] Evaluasi pelaksanaan kegiatan**
2.18.06.2,01	Penyusunan dokumen data informasi perizinan/nonperizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	50,00	105.000.000	50,00	42.587.000	100,00	40,56	**[TW3 - Pendorong]** pelaksanaan sesuai rencana	**[TW4]** peningkatan kegiatan sesuai jadwal
2.18.06.2,01.0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	2,00	105.000.000	1,00	42.587.000	50,00	40,56	**[TW3 - Pendorong]** Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	**[TW4]** Evaluasi dan peningkatan kegiatan
					Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**40,56**				
					Predikat kinerja	**ST**	**SR**				

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
NIP. 19791225 199810 1 001

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025 Triwulan IV

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Faktor	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Nilai realisasi penanaman modal	trilyun rupiah	1,65	2,4	[Pendorong] Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA) yang dibuktikan adanya peningkatan IKM bidang perizinan. Selain peningkatan layanan bidang investasi antara lain Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, serta pendampingan penyusunan laporan kegioatan penanaman modal. Upaya lain yang dilakukan antara lain penyusunan dokumen kebijakan bidang penanaman modal, peningkatan promosi serta penyediaan data perizinan dan nonperizinan	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.	
2	Jumlah PMA PMDN	investor	10998	10126	[Penghambat] realisasi investasi dipengaruhui oleh jumlah PMA/PMDN dan capaian realisasi investasi yang optimal, diharapkan meningkat pula jumlah PMA/PMDN. Namun peningkatan PMA/PMDN tidak mutlak berbanding lurus dengan meningkatnya realisasi investasi. Hal ini bisa terjadi karena tingkatan investasi masing-masing investor tidak sama. Ada kategori nilai investasi besar dari investor yang relatif sedikit. Sebaliknya terdapat kategori nilai investasi kecil/sedang namun dengan jumlah investor yang banyak.	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.	
3	Persentase peningkatan Investasi	Persen	4,27	4,29	[Pendorong] meningkatnya informasi pelayanan investasi dan kemudahan sistem layanan perizinan yang disediakan oleh DPMPTSP maupun stakeholder, turut membantu meningkatnya iklim positif investasi di kabupaten Sragen. Hal ini juga ditunjang meningkatnya layanan investasi melalui pengembangan, promosi, pelayanan perizinan pengendalian dan penyediaan data perizinan dan nonperizinan.	peningkatan dan penguataan kualitas	
4	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Predikat	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	[Pendorong] Kemudahan layanan perizinan dan nonperizinan	peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan	
5	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	Persen	4,27	4,74	[Pendorong] Kemudahan sistem layanan investasi	peningkatan Kemudahan sistem layanan investasi	
6	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	4,27	4,29	[Pendorong] Kemudahan sistem layanan investasi	peningkatan sistem layanan investasi	
7	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	100	104	[Pendorong] Kemudahan sistem layanan investasi	peningkatan layanan investasi	

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)			**120,91**	**90,64**				
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)			**108,33**					
			Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)			**107,40**					
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.099.227.936**		**5.528.177.237**		**90,64**		
2.18		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**6.099.227.936**		**5.528.177.237**		**90,64**		
2.18.01	**Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**100,00**	**5.410.108.936**	**100,00**	**4.865.427.281**	**100,00**	**89,93**	**[TW4 - Pendorong] Kegiatan sesuai anggaran kas**	**[Rekom Berikutnya] kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya**
2.18.01.2,01	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]	3,00	3.943.000	3,00	2.370.500	100,00	60,12	**[TW4 - Penghambat]** realisasi kegiatan (fisik) sesuai target	**[Rekom Berikutnya]** kedepannya di spjkan sesuai anggaran kas

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.01.2,01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [Dokumen]	3,00	2.263.000	3,00	1.455.500	100,00	64,32	**[TW4 - Penghambat]** realisasi kegiatan (fisik) sesuai target	**[Rekom Berikutnya]** kedepannya SPJ sesuai anggaran kas
2.18.01.2,01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]	1,00	1.680.000	1,00	915.000	100,00	54,46	**[TW4 - Penghambat]** realisasi kegiatan (fisik) sesuai target	**[Rekom Berikutnya]** kedepannya SPJ sesuai anggaran kas
2.18.01.2,02	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	14,00	3.740.425.434	14,00	3.325.782.503	100,00	88,91	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	28,00	3.740.425.434	28,00	3.325.782.503	100,00	88,91	**[TW4 - Penghambat]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** anggaran gaji disesuaikan dengan kebutuhan
2.18.01.2,05	Terlaksananya penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]	1,00	16.580.000	1,00	13.825.000	100,00	83,38	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan tidak dianggarkan tahun berikutnya di karenakan pengurangan anggaran
2.18.01.2,05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan [Orang]	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	**[TW4 - Pendorong]** kegiatan tidak dilaksankan	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan di refucusing
2.18.01.2,05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	30,00	16.580.000	30,00	13.825.000	100,00	83,38	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan tidak dianggarkan tahun berikutnya karena pengurangan anggaran
2.18.01.2,06	Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	12,00	367.538.200	12,00	343.012.809	100,00	93,33	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	4,00	32.326.000	4,00	31.783.000	100,00	98,32	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	8,00	161.018.200	8,00	153.138.550	100,00	95,11	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	4,00	48.204.000	4,00	45.369.000	100,00	94,12	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	4,00	45.540.000	4,00	44.010.000	100,00	96,64	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	1,00	7.000.000	1,00	7.000.000	100,00	100,00	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	25,00	63.450.000	32,00	51.712.259	128,00	81,50	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	100,00	100,00	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,07	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	2,00	154.249.000	2,00	150.948.897	100,00	97,86	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran
2.18.01.2,07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	1,00	35.000.000	1,00	34.113.650	100,00	97,47	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai target	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran
2.18.01.2,07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [Unit]	4,00	74.945.000	4,00	73.827.997	100,00	98,51	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran
2.18.01.2,07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	14,00	44.304.000	14,00	43.007.250	100,00	97,07	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran
2.18.01.2,08	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12,00	839.795.302	12,00	770.165.909	100,00	91,71	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	4,00	2.400.000	4,00	2.160.000	100,00	90,00	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	4,00	443.662.922	4,00	385.488.409	100,00	86,89	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	4,00	50.854.000	4,00	43.388.000	100,00	85,32	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	342.878.380	12,00	339.129.500	100,00	98,91	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.18.01.2,09	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	2,00	287.578.000	2,00	259.321.663	100,00	90,17	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	15,00	169.130.000	16,00	144.547.963	106,67	85,47	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	43,00	11.552.000	43,00	9.730.000	100,00	84,23	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	1,00	9.282.000	1,00	9.200.000	100,00	99,12	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	1,00	71.289.543	1,00	70.575.700	100,00	99,00	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
2.18.01.2,09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	43,00	26.324.457	43,00	25.268.000	100,00	95,99	**[TW4 - Pendorong]** Kegiatan sesuai anggaran kas	**[Rekom Berikutnya]** kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya
			Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**89,93**	**100,00**	**89,93**				
			Predikat kinerja	**ST**	**T**	**ST**	**T**				
2.18.02	**Meningkatnya dokumen kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**50,00**	**100.000.000**	**50,00**	**94.792.400**	**100,00**	**94,79**	**[TW4 - Pendorong] Realisasi program sesuai target**	**[Rekom Berikutnya] Peningkatan kualitas pelaksanaan**
2.18.02.2,01	Tersusunnya dokumen kebijakan penanaman modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kebijakan penanaman modal [dokumen]	1,00	100.000.000	1,00	94.792.400	100,00	94,79	**[TW4 - Pendorong]** Realisasi kegiatan sesuai target	**[Rekom Berikutnya]** Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan
2.18.02.2,01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal [Dokumen]	1,00	100.000.000	1,00	94.792.400	100,00	94,79	**[TW4 - Pendorong]** Penyelesaian kegiatan sesuai rencana	**[Rekom Berikutnya]** Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan
			Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**94,79**	**100,00**	**94,79**				
			Predikat kinerja	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**				
2.18.03	**Meningkatnya realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**25,00**	**113.919.000**	**22,58**	**112.783.951**	**90,32**	**99,00**	**[TW4 - Pendorong] meningkatnya penyebaran informasi dan inovasi**	**[Rekom Berikutnya] peningkatan pencapaian realisasi program tahun berikutnya**
2.18.03.2,01	Terlaksananya even promosi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	2,00	113.919.000	2,00	112.783.951	100,00	99,00	**[TW4 - Pendorong]** meningkatnya kualitas pelaksanaan dan strategi promosi	**[Rekom Berikutnya]** peningkatan kualitas pelaksanaan promosi tahun berikutnya
2.18.03.2,01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	2,00	113.919.000	2,00	112.783.951	100,00	99,00	**[TW4 - Pendorong]** pelaksanaan pameran sesuai rencana yang ditetapkan	**[Rekom Berikutnya]** peningkatan kualitas kegiatan pameran tahun berikutnya
			Rata-rata capaian kinerja (%)	**90,32**	**99,00**	**90,32**	**99,00**				
			Predikat kinerja	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**				
2.18.04	**Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [Poin]**	**84,00**	**346.347.000**	**90,00**	**335.865.855**	**107,14**	**96,97**	**[TW4 - Pendorong] Meningkatnya layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan**	**[Rekom Berikutnya] Peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan, termasuk peningkatan informasi perizinan dan nonperizinan melalui berbagai media**
2.18.04.2,01	Tersedianya standar pelayanan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100,00	346.347.000	100,00	335.865.855	100,00	96,97	**[TW4 - Pendorong]** SP yang ada dinlai masih relevan	**[Rekom Berikutnya]** Perlunya review dan evaluasi SP yang sudah ada
2.18.04.2,01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota [Dokumen]	5,00	54.951.000	5,00	54.001.800	100,00	98,27	**[TW4 - Pendorong]** meningkatnya kualitas pelatihan bagi umkm dengan narasumber yang kompeten	**[Rekom Berikutnya]** peningkatan kualitas pelaksanaan
2.18.04.2,01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik [Pelaku Usaha]	1.350,00	100.863.500	1.417,00	99.285.455	104,96	98,44	**[TW4 - Pendorong]** Meningkatnya sasaran layanan perizinan dan nonperizinan tidak layanan tetap namun melalui keliling dan pendampingan ke pelosok di wilayah kabupaten	**[Rekom Berikutnya]** peningkatan sasaran layanan mobile perizinan dan nonperizinan
2.18.04.2,01.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik [Pelaku Usaha]	80,00	36.290.000	64,00	32.258.500	80,00	88,89	**[TW4 - Penghambat]** Menurunnya jumlah konsultasi dan pengaduan menunjukkan perbaikan layanan dengan harapan layanan yang ada telah dipahami dan dimengerti oleh pengguna layanan	**[Rekom Berikutnya]** peningkatan pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan
2.18.04.2,01.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha [Kegiatan Usaha]	500,00	154.242.500	730,00	150.320.100	146,00	97,46	**[TW4 - Pendorong]** meningkatnya layanan perizinan persyaratan dasar yang perlu dilakukan pemantauan	**[Rekom Berikutnya]** peningkatan layanan perizinan persyaratan dasar yang dilakukan pemantauan
			Rata-rata capaian kinerja (%)	**107,14**	**96,97**	**107,14**	**96,97**				

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/Rekomendasi
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Predikat kinerja	**STS**	**ST**	**STS**	**ST**		
2.18.05	**Meningkatnya realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**10,00**	**23.853.000**	**12,80**	**23.446.750**	**128,00**	**98,30**	**[TW4 - Pendorong] meningkatnya pengendalian pelaksanaan melalui pengawasan penanaman modal baik melalui pendampingan langsung maupun daring**	**[Rekom Berikutnya] peningkatan kualitas kegiatan pengendalian pelaksanaan**
2.18.05.2,01	Tercapainya cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100,00	23.853.000	100,00	23.446.750	100,00	98,30	**[TW4 - Pendorong]** meningkatnya pengendalian pelaksanaan melalui pengawasan penanaman modal baik melalui pengawasan langsung di lapangan maupun bimbingan secara daring	**[Rekom Berikutnya]** perluasan kegiatan pengendalian pelaksanaan
2.18.05.2,01.0006		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha [Kegiatan Usaha]	60,00	23.853.000	100,00	23.446.750	166,67	98,30	**[TW4 - Pendorong]** meningkatnya pengawasan penanaman modal melalui inspeksi lapangan maupun bimbingan teknis secara daring	**[Rekom Berikutnya]** peningkatan intensitas pengawasan baik melalui inspeksi lapangan maupun daring
					Rata-rata capaian kinerja (%)	**128,00**	**98,30**	**128,00**	**98,30**		
					Predikat kinerja	**STS**	**ST**	**STS**	**ST**		
2.18.06	**Meningkatnya laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**50,00**	**105.000.000**	**100,00**	**95.861.000**	**200,00**	**91,30**	**[TW4 - Pendorong] meningkatnya penyediaan data dari berbagai sektor perizinan nonperizinan**	**[Rekom Berikutnya] peningkatan penyediaan data tahun berikutnya**
2.18.06.2,01	Penyusunan dokumen data informasi perizinan/nonperizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	50,00	105.000.000	100,00	95.861.000	200,00	91,30	**[TW4 - Pendorong]** meningkatnya pengelolaan data dan informasi dengan memaksimalkan aplikasi dan sumberdaya pendukung lainnya	**[Rekom Berikutnya]** peningkatan intergrasi pengelolaan data dan informasi
2.18.06.2,01.0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	2,00	105.000.000	8,00	95.861.000	400,00	91,30	**[TW4 - Pendorong]** meningkatnya pengolahan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi dengan memaksimalkan aplikasi dan sumberdaya pendukung lainnya	**[Rekom Berikutnya]** peningkatan pengolahan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi
					Rata-rata capaian kinerja (%)	**200,00**	**91,30**				
					Predikat kinerja	**STS**	**ST**				

Sragen, Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUGIYONO, SH
NIP. 19670708 199303 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr.Soetomo No.5 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website : http://dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN-57211

LAPORAN MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Monitoring dan evaluasi merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kinerja yang telah berlangsung di DPMPTSP Kabupaten Sragen sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah disusun.

Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada periode berikutnya.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bertujuan untuk menilai tingkat capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun pada awal Tahun Anggaran 2025. Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahanpertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode berikutnya pada tahun berjalan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025 dan dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2025.

4. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025, pada Triwulan I dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja dari rencana aksi tahunan yang telah disusun untuk Triwulan I Tahun 2025, yang memuat perkembangan progress/ kemajuan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana tugas masing-masing program, kegiatan, subkegiatan sampai dengan rincian aktivitas.

Hasil evaluasi ini selain sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja juga sekaligus dapat dijadikan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

C. HASIL YANG DICAPAI

Rencana Aksi Tahun 2025 ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang pada tabel 1.

TABEL I

RENCANA AKSI DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	Nilai investasi pada tahun n	trilyun rupiah	2.3	6,756,147,677	0.50	1.20	1.80	2.30	Kepala DPMPTSP
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	Jumlah PMA/ PMDN berdasarkan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam tahun n	investor	10,998	6,756,147,677	2,500	5.000	7.500	10,998	Kepala DPMPTSP
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**(Jumlah dokumen yang disusun/ jumlah dokumen yang seharusnya disediakan) x 100%**	**%**	**50**	**100,000,000**	**40**	**40**	**40**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	Jumlah dokumen kebijakan penanaman Modal yang disusun tahun n	**dokumen**	**1**	**100,000,000**	0	0	0	1	**Koordinator PM**

2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi tentang Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun n	dokumen	1	00,000,000	0	0	0	1	Ketua Tim Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**(Jumlah realisasi investasi dari pelaku usaha skala menengah besar/ kepeminatan usaha skala menengah besar)x100%**	**%**	**25**	**137,534,000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah even promosi [kali]**	**Jumlah event promosi penanaman modal (even) tahun n**	**kali**	**2**	**137,534,000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Koordinator PM**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota tahun n	Dokumen	2	137,534,000	0	0	1	2	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat BidangPerizinan dan Non**	IKM tahun n	**point**	**84**	**482,359,500**	**0**	**84**	**84**	**84**	**Kepala DPMPTSP**

		perizinan [poin]									
2.18.04.2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Jumlah layanan perijinan dan non perijinan yang dilengkapi dengan standart pelayanan tahun n**	**persen**	**100**	**482,359,500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Sekretaris**
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah tahun n	kegiatan usaha	150	90,000,000	0	50	100	150	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	pelaku usaha	3,200	119,992,000	800	1,600	2,400	3,200	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik tahun n	orang	80	45,000,000	20	40	60	80	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Jumlah Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha tahun n	kegiatan usaha	500	227,367,500	25	50	50	25	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	(jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM/jumlah pelaku usaha terdaftar)x100 %	**persen**	**10**	**32,000,000**	**2**	**2**	**3**	**3**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	**32,000,000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Koordinator PM**

2.18.05.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	(Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan) x 100%	kegiatan usaha	60	32,000,000	15	30	45	15	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**(Laporan yang semestinya disusun/ jumlah kewenangan) x 100%**	**persen**	**50**	**55,000,000**	**0**	**10**	**20**	**20**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**% Dokumen penyediaan data informasi tahun n**	**persen**	**50**	**55,000,000**	**0**	**10**	**20**	**20**	**Sekretaris**
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji	Dokumen tahun n	dokumen	1	55,000,000	0	0	0	1	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

		dan Dimanfaatkan [Dokumen]									
	Sasaran Penunjang:										
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (poin)	predikat	70.50		0	71	71	71	DPMPTSP
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**(Jumlah kegiatan dalam program yang dilaksanakan/ jumlah kegiatan sesuai ewenangan)x100%**	**persen**	**100.00**	**5,949,254,177**	**838,000,023**	**1,677,000,038**	**2,517,000,048**	**4,135,587,832**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.01.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n**	**dokumen**	**3.00**	**5,763,000**	**1**	**1,000,000**	**3,000,000**	**5,773,000**	**Sekretaris**
2.18.01.2,01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen perencanaan yang disusun pada tahun n	Dokumen	3.00	2,917,000	**0**	**500,000**	**1,500,000**	**2,927,000**	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	dokumen laporan capaian kinerja yang disusun pada tahun n	Laporan	1.00	2,846,000	1	500,000	1,500,000	2,846,000	Ketua Tim Kerja PEP

		Kinerja SKPD[Laporan]									
2.18.01.2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n	**bulan**	**12.00**	**3,895,270,179**	**800,000,000**	**1,600,000,000**	**2,400,000,000**	**3,895,270,179**	**Sekretaris**
2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun n	orang /bulan	25.00	3,895,270,179	800,000,000	1,600,000,000	2,400,000,000	3,895,270,179	Ketua Tim Kerja Keuangan
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**64,528,000**	**1**	**1**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah pegawai yang mengikuti diklat tahun n	orang	4.00	19,528,000	0	2	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	jumlah orang yang mengikuti bimtek tahun n	orang	30.00	45,000,000	0	30	30	30	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**bulan**	**12.00**	**520,899,600**	**38,000,014**	**76,000,027**	**114,000,033**	**234,544,635**	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan [Paket]	penyediaan paket komponen instalasi listrik tahun n	Paket	4.00	39,936,000	8,000,000	16,000,000	24,000,000	39,936,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan [Paket]	penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Paket	8.00	194,608,600	30,000,000	60,000,000	90,000,000	194,608,600	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	penyediaan paket logistik tahun n	Paket	4.00	70,415,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan [Paket]	penyediaan paket barang cetakan dan penggandaan tahun n	Paket	4.00	89,290,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	penyediaan dokumen bahan bacaan tahun n	Dokumen	1.00	7,000,000	1	2	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Jumlah laporan dinas luar daerah non kegiatan tahun n	Laporan	25.00	100,000,000	10	20	25	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Dokumen laporan penataausahaan arsip tahun n	Dokumen	1.00	19,650,000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**laporan pengadaan barang tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**96,947,000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	pengadaan kendaraan dinas tahun n	Paket	1.00	35,000,000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	paket pengadaan mebel tahun n	Unit	4.00	26,742,000	2	4	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n	Unit	28.00	35,205,000	5	5	15	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n**	**bulan**	**12.00**	**1,008,121,398**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**

2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	penyediaan jasa surat menyurat tahun n	Laporan	4.00	6,000,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik tahun n	Laporan	4.00	507,925,022	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Laporan	4.00	77,161,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pelayanan umum tahun n	Laporan	4.00	417,035,376	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**laporan pemeliharaan barang milik daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**357,725,000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun n	Unit	15.00	230,520,000	6	12	15	15	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Mebel tahun n	Unit	96.00	13,582,000	5	25	50	75	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Aset Tetgap Lainnya tahun n	Unit	1.00	18,260,000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun n	Unit	1.00	49,765,000	0	0	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tahun n	Unit	28.00	45,598,000	28	28	28	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian

TABEL 2
MONITORING EVALUASI KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Anggaran	Target Pelaksanaan Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I	Ket	Analisis Capaian		Penanggung Jawab
										Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Tujuan Strategis:** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai Investasi	trilyun rupiah	2,31	6.756.147.677	0,5	1,67	140%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA) yang dibuktikan adanya peningkatan IKM bidang perizinan. Selain peningkatan layanan bidang Investasi antara lain Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, serta pendampingan penyusunan laporan kegioatan penanaman modal. Upaya lain yang dilakukan antara lain penyusunan dokumen kebijakan bidang penanaman modal, peningkatan	Peningkatan iklim Investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.	Kepala DPMPTSP

										promosi serta penyediaan data perizinan dan nonperizinan		
1.1	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN	Investor	10.998	6.756.147.677	2.500	2.198	88%	Tuntas	Meningkatnya realisasi investasi dipengaruhui oleh jumlah PMA/PMDN yang ada di Kabuipaten Sragen. Dengan capaian realisasi investasi yang optimal, diharapkan meningkat pula jumlah PMA/PMDN. Peningkatan PMA/PMDN dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, serta kemudahan layanan antara layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA), SIPIONER (Sistem Informasi Perizinan Online Sragen) dan SI-	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.	Kepala DPMPTSP
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**%**	**50**	**100.000.000**	**10**	**10,00**	**100%**	**Tuntas**	Percepatan penyelesaian dokumen	Percepatan penyelesaian dokumen pada TW2	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	**Dokumen**	**1**	**100.000.000**	**1**	**1,00**	**100%**	**Tuntas**	Percepatan penyelesaian kegiatan	Percepatan penyelesaian kegiatan TW 2	**Koordinator PM**

2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	100.000.000	1	1,00	100%	Tuntas	Peningkatan kegiatan	Penyelesaian TW2 dan TW3	Ketua Tim Kerja Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**%**	**25**	**137.534.000**	5	**10,00**	**200%**	**Tuntas**	Peningkatan penyebaran informasi	Peningkatan penyebaran informasi melalui pameran CJIBF	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	**Kali**	**2**	**137.534.000**	**0**	**0,00**	**0%**	**Belum Tuntas**	Target pelaksanaan keikutsertaan even promosi pad aTW2 dan TW3	Pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3	**Koordinator PM**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Dokumen	2	137.534.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Target pelaksanaan keikutsertaan even promosi pad aTW2 dan TW3	Pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**Point**	**84**	**392.359.500**	**84**	**89,75**	**107%**	**Tuntas**	Peningkatan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan	Peningkatan IKM TW2	**Kepala DPMPTSP**
2.18.04.2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Persen**	**100**	**392.359.500**	**100**	**100,00**	**100%**	**Tuntas**	SP telah disusun	Peninjauan SP	**Sekretaris**
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	150	90.000.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Target pelaksanaan pad TW2 dan TW3	Pelaksanaan pad aTW2 dan TW3	Ketua Tim Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.04.2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	Pelaku usaha	1.25	119.992.000	400	402,00	100%	Tuntas	Kemudahan layanan OSS dan layanan perizinan online lainnya	Peningkatan kualitas layanan OSS dan layanan perizinan online lainnya	Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	orang	80	45.000.000	20	22,00	110%	Tuntas	Kemudahan layanan konsultasi dan pengaduan	Peningkatan kualitas layanan	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Kegiatan usaha	500	227.367.500	125	1,00	4%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**Persen**	**10**	**32.000.000**	**10**	**8,00**	**80%**	Tuntas	Pemahaman pelaku usaha atas kewajiban LKPM	Peningkatan sosialisasi LKPM melalui media sosial	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	**32.000.000**	**100**	**100,00**	**100%**	Tuntas	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Ditingkatkan pada TW2	**Koordinator PM**
2.18.05.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	60	32.000.000	15	15,00	100%	Tuntas	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Peningkatan kegiatan pada TW2	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**persen**	**50**	**55.000.000**	**10**	**10,00**	**100%**	Tuntas	Pelaksanaan sesuai yang direncanakan	Pelaksanaan agar menyesuaikan rencana	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**persen**	**50**	**55.000.000**	**10**	**10,00**	**100%**	Tuntas	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Pelaksanaan agar menyesuaikan rencana	**Sekretaris**

2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	dokumen	1	55.000.000	1	1,00	100%	Tuntas	Penyusunan sesuai rencana	Pelaksanaan agar menyesuaikan rencana	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
	Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	predikat	76,16		0,00				Anggaran kas ada di TW 2-4	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	DPMPTSP
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**persen**	**100,00**	**5.949.254.177**	**25**	**25,00**	**100%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Kepala DPMPTSP**
2.18.01.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**Dokumen**	**3,00**	**5.763.000**	**1**	**2,00**	**200%**	Tuntas	Kegiatan fisik (penyusunan dokumen) telah dilaksanakan	Realisasi keuangan	**Sekretaris**
2.18.01.2,01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen	3,00	2.917.000	1	1,00	100%	Tuntas	Kegiatan baru tahap penyusunan laporan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan]	Laporan	1,00	2.846.000	1	1,00	100%	Tuntas	Penyusunan laporan telah selesai	Pengajuan realisasi keuangan	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	**3.895.270.179**	**3**	**3,00**	**100%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**
2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan)	Orang/bulan	25,00	3.895.270.179	25	22,0	88%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Ketua Tim Kerja Keuangan
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi**	**Laporan**	**2,00**	**64.528.000**	**1**	**0,00**	**0%**	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**

		kepegawaian perangkat daerah [laporan]										
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4,00	19.528.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Orang	30,00	45.000.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilaksanakan mulai TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	**520.899.600**	**3**	**3,00**	**100%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	39.936.000	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	8,00	194.608.600	2	2,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	70.415.000	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan (Paket]	Paket	4,00	89.290.000	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	Dokumen	1,00	7.000.000	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Laporan	25,00	100.000.000	10	1,00	10%	Belum Tuntas	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan yang terlaksana akan dibayarkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Dokumen	1,00	19.650.000	1	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	**96.947.000**	**2**	**0,00**	**0%**	Belum Tuntas	Anggaran kas ada di TW2-4	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Paket	1,00	35.000.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum terlaksana	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2 dan seterusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Unit	4,00	26.742.000	2	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilaksanakan di TW2 dan seterusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Unit	28,00	35.205.000	5	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	**1.008.121.398**	**3**	**3,00**	**100%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**
2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	Laporan	4,00	6.000.000	1	1,00	100%	Tuntas	Kegiatan sudah dilaksanakan	Kegiatan akan dibayarkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	507.925.022	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	77.161.000	1	1,00	100%	Tuntas	Kegiatan sudah dilaksanakan	Kegiatan akan dibayarkan dan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	417.035.376	1	3,00	300%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	**357.725.000**	**2**	**1,00**	**50%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**

2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit]	Unit	15,00	230.520.000	6	8,00	133%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Unit	96,00	13.582.000	5	5,00	100%	Tuntas	Kegiatan belum terlaksana	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Unit	1,00	18.260.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Aset masih cukup baik berfungsi	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	1,00	49.765.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Sarana dan prasarana masih cukup baik	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	28,00	45.598.000	28	14,00	50%	Belum Tuntas	Gedung masih berfungsi cukup baik	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan 1 Tahun 2025 terdapat 15 (lima belas) rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yang perlu dilaksanakan pada periode triwulan selanjutnya, antara lain sebagaimana berikut:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring dan EvaluasiTriwulan I Tahun 2025	Tindak Lanjut	Uraian Tindak Lanjut/ Solusi	Pelaksana	Keterangan
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	Pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3	**Koordinator PM**	**Belum Tuntas**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3	Ketua Tim Promosi	Belum Tuntas
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Pelaksanaan pad aTW2 dan TW3	Ketua Tim Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Belum Tuntas
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	Kegiatan akan dilanjutkan di TW3	**Sekretaris**	Belum Tuntas
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Kegiatan akan dilaksanakan mulai TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Kegiatan yang terlaksana akan dibayarkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas

2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**	Belum Tuntas
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2 dan seterusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Kegiatan akan dilaksanakan di TW2 dan seterusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen sampai dengan triwulan I tahun 2025 ada kegiatan yang telah terlaksana dan ada yang belum terlaksana, dan diharapkan akan selesai sesuai anggaran kas

a. Capaian kinerja Tujuan 1: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tercapai **140%** atau dengan kategori **Sangat Baik**;

b. Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tercapai sebesar **88%** atau dengan kategori **Baik**;

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja triwulan I Tahun 2025, dalam kategori **Baik.** Pencapaian ini menjadi sinyal bagi DPMPTSP untuk menigkatkan capaian kinerja yang lebih baik pada Tri Wulan berikutnya. Adapun realisasi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 1.047.362.210 (15,50%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.756.147.677.

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja triwulan I Tahun 2025 Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen tidak terdapat permasalahan berarti dalam arti kinerja yang dilaksanakan sebagian besar telah mencapai target yang telah disusun sebelumnya dan yang belum mencapai realisasi kinerja pada tri wulan I akan didorong realisasi pelaksanaannya pada Tri Wulan berikutnya.

2. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

a. Penguatan dalam pencapaian realisasi penanaman modal dan PMA/ PMDN dengan pemberian kemudahan layanan perizinan berusaha.
b. Peningkatan realisasi penanaman modal dan PMA/PMD yang diharapkan mampu memberikan dampak positif pada dunia usaha dan perekonomian.
c. Peningkatan kualitas kajian sektor investasi dengan harapan menjadi pedoman bagi calon investor yang akan melakukan investasi.
d. Peningkatan kualitas promosi investasi melalui penyebran informasi potensi investasi, forum investasi, serta pameran dengan harapan mampu menjadi daya tarik calon investor.
e. Peningkatan kualitas layanan investasi dan perizinan berusaha serta pendampingan kepada calon investor, sehingga iklim investasi yang kondusif tetap terjaga.

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi mandiri atas capaian target kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan I Tahun 2025 Diharapkan kami dapat terus meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja, perjanjian kinerja, dan target kinerja Dinas DPMPTPS Kabupaten Sragen yang telah ditetapkan.

Sragen, April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr.Soetomo No.5 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website : http://dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN-57211

LAPORAN MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN II TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Monitoring dan evaluasi merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kinerja yang telah berlangsung di DPMPTSP Kabupaten Sragen sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah disusun.

Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada periode berikutnya.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bertujuan untuk menilai tingkat capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun pada awal Tahun Anggaran 2025. Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahanpertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode berikutnya pada tahun berjalan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025 dan dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2025.

4. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerjapada Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang sebelumnya telah dilaksanakan rapat internal dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja dari rencana aksi tahunan yang telah disusun untuk Triwulan II Tahun 2025, yang memuat perkembangan progress/ kemajuan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana tugas masing-masing program, kegiatan, subkegiatan sampai dengan rincian aktivitas.

Diharapkan melalui hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2025 ini selain sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja juga sekaligus dapat dijadikan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan upaya strategis serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam mencapai target kinerja di periode triwulan berikutnya.

C. Tindak Lanjut Atas Saran/ Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tri Wulan I

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan I Tahun 2025 terdapat beberapa saran/rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring dan EvaluasiTriwulan I Tahun 2025	Tindak Lanjut	Uraian Tindak Lanjut/ Solusi	Pelaksana	Keterangan
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	Pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3	**Koordinator PM**	**Ditindaklanjuti namun belum tuntas**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3	Ketua Tim Promosi	Ditindaklanjuti namun belum tuntas
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Pelaksanaan pada TW2 dan TW3	Ketua Tim Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Belum Tuntas

2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	Kegiatan akan dilanjutkan di TW3	**Sekretaris**	Ditindaklanjuti namun belum tuntas
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ditindaklanjuti namun belum tuntas
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Kegiatan akan dilaksanakan mulai TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ditindaklanjuti namun belum tuntas
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Kegiatan yang terlaksana akan dibayarkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sudah ditindaklanjuti
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sudah ditindaklanjuti
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**	Ditindaklanjuti namun belum tuntas
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2 dan seterusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ditindaklanjuti namun belum tuntas
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Kegiatan akan dilaksanakan di TW2 dan seterusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ditindaklanjuti namun belum tuntas
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sudah ditindaklanjuti sebagian

2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ditindaklanjuti namun belum tuntas
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sudah ditindaklanjuti sebagian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ditindaklanjuti namun belum tuntas

D. HASIL YANG DICAPAI

Rencana Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2025 ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang pada tabel 1.

Berdasarkan hasil pencapaian per Triwulan II Tahun 2025, realisasi capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat diuraikan sebagaimana tabel 2;

TABEL I

RENCANA AKSI DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	Nilai investasi pada tahun n	trilyun rupiah	2.3	6,756,147,677	0.50	1.20	1.80	2.30	Kepala DPMPTSP
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	Jumlah PMA/ PMDN berdasarkan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam tahun n	investor	10,998	6,756,147,677	2,500	5.000	7.500	10,998	Kepala DPMPTSP
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**(Jumlah dokumen yang disusun/ jumlah dokumen yang seharusnya disediakan) x 100%**	**%**	**50**	**100,000,000**	**40**	**40**	**40**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	Jumlah dokumen kebijakan penanaman Modal yang disusun tahun n	**dokumen**	**1**	**100,000,000**	0	0	0	1	**Koordinator PM**

2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi tentang Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun n	dokumen	1	00,000,000	0	0	0	1	Ketua Tim Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**(Jumlah realisasi investasi dari pelaku usaha skala menengah besar/ kepeminatan usaha skala menengah besar)x100%**	**%**	**25**	**137,534,000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah even promosi [kali]**	**Jumlah event promosi penanaman modal (even) tahun n**	**kali**	**2**	**137,534,000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Koordinator PM**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota tahun n	Dokumen	2	137,534,000	0	0	1	2	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat BidangPerizinan dan Non**	IKM tahun n	**point**	**84**	**482,359,500**	**0**	**84**	**84**	**84**	**Kepala DPMPTSP**

		perizinan [poin]									
2.18.04.2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Jumlah layanan perijinan dan non perijinan yang dilengkapi dengan standart pelayanan tahun n**	**persen**	**100**	**482,359,500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Sekretaris**
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah tahun n	dokumen	5	90,000,000	0	2	5	5	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	pelaku usaha	1,320	119,992,000	400	800	1,100	1,320	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik tahun n	orang	80	45,000,000	20	40	60	80	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Jumlah Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha tahun n	kegiatan usaha	500	227,367,500	125	250	375	500	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	(jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM/jumlah pelaku usaha terdaftar)x100 %	**persen**	**10**	**32,000,000**	**8**	**9**	**10**	**10**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	**32,000,000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Koordinator PM**

2.18.05.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	(Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan) x 100%	kegiatan usaha	60	32,000,000	15	30	45	60	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**(Laporan yang semestinya disusun/ jumlah kewenangan) x 100%**	**persen**	**50**	**55,000,000**	**0**	**10**	**30**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**% Dokumen penyediaan data informasi tahun n**	**persen**	**50**	**55,000,000**	**0**	**10**	**30**	**50**	**Sekretaris**
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji	Dokumen tahun n	dokumen	1	55,000,000	0	0	1	1	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

		dan Dimanfaatkan [Dokumen]									
	Sasaran Penunjang:										
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (poin)	predikat	70.50		0	0	0	80,45	DPMPTSP
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**(Jumlah kegiatan dalam program yang dilaksanakan/ jumlah kegiatan sesuai ewenangan)x100%**	**persen**	**100.00**	**5,949,254,177**	**25**	**50**	**75**	**100**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.01.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n**	**dokumen**	**3.00**	**5,763,000**	**1**	**2**	**3**	**3**	**Sekretaris**
2.18.01.2,01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen perencanaan yang disusun pada tahun n	Dokumen	3.00	2,917,000	**1**	**2**	**3**	**3**	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	dokumen laporan capaian kinerja yang disusun pada tahun n	Laporan	1.00	2,846,000	1	1	1	1	Ketua Tim Kerja PEP

		Kinerja SKPD[Laporan]									
2.18.01.2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n	**bulan**	**12.00**	**3,895,270,179**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun n	orang /bulan	25.00	3,895,270,179	25	25	25	25	Ketua Tim Kerja Keuangan
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**64,528,000**	**1**	**1**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah pegawai yang mengikuti diklat tahun n	orang	4.00	19,528,000	0	2	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	jumlah orang yang mengikuti bimtek tahun n	orang	30.00	45,000,000	0	30	30	30	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**bulan**	**12.00**	**520,899,600**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan [Paket]	penyediaan paket komponen instalasi listrik tahun n	Paket	4.00	39,936,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan [Paket]	penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Paket	8.00	194,608,600	1	3	4	8	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	penyediaan paket logistik tahun n	Paket	4.00	70,415,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan [Paket]	penyediaan paket barang cetakan dan penggandaan tahun n	Paket	4.00	89,290,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	penyediaan dokumen bahan bacaan tahun n	Dokumen	1.00	7,000,000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Jumlah laporan dinas luar daerah non kegiatan tahun n	Laporan	25.00	100,000,000	5	10	15	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Dokumen laporan penataausahaan arsip tahun n	Dokumen	1.00	19,650,000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**laporan pengadaan barang tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**96,947,000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	pengadaan kendaraan dinas tahun n	Paket	1.00	35,000,000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	paket pengadaan mebel tahun n	Unit	4.00	26,742,000	2	4	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n	Unit	28.00	35,205,000	5	5	15	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n**	**bulan**	**12.00**	**1,008,121,398**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**

2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	penyediaan jasa surat menyurat tahun n	Laporan	4.00	6,000,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik tahun n	Laporan	4.00	507,925,022	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Laporan	4.00	77,161,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pelayanan umum tahun n	Laporan	4.00	417,035,376	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**laporan pemeliharaan barang milik daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**357,725,000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun n	Unit	15.00	230,520,000	6	12	15	15	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Mebel tahun n	Unit	96.00	13,582,000	5	25	50	75	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Aset Tetgap Lainnya tahun n	Unit	1.00	18,260,000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun n	Unit	1.00	49,765,000	0	0	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tahun n	Unit	28.00	45,598,000	28	28	28	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian

TABEL 2
MONITORING EVALUASI KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Anggaran	Target Pelaksanaan Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II	Ket	Analisis Capaian		Penanggung Jawab
										Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Tujuan Strategis:** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai Investasi	trilyun rupiah	2,31	6.756.147.677	1.2	1.1	91.67%	Belum Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA) yang dibuktikan adanya peningkatan IKM bidang perizinan. Selain peningkatan layanan bidang investasi antara lain Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, serta pendampingan penyusunan laporan kegioatan penanaman modal. Namun dengan kondisi tersebut perlu lebih ditingkatkan layanan investasi bagi para investor	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.	Kepala DPMPTSP

1.1	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN	Investor	10.998	6.756.147.677	5000	3863	77.26%	Belum Tuntas	Meningkatnya realisasi investasi dipengaruhui oleh jumlah PMA/PMDN yang ada di Kabuipaten Sragen. Peningkatan /penurunan PMA/PMDN dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, serta kemudahan layanan antara layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA), SIPIONER (Sistem Informasi Perizinan Online Sragen) dan Si-Pelangi (Sistem Informasi Peluang Investasi) pendampingan penyusunan LKPM.	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.	Kepala DPMPTSP
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**%**	**50**	**100.000.000**	**10**	**30**	300.00%	**Tuntas**	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana	Penyelesaian kegiatan pada TW3	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	**Dokumen**	**1**	**100.000.000**	**1**	**1,00**	**100%**	**Tuntas**	Peningkatan penyelesaian kegiatan pada TW3	Peningkatan penyelesaian kegiatan dan realisasi keuangan	**Koordinator PM**
2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	100.000.000	1	1,00	100%	Tuntas	Dokumen Raperda di DPRD	Pengesahan dam kesepakatan dengan DPRD	Ketua Tim Kerja Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**%**	**25**	**137.534.000**	10	**14,80**	**148%**	**Tuntas**	Meningkatnya penyebaran informasi	Pelaksanaan even promosi pada TW3	**Kepala DPMPTSP**

2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	**Kali**	**2**	**137.534.000**	**0**	**1,00**	**0%**	**Belum Tuntas**	Rencana kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	**Koordinator PM**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Dokumen	2	137.534.000	0	1,00	0%	Belum Tuntas	Rencana kegiatan sesuai jadwal dan ditetapkan	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**Point**	**84**	**392.359.500**	**84**	**87,75**	**105%**	**Tuntas**	Adanya sistem baru yang belum dipahami Masyarakat (SIPIPO beralih ke SIPIONER)	Sosialisasi secara elektronik melalui medsos secara rutin	**Kepala DPMPTSP**
2.18.04.2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Persen**	**100**	**392.359.500**	**100**	**100,00**	**100%**	**Tuntas**	Peninjauan SP menjadi salah prioritas	Pelaksanaan FKP	**Sekretaris**
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	150	90.000.000	50	67,00	134%	Tuntas	Minat pelaku usaha sangat tinggi untuk mengikuti pelatihan	Meningkatkan kualitas pelatihan bagi UMKM	Ketua Tim Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.04.2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	Pelaku usaha	1.25	119.992.000	800	968,00	121%	Tuntas	Peningkatan layanan mobile (layanan bergerak)	Peningkatan layanan	Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	orang	80	45.000.000	40	00,00	0%	Belum Tuntas	Konsultasi yang tidak tercatat	Peningkatan dokumentasi dalam kegiatan	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan

2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Kegiatan usaha	500	227.367.500	50	170,00	340%	Tuntas	Obyek pemantauan bidang perizinan berusaha yang kurang memadai	Peningkatan sosialisasi bidang perizinan berusaha	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**Persen**	**10**	**32.000.000**	**2**	**26,00**	**1300%**	Tuntas	Peningkatan layanan melalui daring dan kelas online	Peningkatan layanan melalui daring dan luring	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	**32.000.000**	**100**	**0,00**	**0%**	Belum Tuntas	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan yang tepat sasaran	Peningkatan pengendalian pelaksanaan	**Koordinator PM**
2.18.05.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	60	32.000.000	30	74,00	247%	Tuntas	Peningkatan pengawasan melalui daring	Peningkatan capaian kinerja	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**persen**	**50**	**55.000.000**	**10**	**0,00**	**0%**	Belum Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Melaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**persen**	**50**	**55.000.000**	**10**	**0,00**	**0%**	Belum Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan	**Sekretaris**
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	dokumen	1	55.000.000	0	1,00	0%	Belum Tuntas	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

		Dimanfaatkan [Dokumen]										
	Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	predikat	76,16		0,00	-	-	-	-	-	DPMPTSP
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**persen**	**100,00**	**5.949.254.177**	**50**	**50,00**	**100%**	Tuntas	-	-	**Kepala DPMPTSP**
2.18.01.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**Dokumen**	**3,00**	**5.763.000**	**2**	**2,00**	**100%**	Tuntas	Kegiatan fisik telah Sebagian dilaksanakan	Penyusunan akan dilaksanakan sesuai jadwal rencana	**Sekretaris**
2.18.01.2,01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen	3,00	2.917.000	2	2,00	100%	Tuntas	Laporan awal telah disusun	Penyelesaian dokumen disesuaikan rencana	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan]	Laporan	1,00	2.846.000	1	1,00	100%	Tuntas	Kegiatan monitoring dilaksanakan pada TW berikutnya	Penyelesaian dilaksanakan sesuai rencana	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	**3.895.270.179**	**6**	**8,00**	**133%**	Tuntas	Pelaksanaan sesuai anggaran kas	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana	**Sekretaris**
2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan)	Orang/bulan	25,00	3.895.270.179	25	28,00	112%	Tuntas	Pencairan sesuai anggaran kas	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan	Ketua Tim Kerja Keuangan
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	**64.528.000**	**1**	**0,00**	**0%**	Belum Tuntas	Adanya pergeseran anggaran akibat kebijakan efisiensi	Rencana kegiatan pada TW3	**Sekretaris**

2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4,00	19.528.000	2	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan dilakukan pergeseran	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Orang	30,00	45.000.000	30	0,00	0%	Belum Tuntas	Rencana pelaksanaan kegiatan pada TW3	Kegiatan disesuaikan dengan rencana	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	**520.899.600**	**6**	**6,00**	**100%**	Tuntas	Sebagian kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana	Peningkatan realisasi keuangan pada TW3	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	39.936.000	2	2,00	100%	Tuntas	Kegiatan fisik telah dilaksanakan	Peningkatan pencairan keuangan pada TW3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	8,00	194.608.600	4	4,00	100%	Tuntas	Kegiatan fisik sebagian telah dilaksanakan	Peningkatan realisasi keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	70.415.000	2	2,00	100%	Tuntas	Kegiatan sesuai rencana	Peningkatan keuangan pada TW3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan (Paket]	Paket	4,00	89.290.000	2	2,00	100%	Tuntas	Realisasi kegiatan fisik telah	Peningkatan kegiatan dan realisasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	Dokumen	1,00	7.000.000	2	1,00	50%	Belum Tuntas	Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Laporan	25,00	100.000.000	20	10,00	50%	Belum Tuntas	Sebagian kegiatan telah dilaksanakan	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Dokumen	1,00	19.650.000	1	1,00	100%	Tuntas	Kegiatan fisik telah dilaksanakan	Pengajuan pencairan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	**96.947.000**	**2**	**0,00**	**0%**	Belum Tuntas	Pelaksanaan pengadaan	Pelaksanaan kegiatan pada TW3	**Sekretaris**

2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Paket	1,00	35.000.000	1	0,00	0%	Belum Tuntas	Pelaksanaan kegiatan menunggu ketersediaan barang di E-Catalog	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Unit	4,00	26.742.000	4	0,00	0%	Belum Tuntas	menunggu ketersediaan barang di E-Catalog	Dilaksanakan pada TW3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Unit	28,00	35.205.000	5	0,00	0%	Belum Tuntas	Rencana kegiatan dilakukan pergeseran	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	**1.008.121.398**	**6**	**6,00**	**100%**	Tuntas	Sebagian kegiatan secara fisik telah dilaksanakan sesuai jadwal	Peningkatan realisasi kegiatan dan keuangan pada TW3	**Sekretaris**
2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	Laporan	4,00	6.000.000	2	2,00	100%	Tuntas	Kegiatan fisik telah dilaksanakan	Peningkatan realisasi keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	507.925.022	2	2,00	100%	Tuntas	Kegiatan sesuai rencana	Peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	77.161.000	2	2,00	100%	Tuntas	Kegiatan fisik telah dilaksanakan	Peningkatan realisasi keuangan pada TW3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	417.035.376	2	6,00	300%	Tuntas	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Peningkatan realisasi kegiatan dan keuangan sesuai rencana	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	**357.725.000**	**2**	**2,00**	**100%**	Tuntas	Sebagian besar kegiatan fisik telah dilaksanakan	Peningkatan realisasi kegiatan dan keuangan pada TW3	**Sekretaris**
2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	15,00	230.520.000	12	16,00	133%	Tuntas	Pelaksanaan pemeliharaan sesuai rencana	Peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan berdasarkan prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Unit	96,00	13.582.000	25	20,00	80%	Tuntas	Mebel masih cukup baik	Pemeliharaan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Unit	1,00	18.260.000	1	1,00	100%	Tuntas	Aset masih cukup layak fungsi	Pemeliharaan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	1,00	49.765.000	0	1,00	0%	Belum Tuntas	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	28,00	45.598.000	28	14,00	50%	Belum Tuntas	Kondisi Gedung masih cukup baik	Perbaikan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2025 terdapat 20 (dua puluh) rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yang perlu dilaksanakan pada periode triwulan selanjutnya, antara lain sebagaimana berikut:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025	Indikator	Pelaksana	Uraian Tindak Lanjut/ Solusi	Keterangan
1	**Tujuan Strategis:** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai Investasi	Kepala DPMPTSP	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.	Belum Tuntas
1.1	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN	Kepala DPMPTSP	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.	Belum Tuntas
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	**Koordinator PM**	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	**Belum Tuntas**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Ketua Tim Promosi	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Belum Tuntas
2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan	Peningkatan dokumentasi dalam kegiatan	Belum Tuntas

2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**Koordinator PM**	Peningkatan pengendalian pelaksanaan	Belum Tuntas
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**Kepala DPMPTSP**	Melaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan	Belum Tuntas
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**Sekretaris**	Peningkatan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan	Belum Tuntas
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan	Belum Tuntas
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Sekretaris**	Rencana kegiatan pada TW3	Belum Tuntas
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas	Belum Tuntas
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kegiatan disesuaikan dengan rencana	Belum Tuntas
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3	Belum Tuntas
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3	Belum Tuntas
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**Sekretaris**	Pelaksanaan kegiatan pada TW3	Belum Tuntas

2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Belum Tuntas
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dilaksanakan pada TW3	Belum Tuntas
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Belum Tuntas
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan	Belum Tuntas
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Perbaikan sesuai prioritas	Belum Tuntas

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen sampai dengan triwulan II tahun 2025 ada kegiatan yang telah terlaksana dan ada yang belum terlaksana, dan diharapkan akan selesai sesuai dengan rencana.

a. Capaian kinerja Tujuan 1: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tercapai **91,67%** atau dengan kategori **Baik**;
b. Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tercapai sebesar **77,26%** atau dengan kategori **Cukup**;

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan rata-rata sebesar 109%, dalam kategori **Sangat Baik.** Pencapaian tujuan dan sasaran ini sangat penting untuk diperhatikan dalam menigkatkan capaian kinerja yang lebih baik pada Tri Wulan berikutnya. Adapun realisasi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 1.978.820.138 (31,90%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.204.072.681.

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja triwulan II Tahun 2025 Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen masih cukup baik secara rata-rata, namun terdapat permasalahan cukup berarti dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran OPD yang belum mencapai target kinerja pada tri wulan II ini. Dengan demimikian pentingnya mendorong pencapaian kinerja pada Tri Wulan berikutnya.

2. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

a. Penguatan dalam pencapaian realisasi penanaman modal dan PMA/ PMDN dengan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal agar segera diselesaikan.

b. Peningkatan realisasi penanaman modal dan PMA/PMD yang diharapkan mampu memberikan dampak positif pada dunia usaha dan perekonomian.
c. Peningkatan kualitas promosi investasi melalui penyebran informasi potensi investasi, forum investasi, serta pameran dengan harapan mampu menjadi daya tarik calon investor.
d. Peningkatan kualitas layanan investasi dan perizinan berusaha serta pendampingan kepada pelaku usaha umkm, fasilitasi perizinan, sehingga iklim investasi yang kondusif tetap terjaga.
e. Peningkatan realisasi LKPM bagi pelaku usaha baik pelaku usaha menengah besar mapun UMKM.

F. PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi mandiri atas capaian target kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2025 Diharapkan kami dapat terus meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja, perjanjian kinerja, dan target kinerja Dinas DPMPTPS Kabupaten Sragen yang telah ditetapkan.

Sragen, Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr.Soetomo No.5 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website : http://dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN-57211

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TRIWULAN III TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Monitoring dan evaluasi merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kinerja yang telah berlangsung di DPMPTSP Kabupaten Sragen sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah disusun.

Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada periode berikutnya.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bertujuan untuk menilai tingkat capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun pada awal Tahun Anggaran 2025. Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahanpertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode berikutnya pada tahun berjalan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025 dan dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2025.

4. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerjapada Triwulan III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang sebelumnya telah dilaksanakan rapat internal dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja dari rencana aksi tahunan yang telah disusun untuk Triwulan III Tahun 2025, yang memuat perkembangan progress/ kemajuan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana tugas masing-masing program, kegiatan, subkegiatan sampai dengan rincian aktivitas.

Diharapkan melalui hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Triwulan III Tahun 2025 ini selain sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja juga sekaligus dapat dijadikan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan upaya strategis serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam mencapai target kinerja di periode triwulan berikutnya.

2. Tindak Lanjut Atas Saran/ Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tri Wulan II

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2025 terdapat beberapa saran/rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025	Indikator	Pelaksana	Uraian Tindak Lanjut/ Solusi	Keterangan
1	**Tujuan Strategis:** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai Investasi	Kepala DPMPTSP	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.	Telah ditindaklanjuti

1.1	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN	Kepala DPMPTSP	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.	Telah ditindaklanjuti
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	**Koordinator PM**	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Ketua Tim Promosi	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan	Peningkatan dokumentasi dalam kegiatan	Telah ditindaklanjuti
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**Koordinator PM**	Peningkatan pengendalian pelaksanaan	Telah ditindaklanjuti
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**Kepala DPMPTSP**	Melaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan	Telah ditindaklanjuti
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**Sekretaris**	Peningkatan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan	Telah ditindaklanjuti
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan	Telah ditindaklanjuti, namun belum tuntas

2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Sekretaris**	Rencana kegiatan pada TW3	Telah ditindaklanjuti, namun belum tuntas
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas	Telah ditindaklanjuti, namun belum tuntas
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kegiatan disesuaikan dengan rencana	Telah ditindaklanjuti, namun belum tuntas
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**Sekretaris**	Pelaksanaan kegiatan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dilaksanakan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Perbaikan sesuai prioritas	Telah ditindaklanjuti

Dari 20 (dua puluh tiga) saran/ rekomendasi pada Tri Wulan II, 14 (enam belas) saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan tuntas sesuai target Tri Wulan III, sedangkan sisanya, telah ditindaklanjuti namun belum tuntas sesuai target yang ditetapkan.

C. HASIL YANG DICAPAI

Rencana Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2025 ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang pada tabel 1.

Berdasarkan hasil pencapaian per Triwulan III Tahun 2025, realisasi capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat diuraikan sebagaimana tabel 2;

TABEL I

RENCANA AKSI DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	**Tujuan Strategis :** Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan Investasi	jumlah investasi tahun n ((n - (n-1)/ (n-1))x100%	persen	4,27	6.099.227.936	0	0	0	4,27	Kepala DPMPTSP
1.1	**Sasaran Strategis.1 :** Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat bidang perizinan dan nonperizinan berdasarkan PermenPAN No. 14 Tahun 2017	Predikat IKM	Sangat Baik	451.347.000	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Kepala DPMPTSP
1.2	**Sasaran Strategis.2 :** Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan kegiatan usaha	jumlah kegiatan usaha tahun n ((n - (n-1)/ (n-1)) x 100%	persen	4,27	237.772.000	0	0	0	4,27	Kepala DPMPTSP
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**(Jumlah dokumen yang disusun/ jumlah dokumen yang seharusnya disediakan) x 100%**	**%**	**50**	**100,000,000**	**40**	**40**	**40**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	Jumlah dokumen kebijakan penanaman Modal yang disusun tahun n	**dokumen**	**1**	**100,000,000**	0	0	0	1	**Koordinator PM**

2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi tentang Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun n	dokumen	1	100,000,000	0	0	0	1	Ketua Tim Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**(Jumlah realisasi investasi dari pelaku usaha skala menengah besar/ kepeminatan usaha skala menengah besar)x100%**	**%**	**25**	**113.919.000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah even promosi [kali]**	**Jumlah event promosi penanaman modal (even) tahun n**	**kali**	**2**	**113.919.000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Koordinator PM**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota tahun n	Dokumen	2	113.919.000	0	0	1	2	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat BidangPerizinan dan Non perizinan [poin]**	IKM tahun n	**point**	**84**	**346.347.000**	**0**	**84**	**84**	**84**	**Kepala DPMPTSP**

2.18.04.2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Jumlah layanan perijinan dan non perijinan yang dilengkapi dengan standart pelayanan tahun n**	**persen**	**100**	**346.347.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Sekretaris**
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah tahun n	dokumen	5	54.951.000	0	2	5	5	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	pelaku usaha	1,320	100.863.500	400	800	1,100	1,320	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik tahun n	Pelaku usaha	80	36.290.000	20	40	60	80	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha tahun n	kegiatan usaha	500	154.242.500	125	250	375	500	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	(jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM/jumlah pelaku usaha terdaftar)x100%	**persen**	**10**	**23.853.000**	**8**	**9**	**10**	**10**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	**23.853.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Koordinator PM**

2.18.05.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	(Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan) x 100%	kegiatan usaha	60	23.853.000	15	30	45	60	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**(Laporan yang semestinya disusun/ jumlah kewenangan) x 100%**	**persen**	**50**	**105,000,000**	**0**	**10**	**30**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**% Dokumen penyediaan data informasi tahun n**	**persen**	**50**	**105,000,000**	**0**	**10**	**30**	**50**	**Sekretaris**
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	Dokumen tahun n	dokumen	1	**105,000,000**	0	0	1	1	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (poin)	predikat	70.50		0	0	0	80,45	DPMPTSP

2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**(Jumlah kegiatan dalam program yang dilaksanakan/ jumlah kegiatan sesuai ewenangan)x100 %**	**persen**	**100.00**	**5.410.108.936**	**25**	**50**	**75**	**100**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.01.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n**	**dokumen**	**3.00**	**3.943.000**	**1**	**2**	**3**	**3**	**Sekretaris**
2.18.01.2,01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen perencanaan yang disusun pada tahun n	Dokumen	3.00	2.263.000	**1**	**2**	**3**	**3**	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD[Laporan]	dokumen laporan capaian kinerja yang disusun pada tahun n	Laporan	1.00	1.680.000	1	1	1	1	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n	**bulan**	**12.00**	**3.740.425.434**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun n	orang /bulan	25.00	3.740.425.434	25	25	25	25	Ketua Tim Kerja Keuangan

		Tunjangan ASN [Orang/bulan]									
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**16.580.000**	**1**	**1**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	jumlah orang yang mengikuti bimtek tahun n	orang	30.00	**16.580.000**	0	30	30	30	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah]**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**bulan**	**12.00**	**367.538.200**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket komponen instalasi listrik tahun n	Paket	4.00	32.326.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Paket	8.00	161.018.200	1	3	4	8	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	penyediaan paket logistik tahun n	Paket	4.00	48.204.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan	penyediaan paket barang cetakan dan penggandaan tahun n	Paket	4.00	45.540.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	penyediaan dokumen bahan bacaan tahun n	Dokumen	1.00	7,000,000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan dinas luar daerah non kegiatan tahun n	Laporan	25.00	63.450.000	5	10	15	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen laporan penataausahaan arsip tahun n	Dokumen	1.00	10.000.000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah**	**laporan pengadaan barang tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**154.249.000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	pengadaan kendaraan dinas tahun n	Paket	1.00	35,000,000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	paket pengadaan mebel tahun n	Unit	4.00	74.945.000	2	4	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n	Unit	28.00	44.304.000	5	5	15	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n**	**bulan**	**12.00**	**839.795.302**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	penyediaan jasa surat menyurat tahun n	Laporan	4.00	2.400.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik tahun n	Laporan	4.00	443.662.922	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Laporan	4.00	50.854.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pelayanan umum tahun n	Laporan	4.00	342.878.380	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**laporan pemeliharaan barang milik daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	287.578.000	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**

2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun n	Unit	15.00	169.130.000	6	12	15	15	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Mebel tahun n	Unit	96.00	11.552.000	5	25	50	75	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Aset Tetgap Lainnya tahun n	Unit	1.00	9.282.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun n	Unit	1.00	71.289.543	0	0	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tahun n	Unit	28.00	26.324.457	28	28	28	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian

TABEL 2
MONITORING EVALUASI KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Anggaran	Realisai Anggaran	Tingkat Capaian	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Ket	Analisis Capaian		Penanggung Jawab
												Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Tujuan Strategis :** Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan Investasi	persen	4,27	6.099.227.936	5.528.177.237	90,64%	4,27	4,29	100,46 %	Tuntas	**[Pendorong]** Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan OSS-RBA yang dibuktikan adanya peningkatan IKM bidang perizinan. Selain peningkatan layanan bidang investasi antara lain Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, serta pendampingan penyusunan laporan kegioatan penanaman modal.	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.	Kepala DPMPTSP
1,1	**Sasaran Strategis.1 :** Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	predikat	Sangat Baik	451.347.000	431.726.855	95,65%	Sangat Baik (89,56)	Sangat Baik (90,00)	100,49 %	Tuntas	Meningkatnya layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan	Peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan, termasuk peningkatan informasi	Kepala DPMPTSP

													perizinan dan nonperizinan melalui berbagai media	
1.2	**Sasaran Strategis.2 :** Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan kegiatan usaha	persen	4,27	237.772.000	231.023.101	97,16%	4,27	4,74	111%	Tuntas	**[Pendorong]** realisasi investasi dipengaruhi oleh jumlah PMA/PMDN dan capaian realisasi investasi yang optimal, diharapkan meningkat pula jumlah PMA/PMDN. Namun peningkatan PMA/PMDN tidak mutlak berbanding lurus dengan meningkatnya realisasi investasi. Hal ini bisa terjadi karena tingkat investasi masing-masing investor tidak sama. Ada kategori nilai investasi besar dari investor yang relatif sedikit. Sebaliknya terdapat kategori nilai investasi kecil/sedang namun dengan jumlah investor yang banyak.	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**%**	**50**	**100.000.000**	**94.792.400**	**94,79%**	**50**	**50**	100,00 %	**Tuntas**	**Realisasi program sesuai target**	**Peningkatan kualitas pelaksanaan**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	**Dokumen**	**1**	**100.000.000**	**94.792.400**	**94,79%**	**1**	**1**	100,00 %	**Tuntas**	**Realisasi kegiatan sesuai target**	**Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan**	**Koordinator PM**

2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	100.000.000	**94.792.400**	**94,79%**	1,00	1,00	100,00 %	Tuntas	Penyelesaian kegiatan sesuai rencana	Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan	Ketua Tim Kerja Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**%**	**25**	**113.919.000**	112.783.951	99,00%	25,00	**22,58**	90,32 %	**Belum Tuntas**	**meningkatnya penyebaran informasi dan inovasi**	**peningkatan pencapaian realisasi program tahun berikutnya**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	**Kali**	**2**	113.919.000	112.783.951	99,00%	**2,00**	**2,00**	100,00 %	**Tuntas**	**meningkatnya kualitas pelaksanaan dan strategi promosi**	**peningkatan kualitas pelaksanaan promosi tahun berikutnya**	**Koordinator PM**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Dokumen	2	113.919.000	112.783.951	99,00%	2	2,00	100,00 %	**Tuntas**	pelaksanaan pameran sesuai rencana yang ditetapkan	peningkatan kualitas kegiatan pameran tahun berikutnya	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**Point**	**84**	**346.347.000**	**335.865.855**	**96,97%**	**84,00**	**90,00**	107,14 %	**Tuntas**	**Meningkatnya layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan**	**Peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan, termasuk peningkatan informasi perizinan dan nonperizinan melalui berbagai media**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.04.2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Persen**	**100**	346.347.000	**335.865.855**	**96,97%**	**100,00**	**100,00**	100,00 %	**Tuntas**	**SP yang ada dinlai masih relevan**	**Perlunya review dan evaluasi SP yang sudah ada**	**Sekretaris**
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	5	54.951.000	54.001.800	98,27%	5	5,00	100,00 %	Tuntas	meningkatnya kualitas pelatihan bagi umkm dengan narasumber yang kompeten	peningkatan kualitas pelaksanaan	Ketua Tim Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

2.18.04.2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	Pelaku usaha	1350	100.863.500	99.285.455	98,44%	1350	2.321	171,93 %	Tuntas	Meningkatnya sasaran layanan perizinan dan nonperizinan tidak layanan tetap namun melalui keliling dan pendampingan ke pelosok di wilayah kabupaten	peningkatan sasaran layanan mobile perizinan dan nonperizinan	Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	orang	80	36.290.000	32.258.500	88,89%	80	64,00	80,00 %	Belum Tuntas	Menurunnya jumlah konsultasi dan pengaduan menunjukkan perbaikan layanan dengan harapan layanan yang ada telah dipahami dan dimengerti oleh pengguna layanan	peningkatan pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Kegiatan usaha	500	154.242.500	150.320.100	97,46%	500	730,00	146,00 %	Tuntas	meningkatnya layanan perizinan persyaratan dasar yang perlu dilakukan pemantauan	peningkatan layanan perizinan persyaratan dasar yang dilakukan pemantauan	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**Persen**	**10**	**23.853.000**	**23.446.750**	**98,30%**	**10**	**12,80**	128,00 %	Tuntas	**meningkatnya pengendalian pelaksanaan melalui pengawasan penanaman modal baik melalui pendampingan langsung maupun daring**	**peningkatan kualitas kegiatan pengendalian pelaksanaan**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	23.853.000	**23.446.750**	**98,30%**	**100**	**100,00**	100,00 %	Tuntas	**meningkatnya pengendalian pelaksanaan melalui pengawasan penanaman**	**perluasan kegiatan pengendalian pelaksanaan**	**Koordinator PM**

												modal baik melalui pengawasan langsung di lapangan maupun bimbingan secara daring		
2.18.0.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	60	23.853.000	**23.446.750**	**98,30%**	60	100,00	166,67 %	Tuntas	meningkatnya pengawasan penanaman modal melalui inspeksi lapangan maupun bimbingan teknis secara daring	peningkatan intensitas pengawasan baik melalui inspeksi lapangan maupun daring	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**persen**	**50**	**105.000.000**	**95.861.000**	**91,30%**	**50**	**50,00**	100,00 %	Tuntas	**meningkatnya penyediaan data dari berbagai sektor perizinan nonperizinan**	**peningkatan penyediaan data tahun berikutnya**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**persen**	**50**	105.000.000	**95.861.000**	**91,30%**	**50**	**50,00**	100,00 %	Tuntas	**meningkatnya pengelolaan data dan informasi dengan memaksimalkan aplikasi dan sumberdaya pendukung lainnya**	**peningkatan intergrasi pengelolaan data dan informasi**	**Sekretaris**
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	dokumen	2	105.000.000	**95.861.000**	**91,30%**	2	8,00	400,00 %	Tuntas	meningkatnya pengolahan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi dengan memaksimalkan aplikasi dan sumberdaya pendukung lainnya	peningkatan pengolahan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
	Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	predikat	76,16	**5.410.108.936**	5.528.177.237	90,64%	80,45	80,45	100,00 %	Tuntas	-	-	Kepala DPMPTSP
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	86,00	**5.410.108.936**	5.528.177.237	90,64%	86,00	86,60	100,69 %	Tuntas	Meningkatnya layanan umum yang	Peningkatan layanan umum antara lain	Kepala DPMPTSP

												dilaksananakn oleh Perangkat Daerah	layanan administrasi maupun layanan informasi lainnya. Termasuk dalam layanan ini fasilitas dan sarana gedung di MPP	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**persen**	**100,00**	**5.410.108.936**	**4.865.427.281**	89,93%	**100**	**100,00**	100,00 %	Tuntas	-	-	**Kepala DPMPTSP**
		Nilai/Kategori PKO	**Nilai /Kategori**	**98,50**	**5.410.108.936**	**4.865.427.281**	89,93%	**98,50**	**98,50**	100%	Tuntas			**Kepala DPMPTSP**
2.18.01 .2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**Dokumen**	**3,00**	3.943.000	**2.370.500**	**60,12%**	**4**	**4,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Penyusunan akan dilaksanakan sesuai jadwal rencana	**Sekretaris**
2.18.01 .2,01.0 5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen	3,00	2.263.000	1.455.500	64,32%	3	3,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Penyelesaian dokumen disesuaikan rencana	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01 .2,01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan]	Laporan	1,00	1.680.000	915.000	54,46%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Penyelesaian dilaksanakan sesuai rencana	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01 .2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	3.740.425.434	**3.325.782.503**	**88,91%**	**12**	**12,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana	**Sekretaris**
2.18.01 .2,02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan)	Orang/bulan	25,00	3.740.425.434	3.325.782.503	88,91%	25	28,00	112,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan	Ketua Tim Kerja Keuangan
2.18.01 .2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian**	**Laporan**	**1,00**	16.580.000	**13.825.000**	**83,38%**	**1**	**1,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Rencana kegiatan pada TW4	**Sekretaris**

		perangkat daerah [laporan]												
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Orang	30,00	16.580.000	**13.825.000**	**83,38%**	30	30,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Kegiatan disesuaikan dengan rencana	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	367.538.200	**343.012.809**	**93,33%**	**12**	**12,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Peningkatan realisasi keuangan pada TW4	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	32.326.000	31.783.000	98,32%	3	3,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah dilaksanakan	Peningkatan pencairan keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	8,00	161.018.200	153.138.550	95,11%	8	8,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik sebagian telah dilaksanakan	Peningkatan realisasi keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	48.204.000	45.369.000	94,12%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai rencana	Peningkatan keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan (Paket]	Paket	4,00	45.540.000	44.010.000	96,64%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Realisasi kegiatan fisik telah	Peningkatan kegiatan dan realisasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	Dokumen	1,00	7.000.000	7.000.000	100,00 %	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Laporan	25,00	63.450.000	51.712.259	81,50%	25	32,00	128,00 %	Tuntas	Sebagian kegiatan telah dilaksanakan	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Dokumen	1,00	10.000.000	10.000.000	100,00 %	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah dilaksanakan	Pengajuan pencairan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	154.249.000	**150.948.897**	**97,86%**	**1**	**1,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran	**Sekretaris**

2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Paket	1,00	35.000.000	34.113.650	97,47%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai target	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Unit	4,00	74.945.000	73.827.997	98,51%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Unit	28,00	44.304.000	43.007.250	97,07%	14	14,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	839.795.302	**770.165.909**	**91,71%**	**12**	**12,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	**Sekretaris**
2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	Laporan	4,00	2.400.000	2.160.000	90,00%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	443.662.922	385.488.409	86,89%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	50.854.000	43.388.000	85,32%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	12	342.878.380	339.129.500	98,91%	12	12,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	287.578.000	**259.321.663**	**90,17%**	**1**	**1,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	**Sekretaris**

2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit]	Unit	15,00	169.130.000	144.547.963	85,47%	15	16,00	106,67 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas		Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Unit	43	11.552.000	9.730.000	84,23%	43	43,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Unit	1,00	9.282.000	9.200.000	99,12%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	1,00	71.289.543	70.575.700	99,00%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	28,00	26.324.457	25.268.000	95,99%	28	28,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan III Tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yang perlu dilaksanakan pada periode triwulan selanjutnya, antara lain sebagaimana berikut:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring	Indikator	Pelaksana	Uraian Tindak Lanjut/ Solusi	Keterangan
2.18.02.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	Koord PM	peningkatan pencapaian realisasi program tahun berikutnya	Belum Tuntas
2.18.03.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Koord PTSP	peningkatan pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan	Belum Tuntas

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan III tahun 2025 ada kegiatan yang telah terlaksana dan ada yang belum terlaksana, dan diharapkan akan selesai sesuai dengan rencana.

a. Capaian kinerja Tujuan 1: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tercapai **115%** atau dengan kategori **Sangat Baik**;

b. Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tercapai sebesar **140,86%** atau dengan kategori **Sangat Baik**;

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Tri Wulan III Tahun 2025 secara keseluruhan rata-rata sebesar 99%, dalam kategori **Baik.** Pencapaian tujuan dan sasaran ini sangat penting untuk diperhatikan dalam menigkatkan capaian kinerja yang lebih baik pada Tri Wulan berikutnya. Adapun realisasi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 4.108.850.615 (67,37%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.009.227.936.

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Tri Wulan III Tahun 2025 Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen masih cukup baik secara rata-rata, namun terdapat permasalahan cukup berarti dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran OPD yang belum mencapai target kinerja pada Tri wulan III ini. Dengan demimikian pentingnya mendorong pencapaian kinerja pada Tri Wulan berikutnya.

2. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

a. Penguatan dalam pencapaian realisasi penanaman modal dan PMA/ PMDN dengan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal agar segera diselesaikan.

b. Peningkatan realisasi penanaman modal dan PMA/PMD yang diharapkan mampu

memberikan dampak positif pada dunia usaha dan perekonomian.

c. Peningkatan kualitas promosi investasi melalui penyebran informasi potensi investasi, forum investasi, serta pameran dengan harapan mampu menjadi daya tarik calon investor.

d. Peningkatan kualitas layanan investasi dan perizinan berusaha serta pendampingan kepada pelaku usaha umkm, fasilitasi perizinan, sehingga iklim investasi yang kondusif tetap terjaga.

e. Peningkatan realisasi LKPM bagi pelaku usaha baik pelaku usaha menengah besar mapun UMKM.

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi mandiri atas capaian target kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan III Tahun 2025 Diharapkan kami dapat terus meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja, perjanjian kinerja, dan target kinerja Dinas DPMPTPS Kabupaten Sragen yang telah ditetapkan.

Sragen, Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr.Soetomo No.5 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website : http://dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN-57211

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TRIWULAN IV TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Monitoring dan evaluasi merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kinerja yang telah berlangsung di DPMPTSP Kabupaten Sragen sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah disusun.

Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada periode berikutnya.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bertujuan untuk menilai tingkat capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun pada awal Tahun Anggaran 2025. Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahanpertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode berikutnya pada tahun berjalan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025 dan dilaksanakan pada periode Triwulan IV Tahun 2025.

4. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerjapada Triwulan IV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang sebelumnya telah dilaksanakan rapat internal dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja dari rencana aksi tahunan yang telah disusun untuk Triwulan IV Tahun 2025, yang memuat perkembangan progress/ kemajuan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana tugas masing-masing program, kegiatan, subkegiatan sampai dengan rincian aktivitas.

Diharapkan melalui hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Triwulan IV Tahun 2025 ini selain sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja juga sekaligus dapat dijadikan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan upaya strategis serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam mencapai target kinerja di periode triwulan berikutnya.

2. Tindak Lanjut Atas Saran/ Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tri Wulan III

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan III Tahun 2025 terdapat beberapa saran/rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring	Indikator	Pelaksana	Uraian Tindak Lanjut/ Solusi	Keterangan
2.18.02.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	Koord PM	peningkatan pencapaian realisasi program tahun berikutnya	Telah ditindaklanjuti namun realisasi masih di bawah target
2.18.03.2, 01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Koord PTSP	peningkatan pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan	Telah ditindaklanjuti namun realisasi masih di bawah target

C. HASIL YANG DICAPAI

Rencana Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang pada tabel 1.

Berdasarkan hasil pencapaian per Tri Wulan IV Tahun 2025, realisasi capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat diuraikan sebagaimana tabel 2;

TABEL I

RENCANA AKSI DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	**Tujuan Strategis :** Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan Investasi	jumlah investasi tahun n ((n - (n-1)/ (n-1))x100%	persen	4,27	6.099.227.936	0	0	0	4,27	Kepala DPMPTSP
1.1	**Sasaran Strategis.1 :** Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat bidang perizinan dan nonperizinan berdasarkan PermenPAN No. 14 Tahun 2017	Predikat IKM	Sangat Baik	451.347.000	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Kepala DPMPTSP
1.2	**Sasaran Strategis.2 :** Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan kegiatan usaha	jumlah kegiatan usaha tahun n ((n - (n-1)/ (n-1)) x 100%	persen	4,27	237.772.000	0	0	0	4,27	Kepala DPMPTSP
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**(Jumlah dokumen yang disusun/ jumlah dokumen yang seharusnya disediakan) x 100%**	**%**	**50**	**100,000,000**	**40**	**40**	**40**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	Jumlah dokumen kebijakan penanaman Modal yang disusun tahun n	**dokumen**	**1**	**100,000,000**	0	0	0	1	**Koordinator PM**

2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi tentang Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun n	dokumen	1	100,000,000	0	0	0	1	Ketua Tim Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**(Jumlah realisasi investasi dari pelaku usaha skala menengah besar/ kepeminatan usaha skala menengah besar)x100%**	**%**	**25**	**113.919.000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah even promosi [kali]**	**Jumlah event promosi penanaman modal (even) tahun n**	**kali**	**2**	**113.919.000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Koordinator PM**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota tahun n	Dokumen	2	113.919.000	0	0	1	2	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat BidangPerizinan dan Non perizinan [poin]**	IKM tahun n	**point**	**84**	**346.347.000**	**0**	**84**	**84**	**84**	**Kepala DPMPTSP**

2.18.04.2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Jumlah layanan perijinan dan non perijinan yang dilengkapi dengan standart pelayanan tahun n**	**persen**	**100**	**346.347.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Sekretaris**
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah tahun n	dokumen	5	54.951.000	0	2	5	5	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	pelaku usaha	1,320	100.863.500	400	800	1,100	1,320	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik tahun n	Pelaku usaha	80	36.290.000	20	40	60	80	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha tahun n	kegiatan usaha	500	154.242.500	125	250	375	500	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	(jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM/jumlah pelaku usaha terdaftar)x100%	**persen**	**10**	**23.853.000**	**8**	**9**	**10**	**10**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	**23.853.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Koordinator PM**

2.18.05.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	(Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan) x 100%	kegiatan usaha	60	23.853.000	15	30	45	60	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**(Laporan yang semestinya disusun/ jumlah kewenangan) x 100%**	**persen**	**50**	**105,000,000**	**0**	**10**	**30**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**% Dokumen penyediaan data informasi tahun n**	**persen**	**50**	**105,000,000**	**0**	**10**	**30**	**50**	**Sekretaris**
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	Dokumen tahun n	dokumen	1	**105,000,000**	0	0	1	1	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (poin)	predikat	70.50		0	0	0	80,45	DPMPTSP

2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**(Jumlah kegiatan dalam program yang dilaksanakan/ jumlah kegiatan sesuai ewenangan)x100 %**	**persen**	**100.00**	**5.410.108.936**	**25**	**50**	**75**	**100**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.01.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n**	**dokumen**	**3.00**	**3.943.000**	**1**	**2**	**3**	**3**	**Sekretaris**
2.18.01.2,01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen perencanaan yang disusun pada tahun n	Dokumen	3.00	2.263.000	**1**	**2**	**3**	**3**	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD[Laporan]	dokumen laporan capaian kinerja yang disusun pada tahun n	Laporan	1.00	1.680.000	1	1	1	1	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n	**bulan**	**12.00**	**3.740.425.434**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun n	orang /bulan	25.00	3.740.425.434	25	25	25	25	Ketua Tim Kerja Keuangan

		Tunjangan ASN [Orang/bulan]									
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**16.580.000**	**1**	**1**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	jumlah orang yang mengikuti bimtek tahun n	orang	30.00	**16.580.000**	0	30	30	30	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah]**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**bulan**	**12.00**	**367.538.200**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket komponen instalasi listrik tahun n	Paket	4.00	32.326.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Paket	8.00	161.018.200	1	3	4	8	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	penyediaan paket logistik tahun n	Paket	4.00	48.204.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan	penyediaan paket barang cetakan dan penggandaan tahun n	Paket	4.00	45.540.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	penyediaan dokumen bahan bacaan tahun n	Dokumen	1.00	7,000,000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan dinas luar daerah non kegiatan tahun n	Laporan	25.00	63.450.000	5	10	15	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen laporan penataausahaan arsip tahun n	Dokumen	1.00	10.000.000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah**	**laporan pengadaan barang tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**154.249.000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	pengadaan kendaraan dinas tahun n	Paket	1.00	35,000,000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	paket pengadaan mebel tahun n	Unit	4.00	74.945.000	2	4	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n	Unit	28.00	44.304.000	5	5	15	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n**	**bulan**	**12.00**	**839.795.302**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	penyediaan jasa surat menyurat tahun n	Laporan	4.00	2.400.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik tahun n	Laporan	4.00	443.662.922	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Laporan	4.00	50.854.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pelayanan umum tahun n	Laporan	4.00	342.878.380	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**laporan pemeliharaan barang milik daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	287.578.000	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**

2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun n	Unit	15.00	169.130.000	6	12	15	15	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Mebel tahun n	Unit	96.00	11.552.000	5	25	50	75	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Aset Tetgap Lainnya tahun n	Unit	1.00	9.282.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun n	Unit	1.00	71.289.543	0	0	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tahun n	Unit	28.00	26.324.457	28	28	28	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian

TABEL 2

MONITORING EVALUASI CAPAIAN KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Anggaran	Realisai Anggaran	Tingkat Capaian	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Ket	Analisis Capaian		Penanggung Jawab
												Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Tujuan Strategis :** Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan Investasi	persen	4,27	6.099.227.936	5.528.177.237	90,64%	4,27	4,29	100,46 %	Tuntas	**[Pendorong]** Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan OSS-RBA yang dibuktikan adanya peningkatan IKM bidang perizinan. Selain peningkatan layanan bidang investasi antara lain Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, serta pendampingan penyusunan laporan kegioatan penanaman modal.	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.	Kepala DPMPTSP
1,1	**Sasaran Strategis.1 :** Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	predikat	Sangat Baik	451.347.000	431.726.855	95,65%	Sangat Baik (89,56)	Sangat Baik (90,00)	100,49 %	Tuntas	Meningkatnya layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan	Peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan, termasuk peningkatan informasi perizinan dan nonperizinan	Kepala DPMPTSP

													melalui berbagai media	
1.2	**Sasaran Strategis.2 :** Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan kegiatan usaha	persen	4,27	237.772.000	231.023.101	97,16%	4,27	4,74	111%	Tuntas	**[Pendorong]** realisasi investasi dipengaruhi oleh jumlah PMA/PMDN dan capaian realisasi investasi yang optimal, diharapkan meningkat pula jumlah PMA/PMDN. Namun peningkatan PMA/PMDN tidak mutlak berbanding lurus dengan meningkatnya realisasi investasi. Hal ini bisa terjadi karena tingkat investasi masing-masing investor tidak sama. Ada kategori nilai investasi besar dari investor yang relatif sedikit. Sebaliknya terdapat kategori nilai investasi kecil/sedang namun dengan jumlah investor yang banyak.	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**%**	**50**	**100.000.000**	**94.792.400**	**94,79%**	**50**	**50**	100,00 %	**Tuntas**	**Realisasi program sesuai target**	**Peningkatan kualitas pelaksanaan**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	**Dokumen**	**1**	**100.000.000**	**94.792.400**	**94,79%**	**1**	**1**	100,00 %	**Tuntas**	**Realisasi kegiatan sesuai target**	**Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan**	**Koordinator PM**
2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas /	Dokumen	1	100.000.000	**94.792.400**	**94,79%**	1,00	1,00	100,00 %	Tuntas	Penyelesaian kegiatan sesuai rencana	Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan	Ketua Tim Kerja Pengembangan Iklim PM

	Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal												
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**%**	**25**	**113.919.000**	112.783.951	99,00%	25,00	**22,58**	90,32 %	**Belum Tuntas**	**meningkatnya penyebaran informasi dan inovasi**	**peningkatan pencapaian realisasi program tahun berikutnya**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03 .2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	**Kali**	**2**	113.919.000	112.783.951	99,00%	**2,00**	**2,00**	100,00 %	**Tuntas**	**meningkatnya kualitas pelaksanaan dan strategi promosi**	**peningkatan kualitas pelaksanaan promosi tahun berikutnya**	**Koordinator PM**
2.18.03 .2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Dokumen	2	113.919.000	112.783.951	99,00%	2	2,00	100,00 %	**Tuntas**	pelaksanaan pameran sesuai rencana yang ditetapkan	peningkatan kualitas kegiatan pameran tahun berikutnya	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**Point**	**84**	**346.347.000**	**335.865.855**	**96,97%**	**84,00**	**90,00**	107,14 %	**Tuntas**	**Meningkatnya layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan**	**Peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan, termasuk peningkatan informasi perizinan dan nonperizinan melalui berbagai media**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.04 .2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Persen**	**100**	346.347.000	**335.865.855**	**96,97%**	**100,00**	**100,00**	100,00 %	**Tuntas**	**SP yang ada dinlai masih relevan**	**Perlunya review dan evaluasi SP yang sudah ada**	**Sekretaris**
2.18.04 .2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	5	54.951.000	54.001.800	98,27%	5	5,00	100,00 %	Tuntas	meningkatnya kualitas pelatihan bagi umkm dengan narasumber yang kompeten	peningkatan kualitas pelaksanaan	Ketua Tim Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.04 .2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan	Pelaku usaha	1350	100.863.500	99.285.455	98,44%	1350	2.321	171,93 %	Tuntas	Meningkatnya sasaran layanan perizinan dan nonperizinan	peningkatan sasaran layanan mobile	Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan

	Terintegrasi secara Elektronik	Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)										tidak layanan tetap namun melalui keliling dan pendampingan ke pelosok di wilayah kabupaten	perizinan dan nonperizinan	dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	orang	80	36.290.000	32.258.500	88,89%	80	64,00	80,00 %	Belum Tuntas	Menurunnya jumlah konsultasi dan pengaduan menunjukkan perbaikan layanan dengan harapan layanan yang ada telah dipahami dan dimengerti oleh pengguna layanan	peningkatan pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Kegiatan usaha	500	154.242.500	150.320.100	97,46%	500	730,00	146,00 %	Tuntas	meningkatnya layanan perizinan persyaratan dasar yang perlu dilakukan pemantauan	peningkatan layanan perizinan persyaratan dasar yang dilakukan pemantauan	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**Persen**	**10**	**23.853.000**	**23.446.750**	**98,30%**	**10**	**12,80**	128,00 %	Tuntas	**meningkatnya pengendalian pelaksanaan melalui pengawasan penanaman modal baik melalui pendampingan langsung maupun daring**	**peningkatan kualitas kegiatan pengendalian pelaksanaan**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	23.853.000	**23.446.750**	**98,30%**	**100**	**100,00**	100,00 %	Tuntas	**meningkatnya pengendalian pelaksanaan melalui pengawasan penanaman modal baik melalui pengawasan langsung di**	**perluasan kegiatan pengendalian pelaksanaan**	**Koordinator PM**

												lapangan maupun bimbingan secara daring		
2.18.0.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	60	23.853.000	**23.446.750**	**98,30%**	60	100,00	166,67 %	Tuntas	meningkatnya pengawasan penanaman modal melalui inspeksi lapangan maupun bimbingan teknis secara daring	peningkatan intensitas pengawasan baik melalui inspeksi lapangan maupun daring	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**persen**	**50**	**105.000.000**	**95.861.000**	**91,30%**	**50**	**50,00**	100,00 %	Tuntas	**meningkatnya penyediaan data dari berbagai sektor perizinan nonperizinan**	**peningkatan penyediaan data tahun berikutnya**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**persen**	**50**	105.000.000	**95.861.000**	**91,30%**	**50**	**50,00**	100,00 %	Tuntas	**meningkatnya pengelolaan data dan informasi dengan memaksimalkan aplikasi dan sumberdaya pendukung lainnya**	**peningkatan intergrasi pengelolaan data dan informasi**	**Sekretaris**
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	dokumen	2	105.000.000	**95.861.000**	**91,30%**	2	8,00	400,00 %	Tuntas	meningkatnya pengolahan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi dengan memaksimalkan aplikasi dan sumberdaya pendukung lainnya	peningkatan pengolahan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
	Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	predikat	76,16	**5.410.108.936**	5.528.177.237	90,64%	80,45	80,45	100,00 %	Tuntas	-	-	Kepala DPMPTSP
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	86,00	**5.410.108.936**	5.528.177.237	90,64%	86,00	86,60	100,69 %	Tuntas	Meningkatnya layanan umum yang dilaksananakn oleh Perangkat Daerah	Peningkatan layanan umum antara lain layanan administrasi maupun layanan informasi	Kepala DPMPTSP

													lainnya. Termasuk dalam layanan ini fasilitas dan sarana gedung di MPP	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**persen**	**100,00**	**5.410.108.936**	**4.865.427.281**	89,93%	**100**	**100,00**	100,00 %	Tuntas	-	-	**Kepala DPMPTSP**
		Nilai/Kategori PKO	**Nilai /Kategori**	**98,50**	**5.410.108.936**	**4.865.427.281**	89,93%	**98,50**	**98,50**	100%	Tuntas			**Kepala DPMPTSP**
2.18.01 .2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**Dokumen**	**3,00**	3.943.000	**2.370.500**	**60,12%**	**4**	**4,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Penyusunan akan dilaksanakan sesuai jadwal rencana	**Sekretaris**
2.18.01 .2,01.0 5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen	3,00	2.263.000	1.455.500	64,32%	3	3,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Penyelesaian dokumen disesuaikan rencana	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01 .2,01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan]	Laporan	1,00	1.680.000	915.000	54,46%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Penyelesaian dilaksanakan sesuai rencana	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01 .2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	3.740.425.434	**3.325.782.503**	**88,91%**	**12**	**12,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana	**Sekretaris**
2.18.01 .2,02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan)	Orang/bulan	25,00	3.740.425.434	3.325.782.503	88,91%	25	28,00	112,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan	Ketua Tim Kerja Keuangan
2.18.01 .2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Laporan**	**1,00**	16.580.000	**13.825.000**	**83,38%**	**1**	**1,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Rencana kegiatan pada TW4	**Sekretaris**

2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Orang	30,00	16.580.000	**13.825.000**	**83,38%**	30	30,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Kegiatan disesuaikan dengan rencana	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	367.538.200	**343.012.809**	**93,33%**	**12**	**12,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Peningkatan realisasi keuangan pada TW4	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	32.326.000	31.783.000	98,32%	3	3,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah dilaksanakan	Peningkatan pencairan keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	8,00	161.018.200	153.138.550	95,11%	8	8,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik sebagian telah dilaksanakan	Peningkatan realisasi keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	48.204.000	45.369.000	94,12%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai rencana	Peningkatan keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan (Paket]	Paket	4,00	45.540.000	44.010.000	96,64%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Realisasi kegiatan fisik telah	Peningkatan kegiatan dan realisasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	Dokumen	1,00	7.000.000	7.000.000	100,00 %	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Laporan	25,00	63.450.000	51.712.259	81,50%	25	32,00	128,00 %	Tuntas	Sebagian kegiatan telah dilaksanakan	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Dokumen	1,00	10.000.000	10.000.000	100,00 %	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah dilaksanakan	Pengajuan pencairan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	154.249.000	**150.948.897**	**97,86%**	**1**	**1,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran	**Sekretaris**
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Paket	1,00	35.000.000	34.113.650	97,47%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai target	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian

													karena pengurangan anggaran	
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Unit	4,00	74.945.000	73.827.997	98,51%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Unit	28,00	44.304.000	43.007.250	97,07%	14	14,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	839.795.302	**770.165.909**	**91,71%**	**12**	**12,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	**Sekretaris**
2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	Laporan	4,00	2.400.000	2.160.000	90,00%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	443.662.922	385.488.409	86,89%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	50.854.000	43.388.000	85,32%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	12	342.878.380	339.129.500	98,91%	12	12,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	287.578.000	**259.321.663**	**90,17%**	**1**	**1,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	**Sekretaris**
2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	15,00	169.130.000	144.547.963	85,47%	15	16,00	106,67 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas		Kasubag Umum dan Kepegawaian

	Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit]												
2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Unit	43	11.552.000	9.730.000	84,23%	43	43,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Unit	1,00	9.282.000	9.200.000	99,12%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	1,00	71.289.543	70.575.700	99,00%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	28,00	26.324.457	25.268.000	95,99%	28	28,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Tri Wulan IV Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yang perlu dilaksanakan pada periode triwulan selanjutnya, antara lain sebagaimana berikut:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring	Indikator	Pelaksana	Uraian Tindak Lanjut/ Solusi	Keterangan
2.18.02.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	Koord PM	peningkatan pencapaian realisasi program tahun berikutnya	Belum Tuntas
2.18.03.2, 01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Koord PTSP	peningkatan pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan	Belum Tuntas

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 ada kegiatan yang telah terlaksana dan ada yang belum terlaksana, dan diharapkan akan selesai sesuai dengan rencana.

a. Capaian kinerja **Tujuan 1**: Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif, tercapai **100,46%** atau dengan kategori **Sangat Baik,** yang didukung **;**
   1) Program Pengembangan, pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran Rp. 94.792.400, capaian realisasi sebesar 94,79 %.
   2) Program Promosi Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 113.919.000 realisasi anggaran Rp. 112.783.951, capaian realisasi sebesar 99,00 %.
   3) Program Pelayanan Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 346.347.000 realisasi anggaran Rp. 335.865.855, capaian realisasi sebesar 96,97%.
   4) Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 23.853.000 realisasi anggaran Rp. 23.446.750, capaian realisasi sebesar 98,30%.
   5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 105.000.000 realisasi anggaran Rp. 95.861.000, capaian realisasi sebesar 91,30%.
   6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 5.410.108.936 realisasi anggaran Rp. 5.114.753.193, capaian realisasi sebesar 89,93%.

b. Capaian kinerja **Sasaran 1** : Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan tercapai sebesar **100,49%** atau dengan kategori **Sangat Baik,** yang didukung;
   1) Program Pelayanan Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 346.347.000 realisasi anggaran Rp. 335.865.855, capaian realisasi sebesar 96,97%.
   2) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 105.000.000 realisasi anggaran Rp. 95.861.000, capaian realisasi sebesar 91,30%.

c. Capaian kinerja **Sasaran 2** : Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal tercapai sebesar **100,49%** atau dengan kategori **Sangat Baik,** yang didukung;
   1) Program Pengembangan, pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran Rp. 94.792.400, capaian realisasi sebesar 94,79 %
   2) Program Promosi Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 113.919.000 realisasi anggaran Rp. 112.783.951, capaian realisasi sebesar 99,00 %
   3) Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 23.853.000 realisasi anggaran Rp. 23.446.750, capaian realisasi sebesar 98,30%.

d. Capaian kinerja **Sasaran Penunjang** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah tercapai sebesar **100,35%** atau dengan kategori **Sangat Baik,** yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 5.410.108.936 realisasi anggaran Rp. 5.114.753.193, capaian realisasi sebesar 89,93%.

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pada Tri Wulan IV Tahun 2025 secara keseluruhan rata-rata sebesar 102,53%, dan dalam kategori **Sangat Baik.** Adapun realisasi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 5.528.177.237 (90,64%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.009.227.936. Dengan demikian tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diperoleh angka 1,10 dengan kategori **EFISIEN.**

2. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

a. Penguatan dalam pencapaian realisasi penanaman modal dan PMA/ PMDN dengan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal agar segera diselesaikan.
b. Peningkatan realisasi penanaman modal dan PMA/PMD yang diharapkan mampu memberikan dampak positif pada dunia usaha dan perekonomian.
c. Peningkatan kualitas promosi investasi melalui penyebran informasi potensi investasi, forum investasi, serta pameran dengan harapan mampu menjadi daya tarik calon investor.
d. Peningkatan kualitas layanan investasi dan perizinan berusaha serta pendampingan kepada pelaku usaha umkm, fasilitasi perizinan, sehingga iklim investasi yang kondusif tetap terjaga.
e. Peningkatan realisasi LKPM bagi pelaku usaha baik pelaku usaha menengah besar mapun UMKM.

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi mandiri atas capaian target kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Tri wulan IV Tahun 2025 sekaligus realisasi capaian Tahun 2025.

Sragen, Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

TUGIYONO, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr.Soetomo No.5 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website : http://dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN-57211

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TRIWULAN I TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Laporan triwulanan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Laporan monitoring danevaluasi ini merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kinerja yang telah berlangsung di Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja).

Penyusunan LKjip Triwulan I Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, dan juga Rencana Strategis tahun 2021-2026. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen di masa yang akan datang.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja Triwulan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bertujuan untuk menilai tingkat capaian tujuan, sasaran, program kegiatan yang telah disusun pada awal tahun anggaran 2025 Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahanpertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode selanjutnya selama tahun berjalan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2025.

4. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerjapada Triwulan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang sebelumnya telah dilaksanakan rapat internal dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja dari rencana aksi tahunan yang telah disusun untuk Triwulan I Tahun 2025, yang memuat perkembangan progress/ kemajuan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana tugas masing-masing program, kegiatan, subkegiatan sampai dengan rincian aktivitas.

Diharapkan melalui hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Triwulan I Tahun 2025 ini selain sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja juga sekaligus dapat dijadikan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan upaya strategis serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam mencapai target kinerja di periode triwulan berikutnya.

C. HASIL YANG DICAPAI

Rencana Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2025 ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang pada tabel 1.

Berdasarkan hasil pencapaian per Triwulan I Tahun 2025, realisasi capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat diuraikan sebagaimana tabel 2;

TABEL I
RENCANA AKSI DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	Nilai investasi pada tahun n	trilyun rupiah	2.3	6,756,147,677	0.50	1.20	1.80	2.30	Kepala DPMPTSP
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	Jumlah PMA/ PMDN berdasarkan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam tahun n	investor	10,998	6,756,147,677	2,500	5.000	7.500	10,998	Kepala DPMPTSP
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**(Jumlah dokumen yang disusun/ jumlah dokumen yang seharusnya disediakan) x 100%**	**%**	**50**	**100,000,000**	**40**	**40**	**40**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	Jumlah dokumen kebijakan penanaman Modal yang disusun tahun n	**dokumen**	**1**	**100,000,000**	0	0	0	1	**Koordinator PM**

2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi tentang Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun n	dokumen	1	00,000,000	0	0	0	1	Ketua Tim Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**(Jumlah realisasi investasi dari pelaku usaha skala menengah besar/ kepeminatan usaha skala menengah besar)x100%**	**%**	**25**	**137,534,000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah even promosi [kali]**	**Jumlah event promosi penanaman modal (even) tahun n**	**kali**	**2**	**137,534,000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Koordinator PM**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota tahun n	Dokumen	2	137,534,000	0	0	1	2	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat BidangPerizinan dan Non**	IKM tahun n	**point**	**84**	**482,359,500**	**0**	**84**	**84**	**84**	**Kepala DPMPTSP**

		perizinan [poin]									
2.18.04.2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Jumlah layanan perijinan dan non perijinan yang dilengkapi dengan standart pelayanan tahun n**	**persen**	**100**	**482,359,500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Sekretaris**
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah tahun n	kegiatan usaha	150	90,000,000	0	50	100	150	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	pelaku usaha	3,200	119,992,000	800	1,600	2,400	3,200	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik tahun n	orang	80	45,000,000	20	40	60	80	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Jumlah Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha tahun n	kegiatan usaha	500	227,367,500	25	50	50	25	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	(jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM/jumlah pelaku usaha terdaftar)x100 %	**persen**	**10**	**32,000,000**	**2**	**2**	**3**	**3**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	**32,000,000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Koordinator PM**

2.18.05.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	(Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan) x 100%	kegiatan usaha	60	32,000,000	15	30	45	15	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**(Laporan yang semestinya disusun/ jumlah kewenangan) x 100%**	**persen**	**50**	**55,000,000**	**0**	**10**	**20**	**20**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**% Dokumen penyediaan data informasi tahun n**	**persen**	**50**	**55,000,000**	**0**	**10**	**20**	**20**	**Sekretaris**
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji	Dokumen tahun n	dokumen	1	55,000,000	0	0	0	1	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

		dan Dimanfaatkan [Dokumen]									
	Sasaran Penunjang:										
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (poin)	predikat	70.50		0	71	71	71	DPMPTSP
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**(Jumlah kegiatan dalam program yang dilaksanakan/ jumlah kegiatan sesuai ewenangan)x100%**	**persen**	**100.00**	**5,949,254,177**	**838,000,023**	**1,677,000,038**	**2,517,000,048**	**4,135,587,832**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.01.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n**	**dokumen**	**3.00**	**5,763,000**	**1**	**1,000,000**	**3,000,000**	**5,773,000**	**Sekretaris**
2.18.01.2,01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen perencanaan yang disusun pada tahun n	Dokumen	3.00	2,917,000	**0**	**500,000**	**1,500,000**	**2,927,000**	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	dokumen laporan capaian kinerja yang disusun pada tahun n	Laporan	1.00	2,846,000	1	500,000	1,500,000	2,846,000	Ketua Tim Kerja PEP

		Kinerja SKPD[Laporan]									
2.18.01.2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n	**bulan**	**12.00**	**3,895,270,179**	**800,000,000**	**1,600,000,000**	**2,400,000,000**	**3,895,270,179**	**Sekretaris**
2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun n	orang /bulan	25.00	3,895,270,179	800,000,000	1,600,000,000	2,400,000,000	3,895,270,179	Ketua Tim Kerja Keuangan
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**64,528,000**	**1**	**1**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah pegawai yang mengikuti diklat tahun n	orang	4.00	19,528,000	0	2	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	jumlah orang yang mengikuti bimtek tahun n	orang	30.00	45,000,000	0	30	30	30	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**bulan**	**12.00**	**520,899,600**	**38,000,014**	**76,000,027**	**114,000,033**	**234,544,635**	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan [Paket]	penyediaan paket komponen instalasi listrik tahun n	Paket	4.00	39,936,000	8,000,000	16,000,000	24,000,000	39,936,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan [Paket]	penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Paket	8.00	194,608,600	30,000,000	60,000,000	90,000,000	194,608,600	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	penyediaan paket logistik tahun n	Paket	4.00	70,415,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan [Paket]	penyediaan paket barang cetakan dan penggandaan tahun n	Paket	4.00	89,290,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	penyediaan dokumen bahan bacaan tahun n	Dokumen	1.00	7,000,000	1	2	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Jumlah laporan dinas luar daerah non kegiatan tahun n	Laporan	25.00	100,000,000	10	20	25	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Dokumen laporan penataausahaan arsip tahun n	Dokumen	1.00	19,650,000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**laporan pengadaan barang tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**96,947,000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	pengadaan kendaraan dinas tahun n	Paket	1.00	35,000,000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	paket pengadaan mebel tahun n	Unit	4.00	26,742,000	2	4	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n	Unit	28.00	35,205,000	5	5	15	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n**	**bulan**	**12.00**	**1,008,121,398**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**

2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	penyediaan jasa surat menyurat tahun n	Laporan	4.00	6,000,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik tahun n	Laporan	4.00	507,925,022	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Laporan	4.00	77,161,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pelayanan umum tahun n	Laporan	4.00	417,035,376	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**laporan pemeliharaan barang milik daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**357,725,000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun n	Unit	15.00	230,520,000	6	12	15	15	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Mebel tahun n	Unit	96.00	13,582,000	5	25	50	75	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Aset Tetgap Lainnya tahun n	Unit	1.00	18,260,000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun n	Unit	1.00	49,765,000	0	0	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tahun n	Unit	28.00	45,598,000	28	28	28	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian

TABEL 2
MONITORING EVALUASI KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Anggaran	Target Pelaksanaan Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I	Ket	Analisis Capaian		Penanggung Jawab
										Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Tujuan Strategis:** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai Investasi	trilyun rupiah	2,31	6.756.147.677	0,5	1,67	140%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA) yang dibuktikan adanya peningkatan IKM bidang perizinan. Selain peningkatan layanan bidang Investasi antara lain Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, serta pendampingan penyusunan laporan kegioatan penanaman modal. Upaya lain yang dilakukan antara lain penyusunan dokumen kebijakan bidang penanaman modal, peningkatan	Peningkatan iklim Investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.	Kepala DPMPTSP

										promosi serta penyediaan data perizinan dan nonperizinan		
1.1	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN	Investor	10.998	6.756.147.677	2.500	2.198	88%	Tuntas	Meningkatnya realisasi investasi dipengaruhui oleh jumlah PMA/PMDN yang ada di Kabuipaten Sragen. Dengan capaian realisasi investasi yang optimal, diharapkan meningkat pula jumlah PMA/PMDN. Peningkatan PMA/PMDN dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, serta kemudahan layanan antara layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA), SIPIONER (Sistem Informasi Perizinan Online Sragen) dan SI-	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.	Kepala DPMPTSP
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**%**	**50**	**100.000.000**	**10**	**10,00**	**100%**	**Tuntas**	Percepatan penyelesaian dokumen	Percepatan penyelesaian dokumen pada TW2	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	**Dokumen**	**1**	**100.000.000**	**1**	**1,00**	**100%**	**Tuntas**	Percepatan penyelesaian kegiatan	Percepatan penyelesaian kegiatan TW 2	**Koordinator PM**

2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	100.000.000	1	1,00	100%	Tuntas	Peningkatan kegiatan	Penyelesaian TW2 dan TW3	Ketua Tim Kerja Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**%**	**25**	**137.534.000**	5	**10,00**	**200%**	**Tuntas**	Peningkatan penyebaran informasi	Peningkatan penyebaran informasi melalui pameran CJIBF	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	**Kali**	**2**	**137.534.000**	**0**	**0,00**	**0%**	**Belum Tuntas**	Target pelaksanaan keikutsertaan even promosi pad aTW2 dan TW3	Pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3	**Koordinator PM**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Dokumen	2	137.534.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Target pelaksanaan keikutsertaan even promosi pad aTW2 dan TW3	Pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**Point**	**84**	**392.359.500**	**84**	**89,75**	**107%**	**Tuntas**	Peningkatan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan	Peningkatan IKM TW2	**Kepala DPMPTSP**
2.18.04.2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Persen**	**100**	**392.359.500**	**100**	**100,00**	**100%**	**Tuntas**	SP telah disusun	Peninjauan SP	**Sekretaris**
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	150	90.000.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Target pelaksanaan pad TW2 dan TW3	Pelaksanaan pad aTW2 dan TW3	Ketua Tim Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.04.2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	Pelaku usaha	1.25	119.992.000	400	402,00	100%	Tuntas	Kemudahan layanan OSS dan layanan perizinan online lainnya	Peningkatan kualitas layanan OSS dan layanan perizinan online lainnya	Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	orang	80	45.000.000	20	22,00	110%	Tuntas	Kemudahan layanan konsultasi dan pengaduan	Peningkatan kualitas layanan	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Kegiatan usaha	500	227.367.500	125	1,00	4%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**Persen**	**10**	**32.000.000**	**10**	**8,00**	**80%**	Tuntas	Pemahaman pelaku usaha atas kewajiban LKPM	Peningkatan sosialisasi LKPM melalui media sosial	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	**32.000.000**	**100**	**100,00**	**100%**	Tuntas	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Ditingkatkan pada TW2	**Koordinator PM**
2.18.05.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	60	32.000.000	15	15,00	100%	Tuntas	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Peningkatan kegiatan pada TW2	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**persen**	**50**	**55.000.000**	**10**	**10,00**	**100%**	Tuntas	Pelaksanaan sesuai yang direncanakan	Pelaksanaan agar menyesuaikan rencana	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**persen**	**50**	**55.000.000**	**10**	**10,00**	**100%**	Tuntas	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Pelaksanaan agar menyesuaikan rencana	**Sekretaris**

2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	dokumen	1	55.000.000	1	1,00	100%	Tuntas	Penyusunan sesuai rencana	Pelaksanaan agar menyesuaikan rencana	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
	Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	predikat	76,16		0,00				Anggaran kas ada di TW 2-4	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	DPMPTSP
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**persen**	**100,00**	**5.949.254.177**	**25**	**25,00**	**100%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Kepala DPMPTSP**
2.18.01.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**Dokumen**	**3,00**	**5.763.000**	**1**	**2,00**	**200%**	Tuntas	Kegiatan fisik (penyusunan dokumen) telah dilaksanakan	Realisasi keuangan	**Sekretaris**
2.18.01.2,01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen	3,00	2.917.000	1	1,00	100%	Tuntas	Kegiatan baru tahap penyusunan laporan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan]	Laporan	1,00	2.846.000	1	1,00	100%	Tuntas	Penyusunan laporan telah selesai	Pengajuan realisasi keuangan	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	**3.895.270.179**	**3**	**3,00**	**100%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**
2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan)	Orang/bulan	25,00	3.895.270.179	25	22,0	88%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Ketua Tim Kerja Keuangan
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi**	**Laporan**	**2,00**	**64.528.000**	**1**	**0,00**	**0%**	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**

		kepegawaian perangkat daerah [laporan]										
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4,00	19.528.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Orang	30,00	45.000.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilaksanakan mulai TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	**520.899.600**	**3**	**3,00**	**100%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	39.936.000	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	8,00	194.608.600	2	2,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	70.415.000	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan (Paket]	Paket	4,00	89.290.000	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	Dokumen	1,00	7.000.000	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Laporan	25,00	100.000.000	10	1,00	10%	Belum Tuntas	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan yang terlaksana akan dibayarkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Dokumen	1,00	19.650.000	1	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	**96.947.000**	**2**	**0,00**	**0%**	Belum Tuntas	Anggaran kas ada di TW2-4	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Paket	1,00	35.000.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum terlaksana	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2 dan seterusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Unit	4,00	26.742.000	2	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilaksanakan di TW2 dan seterusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Unit	28,00	35.205.000	5	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	**1.008.121.398**	**3**	**3,00**	**100%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**
2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	Laporan	4,00	6.000.000	1	1,00	100%	Tuntas	Kegiatan sudah dilaksanakan	Kegiatan akan dibayarkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	507.925.022	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	77.161.000	1	1,00	100%	Tuntas	Kegiatan sudah dilaksanakan	Kegiatan akan dibayarkan dan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	417.035.376	1	3,00	300%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	**357.725.000**	**2**	**1,00**	**50%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**

2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit]	Unit	15,00	230.520.000	6	8,00	133%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Unit	96,00	13.582.000	5	5,00	100%	Tuntas	Kegiatan belum terlaksana	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Unit	1,00	18.260.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Aset masih cukup baik berfungsi	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	1,00	49.765.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Sarana dan prasarana masih cukup baik	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	28,00	45.598.000	28	14,00	50%	Belum Tuntas	Gedung masih berfungsi cukup baik	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan 1 Tahun 2025 terdapat 15 (lima belas) rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yang perlu dilaksanakan pada periode triwulan selanjutnya, antara lain sebagaimana berikut:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring dan EvaluasiTriwulan I Tahun 2025	Tindak Lanjut	Uraian Tindak Lanjut/ Solusi	Pelaksana	Keterangan
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	Pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3	**Koordinator PM**	**Belum Tuntas**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3	Ketua Tim Promosi	Belum Tuntas
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Pelaksanaan pad aTW2 dan TW3	Ketua Tim Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Belum Tuntas
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	Kegiatan akan dilanjutkan di TW3	**Sekretaris**	Belum Tuntas
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Kegiatan akan dilaksanakan mulai TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Kegiatan yang terlaksana akan dibayarkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas

2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**	Belum Tuntas
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2 dan seterusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Kegiatan akan dilaksanakan di TW2 dan seterusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum Tuntas

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen sampai dengan triwulan I tahun 2025 ada kegiatan yang telah terlaksana dan ada yang belum terlaksana, dan diharapkan akan selesai sesuai anggaran kas

a. Capaian kinerja Tujuan 1: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tercapai **140%** atau dengan kategori **Sangat Baik**;

b. Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tercapai sebesar **88%** atau dengan kategori **Baik**;

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja triwulan I Tahun 2025 secara keseluruhan rata-rata sebesar 88%, dalam kategori **Baik.** Pencapaian menjadi sinyal bagi DPMPTSP untuk menigkatkan capaian kinerja yang lebih baik pada Tri Wulan berikutnya. Adapun realisasi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 1.047.362.210 (15,50%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.756.147.677.

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja triwulan I Tahun 2025 Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen tidak terdapat permasalahan berarti dalam arti kinerja yang dilaksanakan sebagian besar telah mencapai target yang telah disusun sebelumnya dan yang belum mencapai realisasi kinerja pada tri wulan I akan didorong realisasi pelaksanaannya pada Tri Wulan berikutnya.

2. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

a. Penguatan dalam pencapaian realisasi penanaman modal dan PMA/ PMDN dengan pemberian kemudahan layanan perizinan berusaha.
b. Peningkatan realisasi penanaman modal dan PMA/PMD yang diharapkan mampu memberikan dampak positif pada dunia usaha dan perekonomian.
c. Peningkatan kualitas kajian sektor investasi dengan harapan menjadi pedoman bagi calon investor yang akan melakukan investasi.
d. Peningkatan kualitas promosi investasi melalui penyebran informasi potensi investasi, forum investasi, serta pameran dengan harapan mampu menjadi daya tarik calon investor.
e. Peningkatan kualitas layanan investasi dan perizinan berusaha serta pendampingan kepada calon investor, sehingga iklim investasi yang kondusif tetap terjaga.

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi mandiri atas capaian target kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan I Tahun 2025 Diharapkan kami dapat terus meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja, perjanjian kinerja, dan target kinerja Dinas DPMPTPS Kabupaten Sragen yang telah ditetapkan.

Sragen, April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr.Soetomo No.5 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website : http://dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN-57211

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TRIWULAN II TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Laporan triwulanan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Laporan monitoring danevaluasi ini merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kinerja yang telah berlangsung di Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja).

Penyusunan LKjip Triwulan II Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, dan juga Rencana Strategis tahun 2021-2026. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen di masa yang akan datang.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bertujuan untuk menilai tingkat capaian tujuan, sasaran, program kegiatan yang telah disusun pada awal tahun anggaran 2025 Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahanpertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode selanjutnya selama tahun berjalan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2025.

4. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerjapada Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang sebelumnya telah dilaksanakan rapat internal dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja dari rencana aksi tahunan yang telah disusun untuk Triwulan II Tahun 2025, yang memuat perkembangan progress/ kemajuan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana tugas masing-masing program, kegiatan, subkegiatan sampai dengan rincian aktivitas.

Diharapkan melalui hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2025 ini selain sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja juga sekaligus dapat dijadikan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan upaya strategis serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam mencapai target kinerja di periode triwulan berikutnya.

2. Tindak Lanjut Atas Saran/ Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tri Wulan I

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan I Tahun 2025 terdapat beberapa saran/rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring dan EvaluasiTriwulan I Tahun 2025	Tindak Lanjut	Uraian Tindak Lanjut/ Solusi	Pelaksana	Keterangan
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	Pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3	**Koordinator PM**	Telah ditindaklanjuti namun belum tuntas
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3	Ketua Tim Promosi	Telah ditindaklanjuti namun belum tuntas

2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Pelaksanaan pada TW2 dan TW3	Ketua Tim Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	Kegiatan akan dilanjutkan di TW3	**Sekretaris**	Telah ditindaklanjuti sebagian
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Telah ditindaklanjuti sebagian
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Kegiatan akan dilaksanakan mulai TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Telah ditindaklanjuti sebagian
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Kegiatan yang terlaksana akan dibayarkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**	Telah ditindaklanjuti sebagian
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2 dan seterusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Telah ditindaklanjuti sebagian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Kegiatan akan dilaksanakan di TW2 dan seterusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Telah ditindaklanjuti sebagian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Telah ditindaklanjuti sebagian

2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Telah ditindaklanjuti

Dari 15 (lima belas) saran/ rekomendasi pada Tri Wulan I, 6 (enam) saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan tuntas sesuai target Tri Wulan II, sedangkan sisanya, telah ditindaklanjuti namun belum tuntas sesuai target yang ditetapkan.

C. HASIL YANG DICAPAI

Rencana Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2025 ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang pada tabel 1.

Berdasarkan hasil pencapaian per Triwulan II Tahun 2025, realisasi capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat diuraikan sebagaimana tabel 2;

TABEL I

RENCANA AKSI DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	Nilai investasi pada tahun n	trilyun rupiah	2.3	6,756,147,677	0.50	1.20	1.80	2.30	Kepala DPMPTSP
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	Jumlah PMA/ PMDN berdasarkan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam tahun n	investor	10,998	6,756,147,677	2,500	5.000	7.500	10,998	Kepala DPMPTSP
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**(Jumlah dokumen yang disusun/ jumlah dokumen yang seharusnya disediakan) x 100%**	**%**	**50**	**100,000,000**	**40**	**40**	**40**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	Jumlah dokumen kebijakan penanaman Modal yang disusun tahun n	**dokumen**	**1**	**100,000,000**	0	0	0	1	**Koordinator PM**

2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi tentang Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun n	dokumen	1	00,000,000	0	0	0	1	Ketua Tim Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**(Jumlah realisasi investasi dari pelaku usaha skala menengah besar/ kepeminatan usaha skala menengah besar)x100%**	**%**	**25**	**137,534,000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah even promosi [kali]**	**Jumlah event promosi penanaman modal (even) tahun n**	**kali**	**2**	**137,534,000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Koordinator PM**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota tahun n	Dokumen	2	137,534,000	0	0	1	2	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat BidangPerizinan dan Non**	IKM tahun n	**point**	**84**	**482,359,500**	**0**	**84**	**84**	**84**	**Kepala DPMPTSP**

		perizinan [poin]									
2.18.04.2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Jumlah layanan perijinan dan non perijinan yang dilengkapi dengan standart pelayanan tahun n**	**persen**	**100**	**482,359,500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Sekretaris**
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah tahun n	kegiatan usaha	150	90,000,000	0	50	100	150	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	pelaku usaha	3,200	119,992,000	800	1,600	2,400	3,200	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik tahun n	orang	80	45,000,000	20	40	60	80	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Jumlah Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha tahun n	kegiatan usaha	500	227,367,500	25	50	50	25	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	(jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM/jumlah pelaku usaha terdaftar)x100 %	**persen**	**10**	**32,000,000**	**2**	**2**	**3**	**3**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	**32,000,000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Koordinator PM**

2.18.05.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	(Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan) x 100%	kegiatan usaha	60	32,000,000	15	30	45	15	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**(Laporan yang semestinya disusun/ jumlah kewenangan) x 100%**	**persen**	**50**	**55,000,000**	**0**	**10**	**20**	**20**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**% Dokumen penyediaan data informasi tahun n**	**persen**	**50**	**55,000,000**	**0**	**10**	**20**	**20**	**Sekretaris**
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji	Dokumen tahun n	dokumen	1	55,000,000	0	0	0	1	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

		dan Dimanfaatkan [Dokumen]									
	Sasaran Penunjang:										
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (poin)	predikat	70.50		0	71	71	71	DPMPTSP
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**(Jumlah kegiatan dalam program yang dilaksanakan/ jumlah kegiatan sesuai ewenangan)x100%**	**persen**	**100.00**	**5,949,254,177**	**838,000,023**	**1,677,000,038**	**2,517,000,048**	**4,135,587,832**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.01.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n**	**dokumen**	**3.00**	**5,763,000**	**1**	**1,000,000**	**3,000,000**	**5,773,000**	**Sekretaris**
2.18.01.2,01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen perencanaan yang disusun pada tahun n	Dokumen	3.00	2,917,000	**0**	**500,000**	**1,500,000**	**2,927,000**	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	dokumen laporan capaian kinerja yang disusun pada tahun n	Laporan	1.00	2,846,000	1	500,000	1,500,000	2,846,000	Ketua Tim Kerja PEP

		Kinerja SKPD[Laporan]									
2.18.01.2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n	**bulan**	**12.00**	**3,895,270,179**	**800,000,000**	**1,600,000,000**	**2,400,000,000**	**3,895,270,179**	**Sekretaris**
2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun n	orang /bulan	25.00	3,895,270,179	800,000,000	1,600,000,000	2,400,000,000	3,895,270,179	Ketua Tim Kerja Keuangan
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**64,528,000**	**1**	**1**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah pegawai yang mengikuti diklat tahun n	orang	4.00	19,528,000	0	2	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	jumlah orang yang mengikuti bimtek tahun n	orang	30.00	45,000,000	0	30	30	30	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**bulan**	**12.00**	**520,899,600**	**38,000,014**	**76,000,027**	**114,000,033**	**234,544,635**	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan [Paket]	penyediaan paket komponen instalasi listrik tahun n	Paket	4.00	39,936,000	8,000,000	16,000,000	24,000,000	39,936,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan [Paket]	penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Paket	8.00	194,608,600	30,000,000	60,000,000	90,000,000	194,608,600	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	penyediaan paket logistik tahun n	Paket	4.00	70,415,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan [Paket]	penyediaan paket barang cetakan dan penggandaan tahun n	Paket	4.00	89,290,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	penyediaan dokumen bahan bacaan tahun n	Dokumen	1.00	7,000,000	1	2	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Jumlah laporan dinas luar daerah non kegiatan tahun n	Laporan	25.00	100,000,000	10	20	25	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Dokumen laporan penataausahaan arsip tahun n	Dokumen	1.00	19,650,000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**laporan pengadaan barang tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**96,947,000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	pengadaan kendaraan dinas tahun n	Paket	1.00	35,000,000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	paket pengadaan mebel tahun n	Unit	4.00	26,742,000	2	4	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n	Unit	28.00	35,205,000	5	5	15	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n**	**bulan**	**12.00**	**1,008,121,398**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**

2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	penyediaan jasa surat menyurat tahun n	Laporan	4.00	6,000,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik tahun n	Laporan	4.00	507,925,022	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Laporan	4.00	77,161,000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pelayanan umum tahun n	Laporan	4.00	417,035,376	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**laporan pemeliharaan barang milik daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**357,725,000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun n	Unit	15.00	230,520,000	6	12	15	15	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Mebel tahun n	Unit	96.00	13,582,000	5	25	50	75	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Aset Tetgap Lainnya tahun n	Unit	1.00	18,260,000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun n	Unit	1.00	49,765,000	0	0	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tahun n	Unit	28.00	45,598,000	28	28	28	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian

TABEL 2
MONITORING EVALUASI KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Anggaran	Target Pelaksanaan Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I	Ket	Analisis Capaian		Penanggung Jawab
										Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Tujuan Strategis:** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai Investasi	trilyun rupiah	2,31	6.756.147.677	0,5	1,67	140%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA) yang dibuktikan adanya peningkatan IKM bidang perizinan. Selain peningkatan layanan bidang Investasi antara lain Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, serta pendampingan penyusunan laporan kegioatan penanaman modal. Upaya lain yang dilakukan antara lain penyusunan dokumen kebijakan bidang penanaman modal, peningkatan	Peningkatan iklim Investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.	Kepala DPMPTSP

										promosi serta penyediaan data perizinan dan nonperizinan		
1.1	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN	Investor	10.998	6.756.147.677	2.500	2.198	88%	Tuntas	Meningkatnya realisasi investasi dipengaruhui oleh jumlah PMA/PMDN yang ada di Kabuipaten Sragen. Dengan capaian realisasi investasi yang optimal, diharapkan meningkat pula jumlah PMA/PMDN. Peningkatan PMA/PMDN dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, serta kemudahan layanan antara layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA), SIPIONER (Sistem Informasi Perizinan Online Sragen) dan SI-	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.	Kepala DPMPTSP
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**%**	**50**	**100.000.000**	**10**	**10,00**	**100%**	**Tuntas**	Percepatan penyelesaian dokumen	Percepatan penyelesaian dokumen pada TW2	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	**Dokumen**	**1**	**100.000.000**	**1**	**1,00**	**100%**	**Tuntas**	Percepatan penyelesaian kegiatan	Percepatan penyelesaian kegiatan TW 2	**Koordinator PM**

2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	100.000.000	1	1,00	100%	Tuntas	Peningkatan kegiatan	Penyelesaian TW2 dan TW3	Ketua Tim Kerja Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**%**	**25**	**137.534.000**	5	**10,00**	**200%**	**Tuntas**	Peningkatan penyebaran informasi	Peningkatan penyebaran informasi melalui pameran CJIBF	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	**Kali**	**2**	**137.534.000**	**0**	**0,00**	**0%**	**Belum Tuntas**	Target pelaksanaan keikutsertaan even promosi pad aTW2 dan TW3	Pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3	**Koordinator PM**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Dokumen	2	137.534.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Target pelaksanaan keikutsertaan even promosi pad aTW2 dan TW3	Pameran dan CJIBF pada TW2 dan TW3	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**Point**	**84**	**392.359.500**	**84**	**89,75**	**107%**	**Tuntas**	Peningkatan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan	Peningkatan IKM TW2	**Kepala DPMPTSP**
2.18.04.2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Persen**	**100**	**392.359.500**	**100**	**100,00**	**100%**	**Tuntas**	SP telah disusun	Peninjauan SP	**Sekretaris**
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	150	90.000.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Target pelaksanaan pad TW2 dan TW3	Pelaksanaan pad aTW2 dan TW3	Ketua Tim Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.04.2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	Pelaku usaha	1.25	119.992.000	400	402,00	100%	Tuntas	Kemudahan layanan OSS dan layanan perizinan online lainnya	Peningkatan kualitas layanan OSS dan layanan perizinan online lainnya	Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	orang	80	45.000.000	20	22,00	110%	Tuntas	Kemudahan layanan konsultasi dan pengaduan	Peningkatan kualitas layanan	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Kegiatan usaha	500	227.367.500	125	1,00	4%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**Persen**	**10**	**32.000.000**	**10**	**8,00**	**80%**	Tuntas	Pemahaman pelaku usaha atas kewajiban LKPM	Peningkatan sosialisasi LKPM melalui media sosial	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	**32.000.000**	**100**	**100,00**	**100%**	Tuntas	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Ditingkatkan pada TW2	**Koordinator PM**
2.18.05.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	60	32.000.000	15	15,00	100%	Tuntas	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Peningkatan kegiatan pada TW2	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**persen**	**50**	**55.000.000**	**10**	**10,00**	**100%**	Tuntas	Pelaksanaan sesuai yang direncanakan	Pelaksanaan agar menyesuaikan rencana	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**persen**	**50**	**55.000.000**	**10**	**10,00**	**100%**	Tuntas	Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Pelaksanaan agar menyesuaikan rencana	**Sekretaris**

2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	dokumen	1	55.000.000	1	1,00	100%	Tuntas	Penyusunan sesuai rencana	Pelaksanaan agar menyesuaikan rencana	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
	Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	predikat	76,16		0,00				Anggaran kas ada di TW 2-4	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	DPMPTSP
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**persen**	**100,00**	**5.949.254.177**	**25**	**25,00**	**100%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Kepala DPMPTSP**
2.18.01.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**Dokumen**	**3,00**	**5.763.000**	**1**	**2,00**	**200%**	Tuntas	Kegiatan fisik (penyusunan dokumen) telah dilaksanakan	Realisasi keuangan	**Sekretaris**
2.18.01.2,01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen	3,00	2.917.000	1	1,00	100%	Tuntas	Kegiatan baru tahap penyusunan laporan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan]	Laporan	1,00	2.846.000	1	1,00	100%	Tuntas	Penyusunan laporan telah selesai	Pengajuan realisasi keuangan	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	**3.895.270.179**	**3**	**3,00**	**100%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**
2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan)	Orang/bulan	25,00	3.895.270.179	25	22,0	88%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Ketua Tim Kerja Keuangan
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi**	**Laporan**	**2,00**	**64.528.000**	**1**	**0,00**	**0%**	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**

		kepegawaian perangkat daerah [laporan]										
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4,00	19.528.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Orang	30,00	45.000.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilaksanakan mulai TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	**520.899.600**	**3**	**3,00**	**100%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	39.936.000	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	8,00	194.608.600	2	2,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	70.415.000	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan (Paket]	Paket	4,00	89.290.000	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	Dokumen	1,00	7.000.000	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Laporan	25,00	100.000.000	10	1,00	10%	Belum Tuntas	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan yang terlaksana akan dibayarkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Dokumen	1,00	19.650.000	1	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang**	**jumlah laporan**	**Laporan**	**2,00**	**96.947.000**	**2**	**0,00**	**0%**	Belum	Anggaran kas	Kegiatan akan	**Sekretaris**

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**pengadaan barang milik daerah [laporan]**							Tuntas	ada di TW2-4	dilanjutkan di TW2	
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Paket	1,00	35.000.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum terlaksana	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2 dan seterusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Unit	4,00	26.742.000	2	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilaksanakan di TW2 dan seterusnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Unit	28,00	35.205.000	5	0,00	0%	Belum Tuntas	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	**1.008.121.398**	**3**	**3,00**	**100%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**
2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	Laporan	4,00	6.000.000	1	1,00	100%	Tuntas	Kegiatan sudah dilaksanakan	Kegiatan akan dibayarkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	507.925.022	1	1,00	100%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	77.161.000	1	1,00	100%	Tuntas	Kegiatan sudah dilaksanakan	Kegiatan akan dibayarkan dan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	417.035.376	1	3,00	300%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	**357.725.000**	**2**	**1,00**	**50%**	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	**Sekretaris**
2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	15,00	230.520.000	6	8,00	133%	Tuntas	Sesuai anggaran kas	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit]										
2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Unit	96,00	13.582.000	5	5,00	100%	Tuntas	Kegiatan belum terlaksana	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Unit	1,00	18.260.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Aset masih cukup baik berfungsi	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	1,00	49.765.000	0	0,00	0%	Belum Tuntas	Sarana dan prasarana masih cukup baik	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	28,00	45.598.000	28	14,00	50%	Belum Tuntas	Gedung masih berfungsi cukup baik	Kegiatan akan dilanjutkan di TW2	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2025 terdapat 20 (dua puluh) rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yang perlu dilaksanakan pada periode triwulan selanjutnya, antara lain sebagaimana berikut:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025	Indikator	Pelaksana	Uraian Tindak Lanjut/ Solusi	Keterangan
1	**Tujuan Strategis:** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai Investasi	Kepala DPMPTSP	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.	Belum Tuntas
1.1	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN	Kepala DPMPTSP	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.	Belum Tuntas
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	**Koordinator PM**	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	**Belum Tuntas**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Ketua Tim Promosi	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Belum Tuntas
2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan	Peningkatan dokumentasi dalam kegiatan	Belum Tuntas

2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**Koordinator PM**	Peningkatan pengendalian pelaksanaan	Belum Tuntas
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**Kepala DPMPTSP**	Melaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan	Belum Tuntas
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**Sekretaris**	Peningkatan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan	Belum Tuntas
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan	Belum Tuntas
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Sekretaris**	Rencana kegiatan pada TW3	Belum Tuntas
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas	Belum Tuntas
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kegiatan disesuaikan dengan rencana	Belum Tuntas
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3	Belum Tuntas
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3	Belum Tuntas
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**Sekretaris**	Pelaksanaan kegiatan pada TW3	Belum Tuntas

2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Belum Tuntas
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dilaksanakan pada TW3	Belum Tuntas
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Belum Tuntas
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan	Belum Tuntas
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Perbaikan sesuai prioritas	Belum Tuntas

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen sampai dengan triwulan II tahun 2025 ada kegiatan yang telah terlaksana dan ada yang belum terlaksana, dan diharapkan akan selesai sesuai dengan rencana.

a. Capaian kinerja Tujuan 1: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tercapai **91,67%** atau dengan kategori **Baik**;
b. Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tercapai sebesar **77,26%** atau dengan kategori **Cukup**;

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan rata-rata sebesar 109%, dalam kategori **Sangat Baik.** Pencapaian tujuan dan sasaran ini sangat penting untuk diperhatikan dalam menigkatkan capaian kinerja yang lebih baik pada Tri Wulan berikutnya. Adapun realisasi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 1.978.820.138 (31,90%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.204.072.681.

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja triwulan II Tahun 2025 Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen masih cukup baik secara rata-rata, namun terdapat permasalahan cukup berarti dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran OPD yang belum mencapai target kinerja pada tri wulan II ini. Dengan demimikian pentingnya mendorong pencapaian kinerja pada Tri Wulan berikutnya.

2. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

a. Penguatan dalam pencapaian realisasi penanaman modal dan PMA/ PMDN dengan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal agar segera diselesaikan.

b. Peningkatan realisasi penanaman modal dan PMA/PMD yang diharapkan mampu memberikan dampak positif pada dunia usaha dan perekonomian.
c. Peningkatan kualitas promosi investasi melalui penyebran informasi potensi investasi, forum investasi, serta pameran dengan harapan mampu menjadi daya tarik calon investor.
d. Peningkatan kualitas layanan investasi dan perizinan berusaha serta pendampingan kepada pelaku usaha umkm, fasilitasi perizinan, sehingga iklim investasi yang kondusif tetap terjaga.
e. Peningkatan realisasi LKPM bagi pelaku usaha baik pelaku usaha menengah besar mapun UMKM.

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi mandiri atas capaian target kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2025 Diharapkan kami dapat terus meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja, perjanjian kinerja, dan target kinerja Dinas DPMPTPS Kabupaten Sragen yang telah ditetapkan.

Sragen, Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr.Soetomo No.5 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website : http://dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN-57211

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TRIWULAN III TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Laporan triwulanan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Laporan monitoring danevaluasi ini merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kinerja yang telah berlangsung di Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja).

Penyusunan LKJIP Triwulan III Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, dan juga Rencana Strategis tahun 2021-2026. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen di masa yang akan datang.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja Triwulan III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bertujuan untuk menilai tingkat capaian tujuan, sasaran, program kegiatan yang telah disusun pada awal tahun anggaran 2025 Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahanpertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode selanjutnya selama tahun berjalan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2025.

4. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja pada Triwulan III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang sebelumnya telah dilaksanakan rapat internal dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja dari rencana aksi tahunan yang telah disusun untuk Triwulan III Tahun 2025, yang memuat perkembangan progress/ kemajuan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana tugas masing-masing program, kegiatan, subkegiatan sampai dengan rincian aktivitas.

Diharapkan melalui hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Triwulan III Tahun 2025 ini selain sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja juga sekaligus dapat dijadikan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan upaya strategis serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam mencapai target kinerja di periode triwulan berikutnya.

2. Tindak Lanjut Atas Saran/ Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tri Wulan II

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2025 terdapat beberapa saran/rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025	Indikator	Pelaksana	Uraian Tindak Lanjut/ Solusi	Keterangan
1	**Tujuan Strategis:** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai Investasi	Kepala DPMPTSP	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor	Telah ditindaklanjuti

				yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.	
1.1	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN	Kepala DPMPTSP	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.	Telah ditindaklanjuti
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	**Koordinator PM**	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Ketua Tim Promosi	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan	Peningkatan dokumentasi dalam kegiatan	Telah ditindaklanjuti
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**Koordinator PM**	Peningkatan pengendalian pelaksanaan	Telah ditindaklanjuti
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**Kepala DPMPTSP**	Melaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan	Telah ditindaklanjuti
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**Sekretaris**	Peningkatan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan	Telah ditindaklanjuti

2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan	Telah ditindaklanjuti, namun belum tuntas
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Sekretaris**	Rencana kegiatan pada TW3	Telah ditindaklanjuti, namun belum tuntas
2.18.01.2,05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas	Telah ditindaklanjuti, namun belum tuntas
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kegiatan disesuaikan dengan rencana	Telah ditindaklanjuti, namun belum tuntas
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**Sekretaris**	Pelaksanaan kegiatan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dilaksanakan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kegiatan dilanjutkan pada TW3	Telah ditindaklanjuti
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan	Telah ditindaklanjuti

2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Perbaikan sesuai prioritas	Telah ditindaklanjuti

Dari 20 (dua puluh tiga) saran/ rekomendasi pada Tri Wulan II, 14 (enam belas) saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan tuntas sesuai target Tri Wulan III, sedangkan sisanya, telah ditindaklanjuti namun belum tuntas sesuai target yang ditetapkan.

C. HASIL YANG DICAPAI

Rencana Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2025 ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang pada tabel 1.

Berdasarkan hasil pencapaian per Triwulan III Tahun 2025, realisasi capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat diuraikan sebagaimana tabel 2;

TABEL I
RENCANA AKSI DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	**Tujuan Strategis :** Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan Investasi	jumlah investasi tahun n ((n - (n-1)/ (n-1))x100%	persen	4,27	6.099.227.936	0	0	0	4,27	Kepala DPMPTSP
1.1	**Sasaran Strategis.1 :** Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat bidang perizinan dan nonperizinan berdasarkan PermenPAN No. 14 Tahun 2017	Predikat IKM	Sangat Baik	451.347.000	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Kepala DPMPTSP
1.2	**Sasaran Strategis.2 :** Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan kegiatan usaha	jumlah kegiatan usaha tahun n ((n - (n-1)/ (n-1)) x 100%	persen	4,27	237.772.000	0	0	0	4,27	Kepala DPMPTSP
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**(Jumlah dokumen yang disusun/ jumlah dokumen yang seharusnya disediakan) x 100%**	**%**	**50**	**100,000,000**	**40**	**40**	**40**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	Jumlah dokumen kebijakan penanaman Modal yang disusun tahun n	**dokumen**	**1**	**100,000,000**	0	0	0	1	**Koordinator PM**

2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi tentang Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun n	dokumen	1	100,000,000	0	0	0	1	Ketua Tim Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**(Jumlah realisasi investasi dari pelaku usaha skala menengah besar/ kepeminatan usaha skala menengah besar)x100%**	**%**	**25**	**113.919.000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah even promosi [kali]**	**Jumlah event promosi penanaman modal (even) tahun n**	**kali**	**2**	**113.919.000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Koordinator PM**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota tahun n	Dokumen	2	113.919.000	0	0	1	2	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat BidangPerizinan dan Non perizinan [poin]**	IKM tahun n	**point**	**84**	**346.347.000**	**0**	**84**	**84**	**84**	**Kepala DPMPTSP**

2.18.04.2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Jumlah layanan perijinan dan non perijinan yang dilengkapi dengan standart pelayanan tahun n**	**persen**	**100**	**346.347.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Sekretaris**
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah tahun n	dokumen	5	54.951.000	0	2	5	5	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	pelaku usaha	1,320	100.863.500	400	800	1,100	1,320	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik tahun n	Pelaku usaha	80	36.290.000	20	40	60	80	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha tahun n	kegiatan usaha	500	154.242.500	125	250	375	500	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	(jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM/jumlah pelaku usaha terdaftar)x100%	**persen**	**10**	**23.853.000**	**8**	**9**	**10**	**10**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	**23.853.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Koordinator PM**

2.18.05.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	(Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan) x 100%	kegiatan usaha	60	23.853.000	15	30	45	60	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**(Laporan yang semestinya disusun/ jumlah kewenangan) x 100%**	**persen**	**50**	**105,000,000**	**0**	**10**	**30**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**% Dokumen penyediaan data informasi tahun n**	**persen**	**50**	**105,000,000**	**0**	**10**	**30**	**50**	**Sekretaris**
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	Dokumen tahun n	dokumen	1	**105,000,000**	0	0	1	1	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (poin)	predikat	70.50		0	0	0	80,45	DPMPTSP

2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**(Jumlah kegiatan dalam program yang dilaksanakan/ jumlah kegiatan sesuai ewenangan)x100 %**	**persen**	**100.00**	**5.410.108.936**	**25**	**50**	**75**	**100**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.01.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n**	**dokumen**	**3.00**	**3.943.000**	**1**	**2**	**3**	**3**	**Sekretaris**
2.18.01.2,01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen perencanaan yang disusun pada tahun n	Dokumen	3.00	2.263.000	**1**	**2**	**3**	**3**	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD[Laporan]	dokumen laporan capaian kinerja yang disusun pada tahun n	Laporan	1.00	1.680.000	1	1	1	1	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n	**bulan**	**12.00**	**3.740.425.434**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun n	orang /bulan	25.00	3.740.425.434	25	25	25	25	Ketua Tim Kerja Keuangan

		Tunjangan ASN [Orang/bulan]									
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**16.580.000**	**1**	**1**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	jumlah orang yang mengikuti bimtek tahun n	orang	30.00	**16.580.000**	0	30	30	30	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah]**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**bulan**	**12.00**	**367.538.200**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket komponen instalasi listrik tahun n	Paket	4.00	32.326.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Paket	8.00	161.018.200	1	3	4	8	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	penyediaan paket logistik tahun n	Paket	4.00	48.204.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan	penyediaan paket barang cetakan dan penggandaan tahun n	Paket	4.00	45.540.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	penyediaan dokumen bahan bacaan tahun n	Dokumen	1.00	7,000,000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan dinas luar daerah non kegiatan tahun n	Laporan	25.00	63.450.000	5	10	15	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen laporan penataausahaan arsip tahun n	Dokumen	1.00	10.000.000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah**	**laporan pengadaan barang tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**154.249.000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	pengadaan kendaraan dinas tahun n	Paket	1.00	35,000,000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	paket pengadaan mebel tahun n	Unit	4.00	74.945.000	2	4	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n	Unit	28.00	44.304.000	5	5	15	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n**	**bulan**	**12.00**	**839.795.302**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	penyediaan jasa surat menyurat tahun n	Laporan	4.00	2.400.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik tahun n	Laporan	4.00	443.662.922	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Laporan	4.00	50.854.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pelayanan umum tahun n	Laporan	4.00	342.878.380	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**laporan pemeliharaan barang milik daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	287.578.000	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**

2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun n	Unit	15.00	169.130.000	6	12	15	15	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Mebel tahun n	Unit	96.00	11.552.000	5	25	50	75	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Aset Tetgap Lainnya tahun n	Unit	1.00	9.282.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun n	Unit	1.00	71.289.543	0	0	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tahun n	Unit	28.00	26.324.457	28	28	28	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian

TABEL 2
MONITORING EVALUASI KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Anggaran	Realisai Anggaran	Tingkat Capaian	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Ket	Analisis Capaian		Penanggung Jawab
												Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Tujuan Strategis :** Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan Investasi	persen	4,27	6.099.227.936	5.528.177.237	90,64%	4,27	4,29	100,46 %	Tuntas	**[Pendorong]** Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan OSS-RBA yang dibuktikan adanya peningkatan IKM bidang perizinan. Selain peningkatan layanan bidang investasi antara lain Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, serta pendampingan penyusunan laporan kegioatan penanaman modal.	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.	Kepala DPMPTSP
1,1	**Sasaran Strategis.1 :** Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	predikat	Sangat Baik	451.347.000	431.726.855	95,65%	Sangat Baik (89,56)	Sangat Baik (90,00)	100,49 %	Tuntas	Meningkatnya layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan	Peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan, termasuk peningkatan informasi	Kepala DPMPTSP

													perizinan dan nonperizinan melalui berbagai media	
1.2	**Sasaran Strategis.2 :** Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan kegiatan usaha	persen	4,27	237.772.000	231.023.101	97,16%	4,27	4,74	111%	Tuntas	**[Pendorong]** realisasi investasi dipengaruhi oleh jumlah PMA/PMDN dan capaian realisasi investasi yang optimal, diharapkan meningkat pula jumlah PMA/PMDN. Namun peningkatan PMA/PMDN tidak mutlak berbanding lurus dengan meningkatnya realisasi investasi. Hal ini bisa terjadi karena tingkat investasi masing-masing investor tidak sama. Ada kategori nilai investasi besar dari investor yang relatif sedikit. Sebaliknya terdapat kategori nilai investasi kecil/sedang namun dengan jumlah investor yang banyak.	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**%**	**50**	**100.000.000**	**94.792.400**	**94,79%**	**50**	**50**	100,00 %	**Tuntas**	**Realisasi program sesuai target**	**Peningkatan kualitas pelaksanaan**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02 .2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	**Dokumen**	**1**	**100.000.000**	**94.792.400**	**94,79%**	**1**	**1**	100,00 %	**Tuntas**	**Realisasi kegiatan sesuai target**	**Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan**	**Koordinator PM**
2.18.02 .2,02.0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam	Dokumen	1	100.000.000	**94.792.400**	**94,79%**	1,00	1,00	100,00 %	Tuntas	Penyelesaian kegiatan sesuai	Peningkatan kualitas	Ketua Tim Kerja

1	Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal										rencana	pelaksanaan kegiatan	Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**%**	**25**	**113.919.000**	112.783.951	99,00%	25,00	**22,58**	90,32 %	**Belum Tuntas**	**meningkatnya penyebaran informasi dan inovasi**	**peningkatan pencapaian realisasi program tahun berikutnya**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03 .2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	**Kali**	**2**	113.919.000	112.783.951	99,00%	**2,00**	**2,00**	100,00 %	**Tuntas**	**meningkatnya kualitas pelaksanaan dan strategi promosi**	**peningkatan kualitas pelaksanaan promosi tahun berikutnya**	**Koordinator PM**
2.18.03 .2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Dokumen	2	113.919.000	112.783.951	99,00%	2	2,00	100,00 %	**Tuntas**	pelaksanaan pameran sesuai rencana yang ditetapkan	peningkatan kualitas kegiatan pameran tahun berikutnya	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**Point**	**84**	**346.347.000**	**335.865.855**	**96,97%**	**84,00**	**90,00**	107,14 %	**Tuntas**	**Meningkatnya layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan**	**Peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan, termasuk peningkatan informasi perizinan dan nonperizinan melalui berbagai media**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.04 .2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Persen**	**100**	346.347.000	**335.865.855**	**96,97%**	**100,00**	**100,00**	100,00 %	**Tuntas**	**SP yang ada dinlai masih relevan**	**Perlunya review dan evaluasi SP yang sudah ada**	**Sekretaris**
2.18.04 .2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	5	54.951.000	54.001.800	98,27%	5	5,00	100,00 %	Tuntas	meningkatnya kualitas pelatihan bagi umkm dengan narasumber yang kompeten	peningkatan kualitas pelaksanaan	Ketua Tim Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.04 .2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu	Pelaku usaha	1350	100.863.500	99.285.455	98,44%	1350	2.321	171,93 %	Tuntas	Meningkatnya sasaran layanan perizinan dan	peningkatan sasaran layanan mobile	Ketua Tim Kerja Pelayanan

	Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)										nonperizinan tidak layanan tetap namun melalui keliling dan pendampingan ke pelosok di wilayah kabupaten	perizinan dan nonperizinan	Perizinan dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	orang	80	36.290.000	32.258.500	88,89%	80	64,00	80,00 %	Belum Tuntas	Menurunnya jumlah konsultasi dan pengaduan menunjukkan perbaikan layanan dengan harapan layanan yang ada telah dipahami dan dimengerti oleh pengguna layanan	peningkatan pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Kegiatan usaha	500	154.242.500	150.320.100	97,46%	500	730,00	146,00 %	Tuntas	meningkatnya layanan perizinan persyaratan dasar yang perlu dilakukan pemantauan	peningkatan layanan perizinan persyaratan dasar yang dilakukan pemantauan	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**Persen**	**10**	**23.853.000**	**23.446.750**	**98,30%**	**10**	**12,80**	128,00 %	Tuntas	**meningkatnya pengendalian pelaksanaan melalui pengawasan penanaman modal baik melalui pendampingan langsung maupun daring**	**peningkatan kualitas kegiatan pengendalian pelaksanaan**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	23.853.000	**23.446.750**	**98,30%**	**100**	**100,00**	100,00 %	Tuntas	**meningkatnya pengendalian pelaksanaan melalui pengawasan penanaman modal baik melalui pengawasan**	**perluasan kegiatan pengendalian pelaksanaan**	**Koordinator PM**

												langsung di lapangan maupun bimbingan secara daring		
2.18.0.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	60	23.853.000	**23.446.750**	**98,30%**	60	100,00	166,67 %	Tuntas	meningkatnya pengawasan penanaman modal melalui inspeksi lapangan maupun bimbingan teknis secara daring	peningkatan intensitas pengawasan baik melalui inspeksi lapangan maupun daring	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**persen**	**50**	**105.000.000**	**95.861.000**	**91,30%**	**50**	**50,00**	100,00 %	Tuntas	**meningkatnya penyediaan data dari berbagai sektor perizinan nonperizinan**	**peningkatan penyediaan data tahun berikutnya**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**persen**	**50**	105.000.000	**95.861.000**	**91,30%**	**50**	**50,00**	100,00 %	Tuntas	**meningkatnya pengelolaan data dan informasi dengan memaksimalkan aplikasi dan sumberdaya pendukung lainnya**	**peningkatan intergrasi pengelolaan data dan informasi**	**Sekretaris**
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	dokumen	2	105.000.000	**95.861.000**	**91,30%**	2	8,00	400,00 %	Tuntas	meningkatnya pengolahan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi dengan memaksimalkan aplikasi dan sumberdaya pendukung lainnya	peningkatan pengolahan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
	Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	predikat	76,16	**5.410.108.936**	5.528.177.237	90,64%	80,45	80,45	100,00 %	Tuntas	-	-	Kepala DPMPTSP
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	86,00	**5.410.108.936**	5.528.177.237	90,64%	86,00	86,60	100,69 %	Tuntas	Meningkatnya layanan umum yang dilaksananakn oleh Perangkat Daerah	Peningkatan layanan umum antara lain layanan administrasi maupun layanan	Kepala DPMPTSP

												informasi lainnya. Termasuk dalam layanan ini fasilitas dan sarana gedung di MPP		
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**persen**	**100,00**	**5.410.108.936**	**4.865.427.281**	89,93%	**100**	**100,00**	100,00 %	Tuntas	-	-	**Kepala DPMPTSP**
		Nilai/Kategori PKO	**Nilai /Kategori**	**98,50**	**5.410.108.936**	**4.865.427.281**	89,93%	**98,50**	**98,50**	100%	Tuntas			**Kepala DPMPTSP**
2.18.01 .2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**Dokumen**	**3,00**	3.943.000	**2.370.500**	**60,12%**	**4**	**4,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Penyusunan akan dilaksanakan sesuai jadwal rencana	**Sekretaris**
2.18.01 .2,01.0 5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen	3,00	2.263.000	1.455.500	64,32%	3	3,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Penyelesaian dokumen disesuaikan rencana	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01 .2,01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan]	Laporan	1,00	1.680.000	915.000	54,46%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Penyelesaian dilaksanakan sesuai rencana	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01 .2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	3.740.425.434	**3.325.782.503**	**88,91%**	**12**	**12,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana	**Sekretaris**
2.18.01 .2,02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan)	Orang/bulan	25,00	3.740.425.434	3.325.782.503	88,91%	25	28,00	112,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan	Ketua Tim Kerja Keuangan
2.18.01 .2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Laporan**	**1,00**	16.580.000	**13.825.000**	**83,38%**	**1**	**1,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Rencana kegiatan pada TW4	**Sekretaris**

2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Orang	30,00	16.580.000	**13.825.000**	**83,38%**	30	30,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Kegiatan disesuaikan dengan rencana	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	367.538.200	**343.012.809**	**93,33%**	**12**	**12,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Peningkatan realisasi keuangan pada TW4	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	32.326.000	31.783.000	98,32%	3	3,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah dilaksanakan	Peningkatan pencairan keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	8,00	161.018.200	153.138.550	95,11%	8	8,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik sebagian telah dilaksanakan	Peningkatan realisasi keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	48.204.000	45.369.000	94,12%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai rencana	Peningkatan keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan (Paket]	Paket	4,00	45.540.000	44.010.000	96,64%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Realisasi kegiatan fisik telah	Peningkatan kegiatan dan realisasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	Dokumen	1,00	7.000.000	7.000.000	100,00 %	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Laporan	25,00	63.450.000	51.712.259	81,50%	25	32,00	128,00 %	Tuntas	Sebagian kegiatan telah dilaksanakan	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Dokumen	1,00	10.000.000	10.000.000	100,00 %	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah dilaksanakan	Pengajuan pencairan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	154.249.000	**150.948.897**	**97,86%**	**1**	**1,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran	**Sekretaris**
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Paket	1,00	35.000.000	34.113.650	97,47%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai target	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian

													karena pengurangan anggaran	
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Unit	4,00	74.945.000	73.827.997	98,51%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Unit	28,00	44.304.000	43.007.250	97,07%	14	14,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	839.795.302	**770.165.909**	**91,71%**	**12**	**12,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	**Sekretaris**
2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	Laporan	4,00	2.400.000	2.160.000	90,00%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	443.662.922	385.488.409	86,89%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	50.854.000	43.388.000	85,32%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	12	342.878.380	339.129.500	98,91%	12	12,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	287.578.000	**259.321.663**	**90,17%**	**1**	**1,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	**Sekretaris**
2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	15,00	169.130.000	144.547.963	85,47%	15	16,00	106,67 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas		Kasubag Umum dan Kepegawaian

	Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit]												
2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Unit	43	11.552.000	9.730.000	84,23%	43	43,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Unit	1,00	9.282.000	9.200.000	99,12%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	1,00	71.289.543	70.575.700	99,00%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	28,00	26.324.457	25.268.000	95,99%	28	28,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan III Tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yang perlu dilaksanakan pada periode triwulan selanjutnya, antara lain sebagaimana berikut:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring	Indikator	Pelaksana	Uraian Tindak Lanjut/ Solusi	Keteran gan
2.18.02.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	Koord PM	peningkatan pencapaian realisasi program tahun berikutnya	Belum Tuntas
2.18.03.2,0 1.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Koord PTSP	peningkatan pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan	Belum Tuntas

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan III tahun 2025 ada kegiatan yang telah terlaksana dan ada yang belum terlaksana, dan diharapkan akan selesai sesuai dengan rencana.

a. Capaian kinerja Tujuan 1: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tercapai **115%** atau dengan kategori **Sangat Baik**;

b. Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tercapai sebesar **140,86%** atau dengan kategori **Sangat Baik**;

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Tri Wulan III Tahun 2025 secara keseluruhan rata-rata sebesar 99%, dalam kategori **Baik.** Pencapaian tujuan dan sasaran ini sangat penting untuk diperhatikan dalam menigkatkan capaian kinerja yang lebih baik pada Tri Wulan berikutnya. Adapun realisasi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 4.108.850.615 (67,37%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.009.227.936.

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Tri Wulan III Tahun 2025 Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen masih cukup baik secara rata-rata, namun terdapat permasalahan cukup berarti dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran OPD yang belum mencapai target kinerja pada Tri wulan III ini. Dengan demimikian pentingnya mendorong pencapaian kinerja pada Tri Wulan berikutnya.

2. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

a. Penguatan dalam pencapaian realisasi penanaman modal dan PMA/ PMDN dengan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal agar segera diselesaikan.

b. Peningkatan realisasi penanaman modal dan PMA/PMD yang diharapkan mampu

memberikan dampak positif pada dunia usaha dan perekonomian.

c. Peningkatan kualitas promosi investasi melalui penyebran informasi potensi investasi, forum investasi, serta pameran dengan harapan mampu menjadi daya tarik calon investor.

d. Peningkatan kualitas layanan investasi dan perizinan berusaha serta pendampingan kepada pelaku usaha umkm, fasilitasi perizinan, sehingga iklim investasi yang kondusif tetap terjaga.

e. Peningkatan realisasi LKPM bagi pelaku usaha baik pelaku usaha menengah besar mapun UMKM.

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi mandiri atas capaian target kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan III Tahun 2025 Diharapkan kami dapat terus meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja, perjanjian kinerja, dan target kinerja Dinas DPMPTPS Kabupaten Sragen yang telah ditetapkan.

Sragen, Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr.Soetomo No.5 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website : http://dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN-57211

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TRIWULAN IV TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Laporan triwulanan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Laporan monitoring danevaluasi ini merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kinerja yang telah berlangsung di Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja).

Penyusunan LKjip Tri Wulan IV Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, dan juga Rencana Strategis tahun 2021-2026. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen di masa yang akan datang.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja Tri Wulan IV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bertujuan untuk menilai tingkat capaian tujuan, sasaran, program kegiatan yang telah disusun pada awal tahun anggaran 2025 Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahanpertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode selanjutnya selama tahun berjalan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang dilaksanakan pada periode Tri Wulan IV Tahun 2025.

4. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerjapada Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang sebelumnya telah dilaksanakan rapat internal dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja dari rencana aksi tahunan yang telah disusun untuk Triwulan II Tahun 2025, yang memuat perkembangan progress/ kemajuan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana tugas masing-masing program, kegiatan, subkegiatan sampai dengan rincian aktivitas.

Diharapkan melalui hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2025 ini selain sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja juga sekaligus dapat dijadikan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan upaya strategis serta langkah-langkah perbaikan yangdiperlukan dalam mencapai target kinerja di periode triwulan berikutnya.

2. Tindak Lanjut Atas Saran/ Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tri Wulan III

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan I Tahun 2025 terdapat beberapa saran/rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring	Indikator	Pelaksana	Uraian Tindak Lanjut/ Solusi	Keterangan
2.18.02.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	Koord PM	peningkatan pencapaian realisasi program tahun berikutnya	Telah ditindaklanjuti namun realisasi masih di bawah target
2.18.03.2, 01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Koord PTSP	peningkatan pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan	Telah ditindaklanjuti namun realisasi masih di bawah target

	Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)			

C. HASIL YANG DICAPAI

Rencana Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang pada tabel 1.

Berdasarkan hasil pencapaian per Tri Wulan IV Tahun 2025, realisasi capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat diuraikan sebagaimana tabel 2;

TABEL I
RENCANA AKSI DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	**Tujuan Strategis :** Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan Investasi	jumlah investasi tahun n ((n - (n-1)/ (n-1))x100%	persen	4,27	6.099.227.936	0	0	0	4,27	Kepala DPMPTSP
1.1	**Sasaran Strategis.1 :** Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat bidang perizinan dan nonperizinan berdasarkan PermenPAN No. 14 Tahun 2017	Predikat IKM	Sangat Baik	451.347.000	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Kepala DPMPTSP
1.2	**Sasaran Strategis.2 :** Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan kegiatan usaha	jumlah kegiatan usaha tahun n ((n - (n-1)/ (n-1)) x 100%	persen	4,27	237.772.000	0	0	0	4,27	Kepala DPMPTSP
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**(Jumlah dokumen yang disusun/ jumlah dokumen yang seharusnya disediakan) x 100%**	**%**	**50**	**100,000,000**	**40**	**40**	**40**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02.2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	Jumlah dokumen kebijakan penanaman Modal yang disusun tahun n	**dokumen**	**1**	**100,000,000**	0	0	0	1	**Koordinator PM**

2.18.02.2,02.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi tentang Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun n	dokumen	1	100,000,000	0	0	0	1	Ketua Tim Pengembangan Iklim PM
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**(Jumlah realisasi investasi dari pelaku usaha skala menengah besar/ kepeminatan usaha skala menengah besar)x100%**	**%**	**25**	**113.919.000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03.2,01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah even promosi [kali]**	**Jumlah event promosi penanaman modal (even) tahun n**	**kali**	**2**	**113.919.000**	**0**	**0**	**1**	**2**	**Koordinator PM**
2.18.03.2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota tahun n	Dokumen	2	113.919.000	0	0	1	2	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat BidangPerizinan dan Non perizinan [poin]**	IKM tahun n	**point**	**84**	**346.347.000**	**0**	**84**	**84**	**84**	**Kepala DPMPTSP**

2.18.04.2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Jumlah layanan perijinan dan non perijinan yang dilengkapi dengan standart pelayanan tahun n**	**persen**	**100**	**346.347.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Sekretaris**
2.18.04.2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah tahun n	dokumen	5	54.951.000	0	2	5	5	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan erizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	pelaku usaha	1,320	100.863.500	400	800	1,100	1,320	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik tahun n	Pelaku usaha	80	36.290.000	20	40	60	80	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha tahun n	kegiatan usaha	500	154.242.500	125	250	375	500	Ketua Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	(jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM/jumlah pelaku usaha terdaftar)x100%	**persen**	**10**	**23.853.000**	**8**	**9**	**10**	**10**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	**23.853.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Koordinator PM**

2.18.05.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	(Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan) x 100%	kegiatan usaha	60	23.853.000	15	30	45	60	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**(Laporan yang semestinya disusun/ jumlah kewenangan) x 100%**	**persen**	**50**	**105,000,000**	**0**	**10**	**30**	**50**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**% Dokumen penyediaan data informasi tahun n**	**persen**	**50**	**105,000,000**	**0**	**10**	**30**	**50**	**Sekretaris**
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	Dokumen tahun n	dokumen	1	**105,000,000**	0	0	1	1	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (poin)	predikat	70.50		0	0	0	80,45	DPMPTSP

2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**(Jumlah kegiatan dalam program yang dilaksanakan/ jumlah kegiatan sesuai ewenangan)x100 %**	**persen**	**100.00**	**5.410.108.936**	**25**	**50**	**75**	**100**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.01.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n**	**dokumen**	**3.00**	**3.943.000**	**1**	**2**	**3**	**3**	**Sekretaris**
2.18.01.2,01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen perencanaan yang disusun pada tahun n	Dokumen	3.00	2.263.000	**1**	**2**	**3**	**3**	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD[Laporan]	dokumen laporan capaian kinerja yang disusun pada tahun n	Laporan	1.00	1.680.000	1	1	1	1	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01.2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n	**bulan**	**12.00**	**3.740.425.434**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun n	orang /bulan	25.00	3.740.425.434	25	25	25	25	Ketua Tim Kerja Keuangan

		Tunjangan ASN [Orang/bulan]									
2.18.01.2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**16.580.000**	**1**	**1**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	jumlah orang yang mengikuti bimtek tahun n	orang	30.00	**16.580.000**	0	30	30	30	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah]**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**bulan**	**12.00**	**367.538.200**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket komponen instalasi listrik tahun n	Paket	4.00	32.326.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Paket	8.00	161.018.200	1	3	4	8	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	penyediaan paket logistik tahun n	Paket	4.00	48.204.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan	penyediaan paket barang cetakan dan penggandaan tahun n	Paket	4.00	45.540.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	penyediaan dokumen bahan bacaan tahun n	Dokumen	1.00	7,000,000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan dinas luar daerah non kegiatan tahun n	Laporan	25.00	63.450.000	5	10	15	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen laporan penataausahaan arsip tahun n	Dokumen	1.00	10.000.000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah**	**laporan pengadaan barang tahun n**	**Laporan**	**2.00**	**154.249.000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	pengadaan kendaraan dinas tahun n	Paket	1.00	35,000,000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	paket pengadaan mebel tahun n	Unit	4.00	74.945.000	2	4	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n	Unit	28.00	44.304.000	5	5	15	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n**	**bulan**	**12.00**	**839.795.302**	**3**	**6**	**9**	**12**	**Sekretaris**
2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	penyediaan jasa surat menyurat tahun n	Laporan	4.00	2.400.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik tahun n	Laporan	4.00	443.662.922	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Laporan	4.00	50.854.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	penyediaan jasa pelayanan umum tahun n	Laporan	4.00	342.878.380	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**laporan pemeliharaan barang milik daerah tahun n**	**Laporan**	**2.00**	287.578.000	**2**	**2**	**2**	**2**	**Sekretaris**

2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun n	Unit	15.00	169.130.000	6	12	15	15	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Mebel tahun n	Unit	96.00	11.552.000	5	25	50	75	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Pemeliharaan Aset Tetgap Lainnya tahun n	Unit	1.00	9.282.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun n	Unit	1.00	71.289.543	0	0	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tahun n	Unit	28.00	26.324.457	28	28	28	28	Kasubag Umum dan Kepegawaian

TABEL 2

MONITORING EVALUASI CAPAIAN KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Anggaran	Realisai Anggaran	Tingkat Capaian	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Ket	Analisis Capaian		Penanggung Jawab
												Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Tujuan Strategis :** Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan Investasi	persen	4,27	6.099.227.936	5.528.177.237	90,64%	4,27	4,29	100,46 %	Tuntas	**[Pendorong]** Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan OSS-RBA yang dibuktikan adanya peningkatan IKM bidang perizinan. Selain peningkatan layanan bidang investasi antara lain Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, serta pendampingan penyusunan laporan kegioatan penanaman modal.	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.	Kepala DPMPTSP
1,1	**Sasaran Strategis.1 :** Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	predikat	Sangat Baik	451.347.000	431.726.855	95,65%	Sangat Baik (89,56)	Sangat Baik (90,00)	100,49 %	Tuntas	Meningkatnya layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan	Peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan, termasuk peningkatan informasi perizinan dan nonperizinan	Kepala DPMPTSP

													melalui berbagai media	
1.2	**Sasaran Strategis.2 :** Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan kegiatan usaha	persen	4,27	237.772.000	231.023.101	97,16%	4,27	4,74	111%	Tuntas	**[Pendorong]** realisasi investasi dipengaruhi oleh jumlah PMA/PMDN dan capaian realisasi investasi yang optimal, diharapkan meningkat pula jumlah PMA/PMDN. Namun peningkatan PMA/PMDN tidak mutlak berbanding lurus dengan meningkatnya realisasi investasi. Hal ini bisa terjadi karena tingkat investasi masing-masing investor tidak sama. Ada kategori nilai investasi besar dari investor yang relatif sedikit. Sebaliknya terdapat kategori nilai investasi kecil/sedang namun dengan jumlah investor yang banyak.	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen.	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**%**	**50**	**100.000.000**	**94.792.400**	**94,79%**	**50**	**50**	100,00 %	**Tuntas**	**Realisasi program sesuai target**	**Peningkatan kualitas pelaksanaan**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.02 .2,02	**Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**	**Dokumen**	**1**	**100.000.000**	**94.792.400**	**94,79%**	**1**	**1**	100,00 %	**Tuntas**	**Realisasi kegiatan sesuai target**	**Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan**	**Koordinator PM**
2.18.02 .2,02.0 1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas /	Dokumen	1	100.000.000	**94.792.400**	**94,79%**	1,00	1,00	100,00 %	Tuntas	Penyelesaian kegiatan sesuai rencana	Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan	Ketua Tim Kerja Pengembang an Iklim PM

	Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal												
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**%**	**25**	**113.919.000**	112.783.951	99,00%	25,00	**22,58**	90,32 %	**Belum Tuntas**	**meningkatnya penyebaran informasi dan inovasi**	**peningkatan pencapaian realisasi program tahun berikutnya**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.03 .2,01	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah event promosi [kali]**	**Kali**	**2**	113.919.000	112.783.951	99,00%	**2,00**	**2,00**	100,00 %	**Tuntas**	**meningkatnya kualitas pelaksanaan dan strategi promosi**	**peningkatan kualitas pelaksanaan promosi tahun berikutnya**	**Koordinator PM**
2.18.03 .2,01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	Dokumen	2	113.919.000	112.783.951	99,00%	2	2,00	100,00 %	**Tuntas**	pelaksanaan pameran sesuai rencana yang ditetapkan	peningkatan kualitas kegiatan pameran tahun berikutnya	Ketua Tim Promosi
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**Point**	**84**	**346.347.000**	**335.865.855**	**96,97%**	**84,00**	**90,00**	107,14 %	**Tuntas**	**Meningkatnya layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan**	**Peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan keliling dan pendampingan, termasuk peningkatan informasi perizinan dan nonperizinan melalui berbagai media**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.04 .2,01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**	**Persen**	**100**	346.347.000	**335.865.855**	**96,97%**	**100,00**	**100,00**	100,00 %	**Tuntas**	**SP yang ada dinlai masih relevan**	**Perlunya review dan evaluasi SP yang sudah ada**	**Sekretaris**
2.18.04 .2,01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	5	54.951.000	54.001.800	98,27%	5	5,00	100,00 %	Tuntas	meningkatnya kualitas pelatihan bagi umkm dengan narasumber yang kompeten	peningkatan kualitas pelaksanaan	Ketua Tim Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.04 .2,01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan	Pelaku usaha	1350	100.863.500	99.285.455	98,44%	1350	2.321	171,93 %	Tuntas	Meningkatnya sasaran layanan perizinan dan nonperizinan	peningkatan sasaran layanan mobile	Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan

	Terintegrasi secara Elektronik	Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)										tidak layanan tetap namun melalui keliling dan pendampingan ke pelosok di wilayah kabupaten	perizinan dan nonperizinan	dan Nonperizinan
2.18.04.2,01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	orang	80	36.290.000	32.258.500	88,89%	80	64,00	80,00 %	Belum Tuntas	Menurunnya jumlah konsultasi dan pengaduan menunjukkan perbaikan layanan dengan harapan layanan yang ada telah dipahami dan dimengerti oleh pengguna layanan	peningkatan pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan	Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pemantauan dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2,01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Kegiatan usaha	500	154.242.500	150.320.100	97,46%	500	730,00	146,00 %	Tuntas	meningkatnya layanan perizinan persyaratan dasar yang perlu dilakukan pemantauan	peningkatan layanan perizinan persyaratan dasar yang dilakukan pemantauan	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**Persen**	**10**	**23.853.000**	**23.446.750**	**98,30%**	**10**	**12,80**	128,00 %	Tuntas	**meningkatnya pengendalian pelaksanaan melalui pengawasan penanaman modal baik melalui pendampingan langsung maupun daring**	**peningkatan kualitas kegiatan pengendalian pelaksanaan**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.05.2,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**	**persen**	**100**	23.853.000	**23.446.750**	**98,30%**	**100**	**100,00**	100,00 %	Tuntas	**meningkatnya pengendalian pelaksanaan melalui pengawasan penanaman modal baik melalui pengawasan langsung di**	**perluasan kegiatan pengendalian pelaksanaan**	**Koordinator PM**

												lapangan maupun bimbingan secara daring		
2.18.0.2,01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	Kegiatan usaha	60	23.853.000	**23.446.750**	**98,30%**	60	100,00	166,67 %	Tuntas	meningkatnya pengawasan penanaman modal melalui inspeksi lapangan maupun bimbingan teknis secara daring	peningkatan intensitas pengawasan baik melalui inspeksi lapangan maupun daring	Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**persen**	**50**	**105.000.000**	**95.861.000**	**91,30%**	**50**	**50,00**	100,00 %	Tuntas	**meningkatnya penyediaan data dari berbagai sektor perizinan nonperizinan**	**peningkatan penyediaan data tahun berikutnya**	**Kepala DPMPTSP**
2.18.06.2,01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**	**persen**	**50**	105.000.000	**95.861.000**	**91,30%**	**50**	**50,00**	100,00 %	Tuntas	**meningkatnya pengelolaan data dan informasi dengan memaksimalkan aplikasi dan sumberdaya pendukung lainnya**	**peningkatan intergrasi pengelolaan data dan informasi**	**Sekretaris**
2.18.06.2,01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	dokumen	2	105.000.000	**95.861.000**	**91,30%**	2	8,00	400,00 %	Tuntas	meningkatnya pengolahan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi dengan memaksimalkan aplikasi dan sumberdaya pendukung lainnya	peningkatan pengolahan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
	Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	predikat	76,16	**5.410.108.936**	5.528.177.237	90,64%	80,45	80,45	100,00 %	Tuntas	-	-	Kepala DPMPTSP
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	86,00	**5.410.108.936**	5.528.177.237	90,64%	86,00	86,60	100,69 %	Tuntas	Meningkatnya layanan umum yang dilaksananakn oleh Perangkat Daerah	Peningkatan layanan umum antara lain layanan administrasi maupun layanan informasi	Kepala DPMPTSP

													lainnya. Termasuk dalam layanan ini fasilitas dan sarana gedung di MPP	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**persen**	**100,00**	**5.410.108.936**	**4.865.427.281**	89,93%	**100**	**100,00**	100,00 %	Tuntas	-	-	**Kepala DPMPTSP**
		Nilai/Kategori PKO	**Nilai /Kategori**	**98,50**	**5.410.108.936**	**4.865.427.281**	89,93%	**98,50**	**98,50**	100%	Tuntas			**Kepala DPMPTSP**
2.18.01 .2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**	**Dokumen**	**3,00**	3.943.000	**2.370.500**	**60,12%**	**4**	**4,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Penyusunan akan dilaksanakan sesuai jadwal rencana	**Sekretaris**
2.18.01 .2,01.0 5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	dokumen	3,00	2.263.000	1.455.500	64,32%	3	3,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Penyelesaian dokumen disesuaikan rencana	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01 .2,01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan]	Laporan	1,00	1.680.000	915.000	54,46%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Penyelesaian dilaksanakan sesuai rencana	Ketua Tim Kerja PEP
2.18.01 .2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	3.740.425.434	**3.325.782.503**	**88,91%**	**12**	**12,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana	**Sekretaris**
2.18.01 .2,02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan)	Orang/bulan	25,00	3.740.425.434	3.325.782.503	88,91%	25	28,00	112,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan	Ketua Tim Kerja Keuangan
2.18.01 .2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**	**Laporan**	**1,00**	16.580.000	**13.825.000**	**83,38%**	**1**	**1,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Rencana kegiatan pada TW4	**Sekretaris**

2.18.01.2,05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	Orang	30,00	16.580.000	**13.825.000**	**83,38%**	30	30,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Kegiatan disesuaikan dengan rencana	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	367.538.200	**343.012.809**	**93,33%**	**12**	**12,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah selesai	Peningkatan realisasi keuangan pada TW4	**Sekretaris**
2.18.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	32.326.000	31.783.000	98,32%	3	3,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah dilaksanakan	Peningkatan pencairan keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	8,00	161.018.200	153.138.550	95,11%	8	8,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik sebagian telah dilaksanakan	Peningkatan realisasi keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	4,00	48.204.000	45.369.000	94,12%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai rencana	Peningkatan keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan (Paket]	Paket	4,00	45.540.000	44.010.000	96,64%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Realisasi kegiatan fisik telah	Peningkatan kegiatan dan realisasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	Dokumen	1,00	7.000.000	7.000.000	100,00 %	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Laporan	25,00	63.450.000	51.712.259	81,50%	25	32,00	128,00 %	Tuntas	Sebagian kegiatan telah dilaksanakan	Peningkatan kegiatan dan realisasi keuangan pada TW4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Dokumen	1,00	10.000.000	10.000.000	100,00 %	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan fisik telah dilaksanakan	Pengajuan pencairan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	154.249.000	**150.948.897**	**97,86%**	**1**	**1,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran	**Sekretaris**
2.18.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	Paket	1,00	35.000.000	34.113.650	97,47%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai target	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian

													karena pengurangan anggaran	
2.18.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	Unit	4,00	74.945.000	73.827.997	98,51%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Unit	28,00	44.304.000	43.007.250	97,07%	14	14,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan tidak di anggarkan kembali tahun berikutnya karena pengurangan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**	**Bulan**	**12,00**	839.795.302	**770.165.909**	**91,71%**	**12**	**12,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	**Sekretaris**
2.18.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	Laporan	4,00	2.400.000	2.160.000	90,00%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	443.662.922	385.488.409	86,89%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	4,00	50.854.000	43.388.000	85,32%	4	4,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	12	342.878.380	339.129.500	98,91%	12	12,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**	**Laporan**	**2,00**	287.578.000	**259.321.663**	**90,17%**	**1**	**1,00**	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	**Sekretaris**
2.18.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	15,00	169.130.000	144.547.963	85,47%	15	16,00	106,67 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas		Kasubag Umum dan Kepegawaian

	Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit]												
2.18.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	Unit	43	11.552.000	9.730.000	84,23%	43	43,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	Unit	1,00	9.282.000	9.200.000	99,12%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	1,00	71.289.543	70.575.700	99,00%	1	1,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	Unit	28,00	26.324.457	25.268.000	95,99%	28	28,00	100,00 %	Tuntas	Kegiatan sesuai anggaran kas	kegiatan akan di anggarkan kembali tahun berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Tri Wulan IV Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yang perlu dilaksanakan pada periode triwulan selanjutnya, antara lain sebagaimana berikut:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring	Indikator	Pelaksana	Uraian Tindak Lanjut/ Solusi	Keterangan
2.18.02.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	Koord PM	peningkatan pencapaian realisasi program tahun berikutnya	Belum Tuntas
2.18.03.2, 01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Koord PTSP	peningkatan pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan	Belum Tuntas

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 ada kegiatan yang telah terlaksana dan ada yang belum terlaksana, dan diharapkan akan selesai sesuai dengan rencana.

a. Capaian kinerja **Tujuan 1**: Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif, tercapai **100,46%** atau dengan kategori **Sangat Baik,** yang didukung **;**
   1) Program Pengembangan, pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran Rp. 94.792.400, capaian realisasi sebesar 94,79 %.
   2) Program Promosi Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 113.919.000 realisasi anggaran Rp. 112.783.951, capaian realisasi sebesar 99,00 %.
   3) Program Pelayanan Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 346.347.000 realisasi anggaran Rp. 335.865.855, capaian realisasi sebesar 96,97%.
   4) Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 23.853.000 realisasi anggaran Rp. 23.446.750, capaian realisasi sebesar 98,30%.
   5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 105.000.000 realisasi anggaran Rp. 95.861.000, capaian realisasi sebesar 91,30%.
   6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 5.410.108.936 realisasi anggaran Rp. 5.114.753.193, capaian realisasi sebesar 89,93%.

b. Capaian kinerja **Sasaran 1** : Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan tercapai sebesar **100,49%** atau dengan kategori **Sangat Baik,** yang didukung;
   1) Program Pelayanan Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 346.347.000 realisasi anggaran Rp. 335.865.855, capaian realisasi sebesar 96,97%.
   2) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 105.000.000 realisasi anggaran Rp. 95.861.000, capaian realisasi sebesar 91,30%.

c. Capaian kinerja **Sasaran 2** : Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal tercapai sebesar **100,49%** atau dengan kategori **Sangat Baik,** yang didukung;
   1) Program Pengembangan, pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 realisasi anggaran Rp. 94.792.400, capaian realisasi sebesar 94,79 %
   2) Program Promosi Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 113.919.000 realisasi anggaran Rp. 112.783.951, capaian realisasi sebesar 99,00 %
   3) Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 23.853.000 realisasi anggaran Rp. 23.446.750, capaian realisasi sebesar 98,30%.

d. Capaian kinerja **Sasaran Penunjang** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah tercapai sebesar **100,35%** atau dengan kategori **Sangat Baik,** yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 5.410.108.936 realisasi anggaran Rp. 5.114.753.193, capaian realisasi sebesar 89,93%.

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pada Tri Wulan IV Tahun 2025 secara keseluruhan rata-rata sebesar 102,53%, dan dalam kategori **Sangat Baik.** Adapun realisasi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 5.528.177.237 (90,64%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.009.227.936. Dengan demikian tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diperoleh angka 1,10 dengan kategori **EFISIEN.**

2. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

a. Penguatan dalam pencapaian realisasi penanaman modal dan PMA/ PMDN dengan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal agar segera diselesaikan.
b. Peningkatan realisasi penanaman modal dan PMA/PMD yang diharapkan mampu memberikan dampak positif pada dunia usaha dan perekonomian.
c. Peningkatan kualitas promosi investasi melalui penyebran informasi potensi investasi, forum investasi, serta pameran dengan harapan mampu menjadi daya tarik calon investor.
d. Peningkatan kualitas layanan investasi dan perizinan berusaha serta pendampingan kepada pelaku usaha umkm, fasilitasi perizinan, sehingga iklim investasi yang kondusif tetap terjaga.
e. Peningkatan realisasi LKPM bagi pelaku usaha baik pelaku usaha menengah besar mapun UMKM.

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi mandiri atas capaian target kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Tri wulan IV Tahun 2025 sekaligus realisasi capaian Tahun 2025.

Sragen, Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

TUGIYONO, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N - 57213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 052/107.1/18/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. mengkoordinasikan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan dokumen Pelaporan Kinerja;
b. mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
c. melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
d. menyampaikan dokumen pelaporan kinerja kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 08-01-2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

TUGIYONO, S.Ti
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 052/107.1 /18/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tugiyono, S.H	Plt. Kepala	Penanggung jawab
2.	Ilham Kurniawan, ST, MM	Sekretaris	Ketua
3.	Arif Bahtiar Rifai, SE	Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Erwan Adhitya Suddin, SH, MM	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya/ Koordinator Penanaman Modal	Anggota
5.	Ariyanto, SE	Penata Perizinan Ahli Muda / Kordinator PTSP	Anggota
7.	Pramudani Galur Okta, SH, MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Maya Widiyarti, S.Kom, M.Si	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan	Anggota
9.	Yustina Nugrahaeni, SS	Penata Perizinan Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Informasi dan Pengolahan Data	Anggota
10.	Atikah Yuliana, SS	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda /Ketua Tim Kerja Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Anggota

S11.	Risna Nurdiana, SE	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota
12.	Suharpadmi, SH	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Keuangan	Anggota
13.	Ratih Poespitowati, SE	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Anggota
14.	M. Fakhrudin, A.Md	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
15.	Nasrun Nugroho, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Anggota

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

TUGIYONO, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N - 57213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 052/107/18/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2026;

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan

dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;

c. mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
d. melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
e. menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
f. menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 08-01-2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

TUGIYONO, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

Salinan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Sragen;
2. Kepala Baperida Kabupaten Sragen;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
5. Kepala Bagian Organisasi
6. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 052/107 /18/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tugiyono, S.H	Plt. Kepala	Penanggung jawab
2.	Ilham Kurniawan, ST, MM	Sekretaris	Ketua
3.	Arif Bahtiar Rifai, SE	Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Erwan Adhitya Suddin, SH, MM	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya/ Koordinator Penanaman Modal	Anggota
5.	Ariyanto, SE	Penata Perizinan Ahli Muda / Kordinator PTSP	Anggota
7.	Pramudani Galur Okta, SH, MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Maya Widiyarti, S.Kom, M.Si	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan	Anggota
9.	Yustina Nugrahaeni, SS	Penata Perizinan Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Informasi dan Pengolahan Data	Anggota
10.	Atikah Yuliana, SS	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda /Ketua Tim Kerja Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Anggota

11.	Risna Nurdiana, SE	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
12.	Suharpadmi, SH	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Keuangan	Anggota
13.	Ratih Poespitowati, SE	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Anggota
14.	M. Fakhrudin, A.Md	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
15.	Nasrun Nugroho, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Anggota

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

TUGIYONO, S.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N - 57213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 052/108/18/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang
a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja perlu dibentuk tim evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2026;

Mengingat
1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. menghimpun dan mengolah data dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
b. mengumpulkan dan menganalisa data dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;

c. melaksanakan pengukuran kinerja dan penilaian kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
d. mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja;

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 08-01-2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

TUGIYONO, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

Salinan disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Baperida Kabupaten Sragen;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen
3. Kepala Bagian Organisasi
4. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 052/108/18/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tugiyono, S.H	Plt. Kepala	Penanggungjawab
2.	Ilham Kurniawan, ST, MM	Sekretaris	Ketua
3.	Arif Bahtiar Rifai, SE	Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Erwan Adhitya Suddin, SH, MM	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya/ Koordinator Penanaman Modal	Anggota
5.	Ariyanto, SE	Penata Perizinan Ahli Muda / Kordinator PTSP	Anggota
6.	Pramudani Galur Okta, SH, MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Suharpadmi, SH	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Keuangan	Anggota
8.	Ratih Poespitowati, SE	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Anggota
9.	M. Fakhrudin, A.Md	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
10.	Nasrun Nugroho, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Anggota

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

TUGIYONO, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA TAHUN 2026

DINAS DPMPTSP

KABUPATEN SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dr. Soetomo No. 05 Sine Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website http : // www.dpmptsp.sragenkab.go.id dan E-mail :
dpmptsp@sragenkab.go.id

SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 052 /73 /18 / 2026

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data kinerja lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 66 Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen merupakan acuan bagi pejabat dan pemegang kepentingan dalam melaksanakan pengumpulan data capaian kinerja lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 5 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Kabupaten Sragen

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 052 /73 / 18 / 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pengambilan keputusan (*decision making*) haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada intuisi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data (*data analysis*) menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain, meliputi majalah, surat kabar, buku, dan laporan lainnya. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja (*performance management system*) organisasi. Keberhasilan *knowledge management* di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal (*reliable*), relevan (*relevance*) dan lengkap (*completness*).

Suatu organisasi yang besar dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai- nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dr. Soetomo No. 05 Sine Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website http : // www.dpmptsp.sragenkab.go.id dan E-mail :
dpmptsp@sragenkab.go.id

SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 052 /73 /18 / 2026

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data kinerja lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

1.5 Pengertian dan Istilah

a) **Pemantauan (*Monitoring*)** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output, outcome, benefit* dan *impact* yang diharapkan;

b) **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indicator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai;

c) **Indikator Kinerja** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.

d) **Indikator Kinerja Utama (IKU)/ *Key Performance Indicators (KPIs)*** adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan, sasaran strategis suatu organisasi.

e) **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan atau target kinerja yang akan dicapai.

f) **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.

g) **Pelaporan data kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program kegiatan dan atau sub kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

BAB II

JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Data indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU menggambarkan capaian kinerja tujuan, sasaran strategis/sasaran penunjang, program Perangkat Daerah, sedangkan IKK menggambarkan capaian kinerja, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

3.1. Data Indikator Kinerja Utama (IKU)

Data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
1	2	3
	RPJMD (2022-2025)	
	Tujuan Strategis : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi
	Sasaran Strategis : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN
	RPJMD (2025-2029)	
	Tujuan Strategis : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi
	Sasaran Strategis : Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperzinaan
	Sasaran Strategis : Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**
	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah even promosi [kali]**
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]

	Sasaran Penunjang:	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan [Dokumen]

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]

BAB II

JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Data indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU menggambarkan capaian kinerja tujuan, sasaran strategis/sasaran penunjang, program Perangkat Daerah, sedangkan IKK menggambarkan capaian kinerja, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

3.1. Data Indikator Kinerja Utama (IKU)

Data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
1	2	3
	RPJMD (2022-2025)	
	Tujuan Strategis : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi
	Sasaran Strategis : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN
	RPJMD (2025-2029)	
	Tujuan Strategis : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi
	Sasaran Strategis : Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperzinaan
	Sasaran Strategis : Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**
	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	**Jumlah dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (dokumen)**
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (dokumen
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah even promosi [kali]**
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**

	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]
	Sasaran Penunjang:	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan [Dokumen]
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]

3.3. Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yaitu dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja). Data IKK yang menjadi indikator keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

NO	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**
	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	**Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal**
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	**Jumlah dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (dokumen)**
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (dokumen
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah even promosi [kali]**
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]**
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]

	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]**
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]**
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan [Dokumen]
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pengumpulan data capaian kinerja menggunakan metode *bottom up*. Data diperoleh dari unit lebih bawah lalu dikumpulkan di unit di atasnya. Untuk mempermudah pengujian ketepatan pengukuran kinerja, maka data capaian harus disampaikan secara lengkap dan dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan dan triwulan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

4.1. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran dan evaluasi IKU dan indikator penting lainnya (sasaran penunjang, program), mengikuti ketentuannya sebagai berikut :

(1) Pengukuran IKU dilakukan maksimal 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Setda dan Bapperida.

(2) Pengukuran IKU dilakukan oleh Tim yang dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

(3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membentuk Tim Pengumpulan Data IKU (lintas bidang) untuk membantu melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam rangka Pengumpulan Data IKU, dan dibuat dalam bentuk *soft-copy*, kemudian diunggah (*upload*) pada *e_sakip* dan *e_monevrkpd.*

(4) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai koordinator dan bertanggung jawab di tingkat Perangkat Daerah.

4.2. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan pengumpulan data kinerja kegiatan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut :

(1) Setiap Pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional yang setara melaporkan hasil kinerja kegiatan/Sub Kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilakukan secara berkala setiap bulan atau triwulan.

(2) Rekapitulasi laporan kinerja kegiatan berkala yang sudah terkumpul dan telah divalidasi oleh pimpinan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan (Laporan POK) dan Bapperida (Monev Triwulan).

(3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat membentuk tim kerja untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan dan mekanisme kerja sebagai acuan.

4.3. Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sementara (*) dan data akhir, sesuai dengan perkembangan capaian dan realisasi. Kondisi ini memungkinkan untuk dilakukan koreksi untuk perbaikan data kinerja.

BAB IV
ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka evaluasi IKU dan IKK untuk menilai sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya harus dikaitkan dengan sumber (input atau masukan) yang berada dibawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Analisis dalam evaluasi kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai dengan melakukan pengukuran kinerja, dan dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan.

Dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dilakukan melalui:

(1) Pembandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya.

(2) Analisis-analisis terhadap terjadinya:
   a. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan
   b. Menjelaskan manfaat dan dampak (baik yang negatif maupun positif) dari keberhasilan tersebut.

Agar penyampaian uraiannya dapat lebih fokus, analisis data dalam evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang dianalisis yaitu:

(1) Evaluasi Kinerja Kegiatan.

   Pada tahapan ini analisis dilakukan dengan menggunakan ukuran prosentase fisik pencapaian indikator kinerja kegiatan (kegiatan dan Sub Kegiatan).

(2) Evaluasi Kinerja Utama

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja utama dan kinerja lainnya (tujuan/sasaran strategis, sasaran penunjang dan program) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dengan didasarkan pada evaluasi kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi kinerja utama dan kinerja lainnya. Hal ini untuk menjelaskan sejauh mana target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dicapai beserta hal-hal yang menjadi pendukung ataupun penghambat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penjelasan kinerja kegiatan dapat dilakukan secara parsial maupun dianalisis antar kegiatan yang berkaitan sehingga dapat dijelaskan bagaimana kontribusi setiap kegiatan terhadap pencapaian kinerja utama.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini merupakan acuan yang harus dipedomani bagi para pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporan capaian kinerja outcome dan output sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen merupakan rangkaian kegiatan sebelum dilakukan pengukuran *Outcome* dan *Output* sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data kinerja juga berfungsi sebagai rangkaian / proses penyampaian laporan kinerja berkala dalam rangkaian pertanggungjawaban kepada Bupati Sragen. Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pihak di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data capaian kinerja ini disusun selaras dengan perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama ini. Namun demikian, sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, Petunjuk Pelaksanaan ini tentu masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukan positif bagi penyempurnaan Juklak ini tetap diperlukan agar tujuan pengumpulan data kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi.

Plt. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Kabupaten Sragen

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PM PTSP
SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	:	900/1091/18/2022
Tanggal pembuatan	:	06 - 10 - 2022
Tanggal revisi	:	-
Tanggal pengesahan	:	06 - 10 - 2022
Disahkan oleh	:	PLT KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN Asisten Perekonomian dan Pembangunan TUGIYONO, SH NIP. 196708 199303 1 010
Judul SOP	:	**Pengumpulan Data Kinerja**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;	1 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang perencanaan kinerja;
2 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;	2 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pengukuran kinerja;
3 Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	3 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pelaporan kinerja;
4 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016	4 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP); dan
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	5 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6 Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Surat Masuk	1 APBD, RKA, DPA.
2	2 Dokumen Perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, RKT, RENCANA AKSI, PERJANJIAN KINERJA).
3	3 Perangkat Pengolahan Data.

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi penyelenggaraan manajemen kinerja di DPMPTSP Kabupaten Sragen	Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi Kinerja
2 Harus dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas di DPMPTSP Kabupaten Sragen.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PM PTSP

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris / Koord	Subkor PEP	Kasubag/ Subkor				
1	Sekretaris menugaskan Subkor PEP untuk melaporkan data kinerja		Mulai			Instruksi	15 menit	Disposisi	
2	Menyiapkan kertas kerja laporan kinerja dan mengirimkan ke setiap bidang untuk diisi.					DPA, Laporan kinerja periode sebelumnya	45 menit	Kertas kerja laporan kinerja per bidang	
3	Menerima kertas kerja laporan kinerja, mengukur dan mengisi data capaian kinerja dan menyerahkan kepada Kabid					Kertas kerja laporan kinerja, SPJ, data pendukung laporan kinerja	3 hari	Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja per	
4	Memeriksa kertas kerja laporan kinerja. Jika **Ya**, menandatangani kertas kerja laporan kinerja. Jika **Tidak**, mengembalikan kepada Kasubag/ Subkor untuk menyempurnakan. Selanjutnya menyerahkan kepada Subkor PEP.					Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja, SPJ, data pendukung laporan kinerja	60 menit	Kertas kerja laporan kinerja per rumpun yang ditandatangani	
5	Menerima berkas kertas kerja laporan kinerja dan menginput data capaian kinerja pada Laporan kinerja. Menyerahkan kepada Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf.					Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja, SPJ, data	45 menit	Draft laporan laporan kinerja	
6	Sekretaris menerima dan memeriksa draft laporan laporan kinerja. Jika **Ya**, menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk dimintakan tanda tangan. Jika **Tidak**, menugaskan Subkor PEP untuk menyempurnakan.					pendukung laporan kinerja	15 menit	Draft laporan laporan kinerja	
7	Memeriksa draf laporan kinerja. Jika Ya, menandatangani laporan kinerja. Jika Tidak, menugaskan Sekretaris untuk menyempurnakan					Draft laporan laporan kinerja	10 menit	Laporan kinerja SKPD yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas	
8	menandatangani laporan kinerja. Jika **Tidak**, menugaskan Sekretaris untuk menyempurnakan			Selesai		Draft laporan laporan kinerja	10 menit	Dokumen laporan kinerja	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PM PTSP
SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	:	900/1091/18/2022
Tanggal pembuatan	:	06 - 10 - 2022
Tanggal revisi	:	-
Tanggal pengesahan	:	06 - 10 - 2022
Disahkan oleh	:	PLT KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN Asisten Perekonomian dan Pembangunan TUGIYONO, SH NIP. 196708 199303 1 010
Judul SOP	:	**Pengumpulan Data Kinerja**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;	1 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang perencanaan kinerja;
2 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;	2 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pengukuran kinerja;
3 Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	3 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pelaporan kinerja;
4 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016	4 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP); dan
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	5 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6 Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Surat Masuk	1 APBD, RKA, DPA.
2	2 Dokumen Perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, RKT, RENCANA AKSI, PERJANJIAN KINERJA).
3	3 Perangkat Pengolahan Data.

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi penyelenggaraan manajemen kinerja di DPMPTSP Kabupaten Sragen	Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi Kinerja
2 Harus dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas di DPMPTSP Kabupaten Sragen.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PM PTSP

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris / Koord	Subkor PEP	Kasubag/ Subkor				
1	Sekretaris menugaskan Subkor PEP untuk melaporkan data kinerja		Mulai			Instruksi	15 menit	Disposisi	
2	Menyiapkan kertas kerja laporan kinerja dan mengirimkan ke setiap bidang untuk diisi.					DPA, Laporan kinerja periode sebelumnya	45 menit	Kertas kerja laporan kinerja per bidang	
3	Menerima kertas kerja laporan kinerja, mengukur dan mengisi data capaian kinerja dan menyerahkan kepada Kabid					Kertas kerja laporan kinerja, SPJ, data pendukung laporan kinerja	3 hari	Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja per	
4	Memeriksa kertas kerja laporan kinerja. Jika **Ya**, menandatangani kertas kerja laporan kinerja. Jika **Tidak**, mengembalikan kepada Kasubag/ Subkor untuk menyempurnakan. Selanjutnya menyerahkan kepada Subkor PEP.					Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja, SPJ, data pendukung laporan kinerja	60 menit	Kertas kerja laporan kinerja per rumpun yang ditandatangani	
5	Menerima berkas kertas kerja laporan kinerja dan menginput data capaian kinerja pada Laporan kinerja. Menyerahkan kepada Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf.					Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja, SPJ, data	45 menit	Draft laporan laporan kinerja	
6	Sekretaris menerima dan memeriksa draft laporan laporan kinerja. Jika **Ya**, menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk dimintakan tanda tangan. Jika **Tidak**, menugaskan Subkor PEP untuk menyempurnakan.					pendukung laporan kinerja	15 menit	Draft laporan laporan kinerja	
7	Memeriksa draf laporan kinerja. Jika Ya, menandatangani laporan kinerja. Jika Tidak, menugaskan Sekretaris untuk menyempurnakan					Draft laporan laporan kinerja	10 menit	Laporan kinerja SKPD yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas	
8	menandatangani laporan kinerja. Jika **Tidak**, menugaskan Sekretaris untuk menyempurnakan			Selesai		Draft laporan laporan kinerja	10 menit	Dokumen laporan kinerja	

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

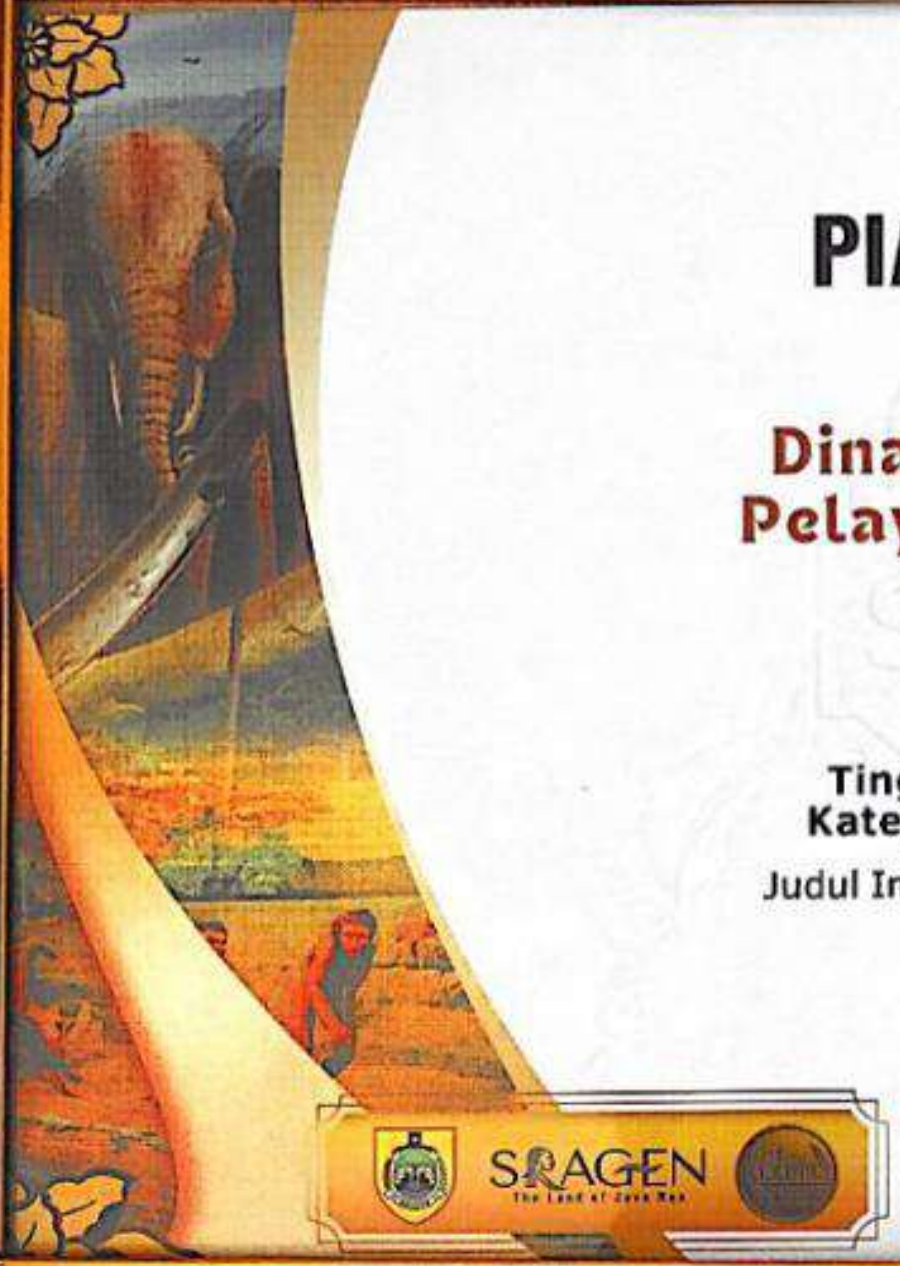
Nomor SOP	01/DPMPTSP/82/29/2018
Tanggal pembuatan	26 Oktober 2018
Tanggal revisi	-
Tanggal pengesahan	02 Januari 2019
Disahkan oleh	KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN Drs. IYUSEP WAHYUDI, MSi NIP. 19690907 199003 1 005
Judul SOP	**PENYUSUNAN LKjIP**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3 Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	1 Menguasai Mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD dan RPJMD) 2 Memahami Renstra DPMPTSP dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 Memahami Instrumen-instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4 Menguasai Komputer
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Surat Masuk 2 3	1 Komputer 2 Printer 3 ATK
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
1 Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi penyelenggaraan manajemen kinerja di DPMPTSP Kabupaten Sragen 2 Harus dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas di DPMPTSP Kabupaten Sragen.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan /Program di DPMPTSP Kabupaten Sragen.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Sekretaris	Kasubag PEP	JFU	Bidang-bidang Lain	Persyaratan	Waktu (hari)	Output	
1	Memberi arahan/ disposisi kepada Sekretaris koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP	Mulai					-Kertas disposisi, Surat dari Bupati/Inspektora	2	Disposisi	
2	Menerima, menealaah dan memberi arahan kepada Kasubbag PEP untuk menyiapkan bahan-bahan penyusunan LKjIP DPMPTSP						- Lembar disposisi	5	Disposisi	
3	Menerima, menelaah dan memerintahkan Kasubag PEP untuk mempersiapkan bahan penyusunan LKjIP						- Data awal	6	Laporan Persiapan Rapat	
4	Melaksanakan koordinasi/pengumpulan bahan dengan bidang-bidang lain dalam Penyusunan draft LKjIP dan menyampaikan kepada Kasubag PEP						- Data, Bahan dari bidang lain	10	bahan-bahan materi	
5	Menerima hasil inventarisasi materi untuk penyusunan draft LKjIP						- Data, Bahan dari bidang lain	3	Draft LKjIP	
7	Menelaah dan menganalisa materi Draft LKjIP						- Draft LKjIP, Data	3	Draft LKjIP	
8	Melakukan perbaikan/edit atas naskah draft LKjIP apabila masih perlu perbaikan						- Draft LKjIP, Data	1	Draft LKjIP	
9	Menerima, memeriksa, memaraf dan melaporkan kepada Sekretaris						- Draft LKjIP, Data	1	Draft Final LKjIP	
10	Menerima, memeriksa, memaraf draft LKjIP yang telah disusun dan melaporkan kepada Kepala Badan						- Draft Final LKjIP	2	Draft Final LKjIP	
11	Menerima, memeriksa dan menandatangani draft dokumen menjadi dokumen LKjIP DPMPTSP Kabupaten Sragen						- Draft Final LKjIP	1	Dokumen LKjIP	
12	Dokumen LKjIP didistribusikan kepada Sekretaris/Kasubag PEP dan Fungsional Umum sebagai arsip						Dokumen	1	Dokumen LKjIP	



BUPATI SRAGEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 000.9/1450/23/2025

Diberikan kepada:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

sebagai

JUARA 1

Lomba Inovasi Daerah
Tingkat Kabupaten Sragen Tahun 2025
Kategori OPD/RSUD/BUMD/Bagian Setda

Judul Inovasi : SIPELANGI (Sistem Informasi Peluang Investasi) versi PENGEMBANGAN

Sragen, 17 November 2025
Bupati Sragen

Sigit Pamungkas, S.IP., M.A.



PENERIMAAN PENGHARGAAN

JUARA 1 LOMBA INOVASI DAERAH TINGKAT KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

NOMOR : SER-00388/WPJ.32/2025

DIBERIKAN KEPADA

Pemerintah Kabupaten Sragen

Sebagai Pemerintah Daerah dengan Pelaporan Kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Terbaik I Tahun 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah II

Teguh Budiharto



PENERIMAAN PENGHARGAAN TERBAIK I PELAPORAN KSWP TAHUN 2025

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Dengan Penilaian
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Terbaik Kedua (II) Tahun 2025
Dengan Jumlah Nilai Total 80,45 (A)

Sragen, 26 November 2025

Bupati Sragen

Sigit Pamungkas, SIP.,MA

BUPATI SRAGEN

Dipindai dengan CamScanner



PENERIMAAN PENGHARGAAN TERBAIK II SAKIP TAHUN 2025